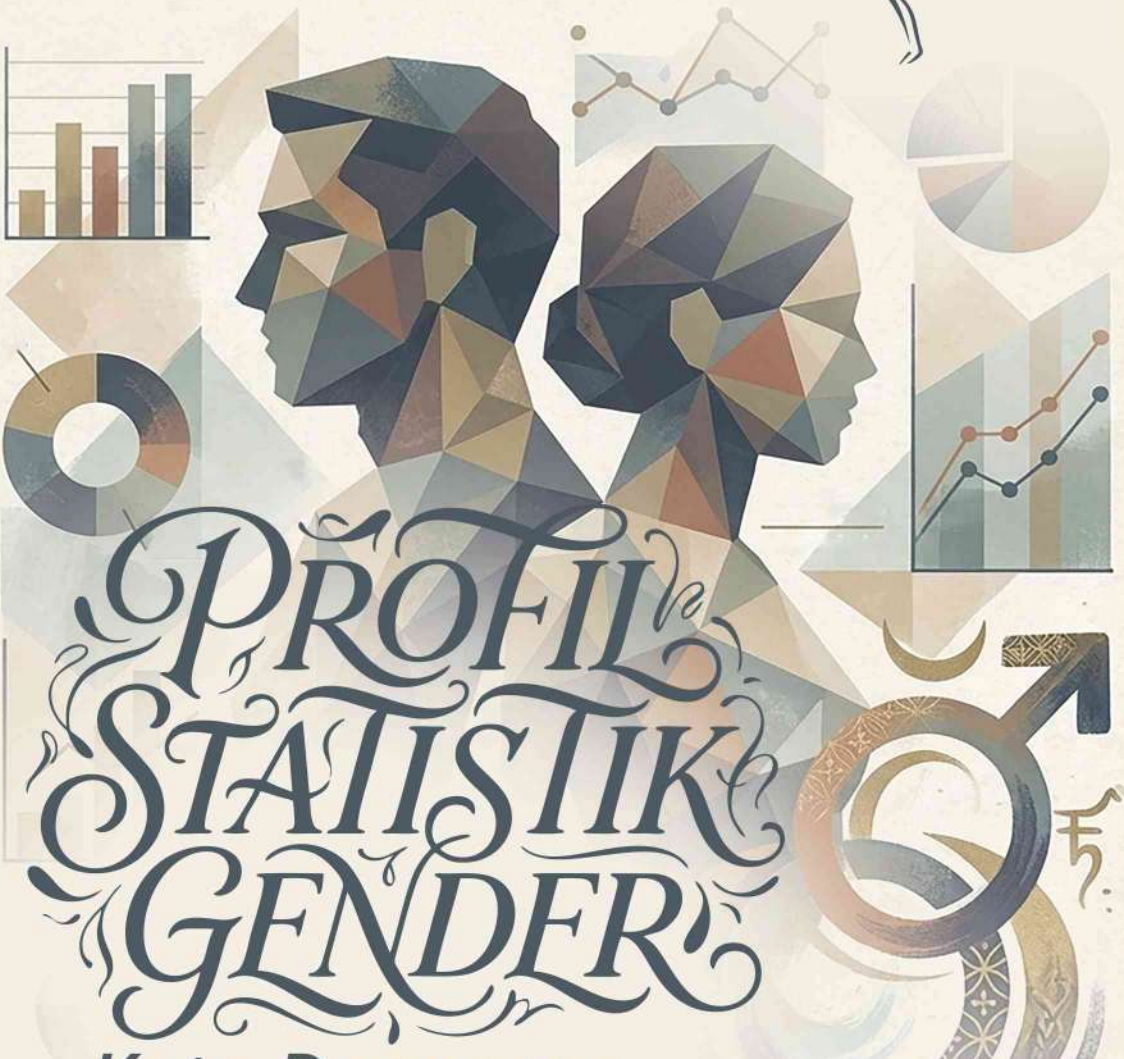


PROFIL STATISTIK GENDER

Kota Denpasar
Tahun 2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA DENPASAR



PROFIL STATISTIK GENDER KOTA DENPASAR TAHUN 2026

Oleh:
WIDHIANTHINI
NI LUH MADE INDAH MURDYANI DEWI
NYOMAN AYU SUKMA PRAMESTISARI

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA



SAMBUTAN

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

Om Swastyastu,



Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widi Wasa karena berkat asung kertha wara nugraha- Nya penyusunan buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar tahun 2026 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi persoalan gender dan pemberdayaan perempuan, namun sampai saat ini ketimpangan gender pada berbagai bidang pembangunan masih tampak cukup menonjol, seperti di bidang ekonomi, pendidikan, dan politik. Oleh karena itu, hal penting yang perlu dilakukan secara serius dan konsisten adalah penerapan strategi

pengarusutamaan gender (PUG). Sementara ini masih ada dugaan bahwa, salah satu penyebab sulitnya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah karena belum maksimalnya pengintegrasian gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai akibat lemahnya kondisi data gender yang ada sehingga kebijakan/ program/kegiatan pembangunan yang dihasilkan belum sepenuhnya berperspektif gender. Padahal data terpilah berdasarkan jenis kelamin atau yang sering disebut data gender sangat penting artinya dalam setiap penyusunan perencanaan kebijakan/ program/kegiatan pembangunan. Data ini dapat dikatakan sebagai dasar utama dalam menyusun perencanaan yang responsif gender karena atas dasar inilah kita bisa mengidentifikasi isu-isu gender yang masih terjadi di masyarakat.

Tersusunnya buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2026, tidak lepas dan adanya komitmen dari pemerintah Kota Denpasar untuk mempublikasikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam berbagai aspek pembangunan dan secara berkala memperbaharui data tersebut. Tujuan publikasi ini adalah untuk menunjukkan secara lebih nyata tentang kesenjangan dan isu gender yang masih terjadi pada berbagai aspek pembangunan yang pada gilirannya dapat memberikan petunjuk secara lebih jelas kepada para penentu kebijakan dan penyusun program/kegiatan sehingga penanganan isu gender dapat dilakukan secara lebih cermat dan tepat.

Oleh Karena itu, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Walikota Denpasar serta semua pihak yang telah memfasilitasi sampai terwujudnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan di Kota Denpasar.

Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, Juni 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty, SS.,M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19720223 199603 2 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa Buku Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2026 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Tujuan penyusunan data terpilah dalam buku statistik gender adalah untuk menyajikan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin di berbagai aspek pembangunan, seperti aspek pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, publik dan aspek lainnya yang ada di Kota Denpasar. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsive gender.

Melalui buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar diharapkan para perencana dapat menggunakan data-data ini sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan isu-isu gender terutama yang menjadi salah satu permasalahan di Kota Denpasar. Penyusunan buku ini diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar bekerja sama

dengan Kajian Gender dan Perlindungan Anak Universitas Udayana.

Penyusunan buku profil ini merupakan kelanjutan dari buku profil tahun sebelumnya. Melalui kesempatan ini tim penyusun memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam buku ini. Tim penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam melakukan penyusunan buku ini.

Akhirnya kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi pembangunan Kota Denpasar khususnya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan mengimplementasikan pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan.

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

SAMBUTAN ---------- iii
KATA PENGANTAR ---------- vi
DAFTAR ISI ---------- viii
BAB I PENDAHULUAN ---------- 1
1.1 Latar Belakang ---------- 1
1.2 Tujuan ---------- 3
1.3 Manfaat ---------- 4
1.4 Jenis dan Sumber Data ---------- 4
1.5 Analisis Data ---------- 5

BAB II KONSEP-KONSEP ---------- 6
2.1 Konstruksi Gender ---------- 6
2.2 Pengarusutamaan Gender (PUG) ------- 9
2.3 Statistik Gender ---------- 13

BAB III GAMBARAN UMUM KOTA DENPASAR ----- 17
3.1 Kondisi Geografis dan Topografis-------- 17
3.2 Sekilas Sejarah Berdirinya Kota Denpasar ---------- 20
3.3 Lambang Kota Denpasar dan Penjelasan---------- 23
3.4 Visi dan Misi---------- 25
3.5 Sistem Pemerintahan---------- 27
3.6 Kondisi Demografi---------- 28
3.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Denpasar ---------- 31
3.8 Indek Pemberdayaan Gender (IDG)----- 34
3.9 Indek Pembangunan Gender (IPG)------ 39
3.10 Indeks Ketimpangan Gender ---------- 41

BAB IV PENDIDIKAN ---------- 44
4.1 Angka Partisipasi Murni (APM) ---------- 47
4.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) ---------- 50
4.3 Jumlah Siswa ---------- 56
4.4 Sekolah ---------- 80
4.5 Guru ---------- 81
4.6 Kepala Sekolah ---------- 84
4.7 Guru yang Tersertifikasi ---------- 91

BAB V KESEHATAN ---------- 97
5.1 Angka Kelahiran Bayi ---------- 98
5.2 Angka Kelahiran Balita ---------- 103
5.3 ASI Eksklusif ---------- 107
5.4 Status Gizi ---------- 111
5.5 Pojok ASI ---------- 117
5.6 Cakupan Imunisasi pada Bayi ---------- 120
5.7 Kematian Ibu ---------- 124
5.8 Angka Harapan Hidup ---------- 124
5.9 Jumlah Dokter Umum danDokter Spesialis ---------- 125

BAB VI EKONOMI ---------- 134
6.1 Kegiatan Utama Penduduk ---------- 137
6.2 Penduduk Usia 15-59 Tahun Menurut Jenis Kelamin ---------- 138
6.3 Kegiatan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas ---------- 141
6.4 Tenaga Penyuluh Pertanian ---------- 147
6.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ---------- 149

6.6 Partisipasi Perempuan di Sektor Swasta---------- 151
6.7 Tenaga Kerja Asing Pendatang ---------- 156
6.8 Lingkungan Hidup dan Kebersihan ------ 162
6.9 Petugas Layanan Parkir ---------- 168
6.10 Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata ------ 170
6.11 Pemilik Usaha Salon Kecantikan ------- 175
6.12 KK Terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)---------- 177
6.13 Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin ---------- 182
6.14 UMKM---------- 184

BAB VII SEKTOR PUBLIK---------- 191
7.1 Eksekutif ---------- 193
7.2 Legislatif---------- 203
7.3 Yudikatif---------- 221

BAB VIII LAIN-LAIN ---------- 227
8.1 Kekerasan ---------- 227
8.2 Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) 243
8.3 Lansia Terlantar PPKS---------- 246

BAB IX PENUTUP ---------- 249
DAFTAR PUSTAKA ---------- 251

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan, 2021-2025 ---------- 28
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 30
Tabel 3.3 Perbedaan IKG dengan IPG ---------- 42
Tabel 4.1 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 48
Tabel 4.2 Angka Partisipasi Khusus (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 51
Tabel 4.3 APK/APM SMA/MA/SMK/ Sederajat TP. 2024/2025 ---------- 54
Tabel 4.4 APS 16-18 tahun TP2024/2025 ---------- 55
Tabel 4.5 Jumlah Siswa PAUD menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025 - 58
Tabel 4.6 Jumlah Siswa SD menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2025 --- 62
Tabel 4.7 Jumlah Siswa SMP menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2025 --- 66
Tabel 4.8 Jumlah Siswa SMA/MA/SMK menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2025 ---------- 71
Tabel 4.9 Jumlah Siswa berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 73

Tabel 4.10 Persentase Penduduk Berumur 25 Tahun ke Atas dengan Pendidikan SMA ke Atas di Kota Denpasar dan Provinsi Bali Menurut Jenis Kelamin (Persen) Tahun 2025 ---------- 74
Tabel 4.11 Jumlah Siswa SD/MI yang Putus Sekolah berdasarkan Kecamatan Tahun 2025 ---------- 76
Tabel 4.12 Jumlah Siswa SMP/MTs yang Putus Sekolah berdasarkan Kecamatan Tahun 2025 ---------- 77
Tabel 4.13 Jumlah Anak Umur 7-18 Tahun Yang Putus Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 77
Tabel 4.14 Jumlah Siswa SMA/SMK yang Putus Sekolah Tahun 2024/2025 ---------- 78
Tabel 4.15 Jumlah Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 81
Tabel 4.16 Jumlah Guru SD menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 83
Tabel 4.17 Jumlah Kepala Sekolah SD menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 86
Tabel 4.18 Jumlah Kepala Sekolah SMP menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 88
Tabel 4.19 Jumlah Kepala SMA (Negeri dan Swasta) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan ---------- 90

Tabel 4.20 Jumlah Guru SD yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 93
Tabel 4.21 Jumlah Guru SMP yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 96
Tabel 5.1 Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 dan 2025 ---- 99
Tabel 5.2 Proporsi Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun yang pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam 2 Tahun Terakhir Tidak di Fasilitasi Kesehatan (MTF) di Kota Denpasar ----- 102
Tabel 5.3 Jumlah Angka Kelahiran Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 dan 2025 ---- 105
Tabel 5.4 ASI Eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2024 dan 2025 ---------- 109
Tabel 5.5 Status Gizi di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 ---------- 113
Tabel 5.6 Pojok ASI di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 ---------- 119
Tabel 5.7 Cakupan Imunisasi Pada Bayi di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 ---------- 122
Tabel 5.8 Jumlah Angka Kematian Ibu Maternal di Kota Denpasar Tahun 2022- 2025 ---- 124
Tabel 5.9 Jumlah Angka Harapan Hidup di Kota Denpasar 2021-2024 ---------- 125

Tabel 5.10 Jumlah Dokter Umum menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 ---------- 126
Tabel 5.11 Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat dan Bidan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 130
Tabel 6.1 Jumlah Penduduk Usia Produktif (0-60 Tahun+) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 (ribu orang) ---------- 139
Tabel 6.2 Penduduk Usia 18 Tahun Keatas Menurut Kegiatan yang Dilakukan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 (orang) ---------- 141
Tabel 6.3 Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 ---------- 143
Tabel 6.4 Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kota Denpasar Tahun 2024-2025 ----- 146
Tabel 6.5 Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 - 2025 ---------- 147
Tabel 6.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Denpasar dan Provinsi Bali Jenis Kelamin (persen) ---------- 149
Tabel 6.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 ---------- 150
Tabel 6.8 Jumlah Perempuan yang Bekerja di Sektor Swasta Tahun 2024-2025 --------- 152

Tabel 6.9 Persentase Perempuan yang Bekerja di Lembaga Swasta di Kota Denpasar 2025 ---------- 153
Tabel 6.10 Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kota Denpasar dan Provinsi Bali ---------- 154
Tabel 6.11 Persentase Keterlibatan Perempuan Sebagai Tenaga Profesional di Kota Denpasar dan Provinsi Bali (Persen) Tahun 2024 ---------- 155
Tabel 6.12 Tenaga Kerja Asing Pendatang Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 ---------- 157
Tabel 6.13 Negara Asal Tenaga Kerja Asing --------- 158
Tabel 6.14 Legalitas Tenaga Kerja Asing ---------- 161
Tabel 6.15 Jumlah Tenaga Kebersihan dan TPST Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 ---------- 163
Tabel 6.16 Jumlah Tenaga TPS3R Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 ---------- 164
Tabel 6.17 Jumlah Petugas Kebersihan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 ---------- 165
Tabel 6.18 Jumlah Tenaga Kebersihan dan Pertamanan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 167
Tabel 6.19 Jumlah Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pelantaran menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 169

Tabel 6.20 Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Sektor Pariwisata menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025 - 171
Tabel 6.21 Jumlah Penanggung Jawab Usaha Akomodasi di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin Tahun 2025 ---------- 173
Tabel 6.22 Tenaga Kerja yang Diserap pada Bidang Usaha Hotel dan Restaurant menurut Jenis Kelamin Tahun 2025 ----- 174
Tabel 6.23 Usaha Salon Kecantikan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025 - 176
Tabel 6.24 Jumlah KK Terdaftar Pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) menurut Rumah Tangga (RT) dan Anggota Rumah Tangga (ART) di Kota Denpasar Tahun 2024 ---------- 177
Tabel 6.25 Jumlah KK Terdaftar Pada DTSEN di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 178
Tabel 6.26 PPKS di Kota Denpasar Tahun 2024 ---- 179
Tabel 6.27 PPKS di Kota Denpasar Tahun 2025 --- 181
Tabel 6.28 Jumlah Pencari Kerja Yang Telah Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 182
Tabel 6.29 Pemenuhan Lowongan Permintaan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 183
Tabel 6.30 Jumlah UMKM - UMKM Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 185

Tabel 6.31 Jenis Usaha dan Data Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Pada UMKM Kota Denpasar 2025 ---------- 186
Tabel 6.32 Upah Minimum Tenaga Kerja di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 --------- 189
Tabel 7.1 Komposisi ASN Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 -- 194
Tabel 7.2 Komposisi PPPK Menurut Jenjang (Honorer dan THL) dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 ---------- 196
Tabel 7.3 Jumlah Pejabat yang Sudah Mengikuti Diklat Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 ---------- 197
Tabel 7.4 Proporsi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang Pernah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 dan 2025 ---- 199
Tabel 7.5 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Unit Kerja di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 ---------- 200
Tabel 7.6 Jumlah Pejabat Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 ---------- 202
Tabel 7.7 Proporsi Keanggotaan DPRD Menurut Partai Periode 2024-2029 dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar ---------- 204
Tabel 7.8 Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen di Kota Denpasar dan Provinsi Bali (Persen) ---------- 205

Tabel 7.9 Jumlah Pimpinan Partai Politik (Parpol) Menurut Nama Partai dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-2025 ---------- 207
Tabel 7.10 Jumlah Pengurus Partai Politik (Parpol) Menurut Nama Partai dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-2025 ---------- 208
Tabel 7.11 Jumlah Anggota KPU Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-2025 ---------- 210
Tabel 7.12 Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-2025 ---------- 212
Tabel 7.13 Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 – 2025 ---------- 213
Tabel 7.14 Jumlah KPPS dan PK TPS Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-2025 ---------- 214
Tabel 7.15 Jumlah Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PANTARLIH) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-2025 ---------- 216
Tabel 7.16 Jumlah Petugas Ketertiban (GASTIB) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-2025 ---------- 218
Tabel 7.17 Jumlah Anggota Bawaslu Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-2025 ---------- 220

Tabel 7.18 Jumlah Anggota Bawaslu dan Pengawas Pemilu Lapangan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 220
Tabel 7.19 Jumlah Penegak Hukum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025 222
Tabel 7.20 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 ---------- 223
Tabel 7.21 Jumlah Perempuan yang Bekerja di Lembaga Pemerintahan di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 225
Tabel 7.22 Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 226
Tabel 8.1 Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 ---------- 229
Tabel 8.2 Ciri-ciri Korban Kekerasan Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 231
Tabel 8.3 Bentuk-bentuk Kekerasan di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin Tahun 2024 dan 2025 ---------- 231
Tabel 8.4 Persentase Korban Kekerasan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 ---------- 233
Tabel 8.5 Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani oleh Dinas P3A menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 ---------- 234

Tabel 8.6 Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Tahun 2024 dan 2025 ---------- 235
Tabel 8.7 Jumlah KDRT dan Rumah Tangga di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 -- 238
Tabel 8.8 Jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 ---------- 241
Tabel 8.9 Pasangan Usia Subur menurut Kepesertaan KB Tahun 2025 ---------- 242
Tabel 8.10 Jumlah Gepeng menurut Jenis Kelamin yang Terjaring dan Telah Dibina Dipulangkan ke Daerah Asal menurut Jenis Kelamin Tahun 2024 dan 2025 ---- 244
Tabel 8.11 Jumlah Lansia Terlantar PPKS di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 --------- 247

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kota Denpasar ---------- 18
Gambar 3.2 Peta Tata Ruang Kota Denpasar,2026 - 19
Gambar 3.3 Lambang Kota Denpasar ---------- 23
Gambar 3.4 Indeks Pembangunan Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023-2025 ---------- 38
Gambar 4.1 Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 48
Gambar 4.2 Persentase Angka Partisipasi Khusus (APK) menurut Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 52
Gambar 4.3 Jumlah Siswa PAUD pada Masing-Masing Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 58
Gambar 4.4 Jumlah Siswa PAUD menurut Jenis Kelamin Masing-masing Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 59
Gambar 4.5 Jumlah Siswa SD pada Masing-masing Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 62
Gambar 4.6 Jumlah Siswa SD menurut Jenis Kelamin dan Kecamatandi Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 63
Gambar 4.7 Jumlah Siswa SMP menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 67

Gambar 4.8 Jumlah Siswa SMP menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 68
Gambar 4.9 Jumlah Siswa SMA/MA/SMK menurut Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2025---------- 71
Gambar 4.10 Jumlah Siswa SMA/MA/SMK menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 72
Gambar 4.11 Persentase Kepala Sekolah SD berdasarkan Jenis Kelamin (2025) ------ 86
Gambar 4.12 Persentase Kepala Sekolah SMP berdasarkan Jenis Kelamin (2025) ------ 88
Gambar 4.13 Persentase Guru SD yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025 ---------- 94
Gambar 5.1 Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024---------- 100
Gambar 5.2 Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2025---------- 100
Gambar 5.3 Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024---------- 105
Gambar 5.4 Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2025---------- 106
Gambar 5.5 ASI Eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2024 dan 2025---------- 110

Gambar 5.6 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024 dan 2025---------- 113
Gambar 5.7 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2024 dan 2025---------- 114
Gambar 5.8 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2024 dan 2025---------- 114
Gambar 5.9 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2024 dan 2025 ---------- 115
Gambar 5.10 Jumlah Dokter Umum berdasarkan Jenis Kelamin pada Masing-Masing Puskesmas Tahun 2024---------- 127
Gambar 5.11 Jumlah Dokter Umum berdasarkan Jenis Kelamin pada Masing-Masing Puskesmas Tahun 2025---------- 127
Gambar 5.12 Jumlah Dokter Umum Laki-laki & Perempuan pada Puskesmas di Kota Denpasar (2024-2025)---------- 128
Gambar 5.13 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Denpasar Tahun 2019-2025---------- 133
Gambar 8.1 Jumlah Korban Kekerasan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar (2024-2025)---------- 230
Gambar 8.2 Jumlah perempuan dan Anak Korban kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Tahun 2024 dan 2025---------- 236
Gambar 8.3 Perbandingan Jumlah KDRT dan Rumah Tangga berdasarkan Jenis KDRT di Kota Denpasar (2024-2025)--- 239



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif mensyaratkan adanya kesetaraan dan keadilan gender di berbagai aspek kehidupan. Gender sebagai konstruksi sosial memengaruhi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterima oleh perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender menjadi strategi penting dalam memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dapat memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat.

Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya di Provinsi Bali memiliki dinamika sosial yang kompleks, termasuk dalam hal kesenjangan gender. Perbedaan kondisi antara perempuan dan laki-laki masih dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Tanpa data yang akurat dan terpilah menurut jenis kelamin, kondisi tersebut sulit diidentifikasi secara komprehensif.

Dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang responsif gender, diperlukan ketersediaan data dan informasi statistik yang menggambarkan kondisi perempuan dan laki-laki secara jelas dan terukur. Data statistik gender berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, evaluasi program,

serta pemantauan capaian pembangunan yang berkeadilan.

Penyusunan Profil Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2026 merupakan salah satu upaya untuk menyediakan data terpilah gender yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan. Profil ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai situasi dan kondisi perempuan dan laki-laki di berbagai sektor pembangunan, sekaligus menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender.

Pemilahan data gender memungkinkan identifikasi yang lebih akurat terhadap kondisi perempuan dan laki-laki dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan data terpilah, analisis gender dapat dilakukan secara lebih komprehensif untuk mengetahui kesenjangan yang ada, faktor penyebabnya, serta dampaknya terhadap pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Profil Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2026 menjadi langkah strategis dalam menghimpun, mengolah, dan menyajikan data terpilah gender secara sistematis dan berkelanjutan. Profil ini tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan data, tetapi juga sebagai alat analisis untuk mendukung perumusan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Dengan tersedianya Profil Statistik Gender yang didukung oleh data terpilah yang berkualitas, diharapkan Pemerintah Kota Denpasar dan para pemangku

kepentingan dapat lebih mudah mengidentifikasi isu-isu gender, menyusun program yang tepat sasaran, serta memantau dan mengevaluasi capaian pembangunan secara lebih adil dan merata. Oleh karena itu, pemilahan data gender menjadi fondasi utama dalam penyusunan profil ini sekaligus kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender di Kota Denpasar.

Selain itu, penyusunan profil ini juga mendukung implementasi kebijakan nasional terkait pengarusutamaan gender serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan kesetaraan gender. Dengan adanya profil statistik gender yang mutakhir, diharapkan upaya pembangunan di Kota Denpasar dapat berjalan lebih efektif, adil, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan data terpilah dalam buku statistik gender adalah untuk menyajikan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin di berbagai aspek pembangunan, seperti aspek pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, publik dan aspek lainnya yang ada di Kota Denpasar. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsive gender. Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya buku data terpilah Profil Statistik Gender Kota Denpasar 2026.

1.3 Manfaat

Manfaat penyusunan Profil Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2026 adalah untuk menyediakan data dan informasi statistik yang terpilah menurut jenis kelamin secara komprehensif, akurat, dan berkelanjutan sebagai dasar dalam memahami kondisi serta kesenjangan gender di berbagai sektor pembangunan.

Selain itu, penyusunan profil ini dimaksudkan untuk mendukung ketersediaan data yang berkualitas dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender, sehingga dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Kota Denpasar dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender.

Dengan adanya Profil Statistik Gender ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai peran, kondisi, serta kontribusi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan, sehingga dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang adil, setara, dan inklusif di Kota Denpasar.

1.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang ditampilkan dalam buku ini adalah data kuantitatif yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Data yang dipublikasikan ini Sebagian besar berupa data primer yang diambil dari hasil-hasil survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) seperti Suvei Sosial Ekonomi (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan lain-lain. Selain dari BPS, data juga bersumber dari berbagai instansi terkait seperti dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dinas

Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetnsi Kota Denpasar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar, Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, Kantor PD Parkir Kota Denpasar, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Denpasar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Denpasar, Kantor Kehakiman, Kejaksaan, Polresta Kota Denpasar, dan Dinas Sosial Kota Denpasar.

1.5 Analisis Data

Profil Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2026 dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan data-data kuantitatif. Penampilan data kuantitatif ini akan menjadi lebih bermakna jika apa yang ada dibalik pemunculan data angka itu dianalisis secara mendalam. Analisis yang mendalam dilakukan dengan cara menarasikan secara lengkap atau menganalisis secara kualitatif data yang ada pada setiap tabel. Dalam analisis ini akan diberikan penafsiran-penafsiran sesuai dengan kondisi nyata dimasyarakat, namun penafsiran ini baru berupa dugaan sementara yang pada gilirannya untuk menguji kebenarannya masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

BAB II
KONSEP-KONSEP

2.1 Konstruksi Gender

Istilah gender merujuk pada perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, serta atribut yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat dan budaya. Berbeda dengan jenis kelamin (sex) yang bersifat biologis dan kodrati, gender bersifat sosial dan dapat berubah sesuai dengan waktu, tempat, dan konteks budaya (Mingkase, N., & Rohmaniyah, I.,2022; Safitri, D. N., & Ridwan, A.,2024).

Teori-teori Konstruksi Gender meliputi:

a. Teori Sosialisasi Gender

Teori ini menjelaskan bahwa perbedaan gender terbentuk melalui proses sosialisasi sejak usia dini. Individu belajar mengenai peran gender melalui keluarga, pendidikan, media, dan lingkungan sosial. Anak laki-laki dan perempuan diarahkan untuk menginternalisasi nilai dan norma tertentu yang dianggap sesuai dengan jenis kelaminnya.

b. Teori Struktural-Fungsional

Menurut perspektif ini, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai bagian dari sistem sosial yang berfungsi untuk menjaga stabilitas masyarakat. Laki-laki sering diasosiasikan dengan peran publik (produktif), sedangkan perempuan dengan peran domestik (reproduktif).

c. Teori Konflik dan Feminisme

Teori ini memandang bahwa konstruksi gender tidak netral, melainkan berkaitan dengan relasi kekuasaan. Perspektif feminisme menyoroti adanya ketimpangan dan subordinasi perempuan akibat sistem patriarki yang menguntungkan laki-laki. Oleh karena itu, konstruksi gender perlu dikaji secara kritis untuk menghapus ketidakadilan.

d. Teori Interaksionisme Simbolik

Pendekatan ini menekankan bahwa gender dibentuk melalui interaksi sosial sehari-hari. Identitas gender bukan sesuatu yang tetap, melainkan terus dinegosiasikan melalui simbol, bahasa, dan praktik sosial.

e. Teori Konstruksionisme Sosial

Teori ini menegaskan bahwa realitas gender merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui diskursus, budaya, dan institusi. Apa yang dianggap sebagai “kodrat” perempuan atau laki-laki seringkali merupakan hasil konstruksi sosial yang telah dilegitimasi secara turun-temurun.

Konstruksi gender tercermin dalam beberapa dimensi utama, antara lain:

a. Peran Gender: Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik dan publik.
b. Identitas Gender: Cara individu memandang dan mengekspresikan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan.
c. Relasi Gender: Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang seringkali mencerminkan ketimpangan kekuasaan.

d. Akses dan Kontrol: Perbedaan kesempatan dalam memperoleh sumber daya dan menentukan keputusan.

Konstruksi gender yang tidak setara dapat menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan gender, antara lain:

a. Marginalisasi: Terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi.
b. Subordinasi: Penempatan perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam pengambilan keputusan.
c. Stereotip: Pelabelan negatif terhadap peran atau sifat tertentu.
d. Kekerasan berbasis gender: Tindakan kekerasan yang terjadi akibat relasi kuasa yang tidak seimbang.
e. Beban ganda: Perempuan memikul peran domestik dan publik secara bersamaan.

Dalam konteks pembangunan, konstruksi gender memengaruhi bagaimana kebijakan dan program dirancang serta diimplementasikan. Ketidakpekaan terhadap isu gender dapat menyebabkan ketimpangan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu, pendekatan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) diperlukan untuk memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan. Salah satu instrumen penting dalam mendukung hal tersebut adalah ketersediaan data terpilah gender yang mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan.

Pemahaman terhadap konstruksi gender menjadi dasar dalam penyusunan statistik gender. Data yang tidak mempertimbangkan perbedaan peran dan pengalaman

antara laki-laki dan perempuan berpotensi menghasilkan analisis yang bias.

Dapatlah disimpulkan konstruksi gender merupakan hasil proses sosial yang membentuk peran, identitas, dan relasi antara laki-laki dan perempuan. Karena sifatnya yang dinamis dan kontekstual, konstruksi gender dapat berubah seiring perkembangan masyarakat. Namun, konstruksi yang tidak setara dapat menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap konstruksi gender sangat penting dalam mendukung pembangunan yang adil dan inklusif, termasuk dalam penyusunan Profil Statistik Gender. Dengan landasan ini, data yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu menjadi alat analisis untuk mendorong kesetaraan gender.

2.2 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui integrasi perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan. Secara konseptual, PUG diartikan sebagai proses menilai implikasi bagi perempuan dan laki-laki dari setiap kebijakan, program, dan kegiatan pada semua sektor dan tingkatan pembangunan (Nurdin, 2024; Handayani, W., 2023).

Dalam konteks kebijakan publik, PUG tidak hanya menempatkan perempuan sebagai objek pembangunan, tetapi memastikan bahwa kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi perempuan dan laki-laki menjadi bagian integral

dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan.

Landasan teoritis Pengarusutamaan Gender adalah:

a. Perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender

PUG berakar pada prinsip kesetaraan dan keadilan gender, yaitu kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan, akses, kontrol, dan manfaat yang sama dalam pembangunan. Konsep ini menekankan bahwa ketimpangan gender bukan sekadar perbedaan biologis, melainkan hasil konstruksi sosial yang dapat diubah.

b. Teori Pembangunan Berbasis Gender

Dalam teori pembangunan modern, gender menjadi variabel penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. PUG hadir sebagai pendekatan untuk mengintegrasikan analisis gender dalam kebijakan pembangunan agar hasilnya lebih inklusif dan berkelanjutan.

c. Perspektif Feminisme dan Kritik Patriarki

PUG juga dipengaruhi oleh teori feminisme yang mengkritik sistem patriarki sebagai penyebab ketimpangan gender. Budaya patriarki yang kuat dalam masyarakat menjadi tantangan utama dalam implementasi PUG karena dapat mempertahankan dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan.

Pengarusutamaan gender bertujuan untuk:

a. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;

b. Mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki;
c. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor;
d. Memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.

Sebagai strategi, PUG digunakan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan tidak bias gender dan mampu menjawab kebutuhan kedua kelompok secara proporsional.

PUG dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip utama, antara lain:

a. Integrasi: perspektif gender harus terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan;
b. Partisipasi: melibatkan perempuan dan laki-laki secara setara dalam proses pengambilan keputusan;
c. Keadilan: menjamin distribusi manfaat pembangunan secara adil;
d. Akuntabilitas: setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hal dampaknya terhadap gender.

Implementasi PUG dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Analisis gender
   Analisis untuk mengidentifikasi perbedaan kondisi, kebutuhan, dan permasalahan antara perempuan dan laki-laki.
b. Perencanaan responsif gender
   Penyusunan kebijakan dan program yang mempertimbangkan hasil analisis gender.
c. Penganggaran responsif gender

Pengalokasian anggaran yang mendukung kesetaraan gender.

d. Pelaksanaan program
   Implementasi kebijakan yang memperhatikan prinsip kesetaraan.
e. Monitoring dan evaluasi
   Penilaian terhadap capaian dan dampak kebijakan terhadap perempuan dan laki-laki.

Efektivitas PUG sangat bergantung pada integrasi analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Faktor pendukung dan penghambat PUG meliputi:

a. Faktor pendukung: komitmen politik pemerintah, ketersediaan data terpilah gender, kapasitas kelembagaan dan SDM, regulasi yang mendukung.
b. Faktor penghambat: budaya patriarki yang masih kuat, kurangnya pemahaman tentang gender, keterbatasan data gender, lemahnya koordinasi antar lembaga.

Hambatan kelembagaan dan kurangnya integrasi kebijakan menjadi salah satu penyebab belum optimalnya implementasi PUG di berbagai daerah.

Pengarusutamaan gender tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan data yang memadai. Data terpilah menurut jenis kelamin menjadi instrumen utama dalam:

a. Mengidentifikasi kesenjangan gender;
b. Menyusun kebijakan berbasis bukti;
c. Memantau dan mengevaluasi capaian pembangunan;
d. Mengukur dampak kebijakan terhadap perempuan dan laki-laki.

Dengan demikian, statistik gender merupakan bagian integral dari implementasi PUG. Tanpa data yang akurat

dan terpilah, kebijakan yang dihasilkan berpotensi bias dan tidak tepat sasaran.

Dapatlah disimpulkan bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang menempatkan perspektif gender sebagai bagian integral dalam seluruh proses kebijakan. Dengan mengintegrasikan analisis gender, PUG mampu mendorong terciptanya pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Namun demikian, implementasi PUG masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek budaya, kelembagaan, maupun ketersediaan data. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat, dukungan data statistik gender, serta peningkatan kapasitas kelembagaan agar PUG dapat berjalan secara optimal.

2.3 Statistik Gender

Statistik gender adalah statistik yang secara khusus dirancang untuk menggambarkan perbedaan kondisi, peran, dan pengalaman antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Statistik ini tidak hanya menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin, tetapi juga menyoroti adanya kesenjangan dan ketidaksetaraan gender.

Menurut definisi United Nations, statistik gender merupakan statistik yang mencerminkan perbedaan dan ketidaksetaraan yang signifikan antara perempuan dan laki-laki dalam seluruh aspek kehidupan.

Dalam konteks Indonesia, statistik gender merupakan hasil pengolahan dan analisis lebih lanjut dari data terpilah menurut jenis kelamin yang digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu gender dalam pembangunan.

Konsep Dasar Statistik Gender meliputi:

a. Gender dan jenis kelamin

Gender merupakan konstruksi sosial yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan tanggung jawab yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, sedangkan jenis kelamin (sex) bersifat biologis.

b. Data Terpilah Gender

Data terpilah menurut jenis kelamin merupakan dasar utama dalam statistik gender. Namun, tidak semua data terpilah otomatis menjadi statistik gender. Data tersebut harus dianalisis untuk mengungkap adanya kesenjangan atau ketidakadilan gender.

c. Isu Gender

Isu gender muncul akibat adanya ketidakadilan yang dialami oleh salah satu jenis kelamin akibat konstruksi sosial, seperti diskriminasi, marginalisasi, atau subordinasi.

Statistik gender memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

a. Mengidentifikasi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki;
b. Menyediakan dasar data untuk perumusan kebijakan yang responsif gender;
c. Mengukur kemajuan pembangunan dalam mencapai kesetaraan gender;
d. Mendukung evaluasi kebijakan dan program pembangunan.

Dengan demikian, statistik gender berfungsi sebagai alat penting dalam mendukung pembangunan yang adil dan inklusif.

Statistik gender memiliki peran strategis dalam pembangunan, antara lain:

a. Dasar perencanaan kebijakan
   Data gender membantu pemerintah merancang kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis bukti (evidence-based policy).
b. Alat analisis kesenjangan
   Statistik gender memungkinkan identifikasi perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki.
c. Monitoring dan evaluasi
   Digunakan untuk menilai efektivitas program pembangunan dan pencapaian kesetaraan gender.
d. Mendukung pengarusutamaan gender (PUG)
   Statistik gender menjadi instrumen utama dalam implementasi PUG.

Statistik gender umumnya mencakup berbagai sektor pembangunan, seperti:

a. Kependudukan (rasio jenis kelamin, struktur umur)
b. Pendidikan (angka partisipasi sekolah, tingkat melek huruf)
c. Kesehatan (angka harapan hidup, kesehatan reproduksi)
d. Ketenagakerjaan (TPAK, pengangguran, upah)
e. Ekonomi (akses terhadap sumber daya ekonomi)
f. Politik dan pengambilan keputusan

Secara global, berbagai indikator dan indeks telah dikembangkan untuk mengukur kesetaraan gender, seperti Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measure (GEM).

Dalam konteks penyusunan Profil Statistik Gender, statistik gender menjadi:

a. Sumber utama informasi untuk menggambarkan kondisi perempuan dan laki-laki;
b. Dasar analisis kesenjangan gender di daerah;
c. Alat advokasi kebijakan untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif;
d. Instrumen monitoring pembangunan daerah yang responsif gender.

Tanpa statistik gender yang memadai, kebijakan pembangunan berisiko tidak mampu menjawab kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki. Dalam konteks pembangunan daerah, termasuk penyusunan Profil Statistik Gender Kota Denpasar, statistik gender menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan yang adil, setara, dan berbasis bukti. Oleh karena itu, penguatan sistem statistik gender menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan kesetaraan gender.

BAB III
GAMBARAN UMUM
KOTA DENPASAR

3.1 Kondisi Geografis dan Topografis

Kota Denpasar merupakan daerah atau salah satu kota yang terletak di tengah– tengah Pulau Bali, yang juga merupakan Ibukota dari Provinsi Bali sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan perekonomian. Letak yang sangat strategis ini sangatlah menguntungkan baik dari segi ekonomis maupun dari kepariwisataan karena merupakan titik sentral atau pusat dari berbagai kegiatan sekaligus sebagai penghubung dengan kabupaten lainnya. Kota Denpasar memiliki luas wilayah seluas 125,98 km^2 (BPS Kota Denpasar, 2026). Kota Denpasar terdiri atas 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Denpasar Timur dan Kecamatan Denpasar Barat. Kondisi geografis ini dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 3.1 Peta Kota Denpasar

Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali yang terletak di bagian selatan Pulau Bali. Secara astronomis berada pada:

- Lintang Selatan: 8°35’31” – 8°44’49” LS
- Bujur Timur: 115°10’23” – 115°16’27” BT

Posisi ini menempatkan Denpasar:

- Dekat dengan garis khatulistiwa (zona tropis)
- Berada di jalur strategis penghubung antar wilayah di Bali
- Berdekatan dengan kawasan pesisir dan teluk

Secara regional, Denpasar terletak di bagian selatan Pulau Bali. Berhadapan dengan Samudra Hindia di bagian selatan, berdekatan dengan kawasan penting seperti: Kabupaten Badung (barat & utara) dan Kabupaten Gianyar (timur). Selain itu, kota ini memiliki hubungan erat dengan wilayah pesisir seperti Teluk Benoa, serta menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di Bali.

Luas wilayah Kota Denpasar adalah ± 125,69 km². Penggunaan lahan untuk sawah seluas 1.658 ha dan lahan kering/permukiman seluas 6.919 ha. Kondisi menunjukkan dominasi lahan terbangun dan urbanisasi tinggi.



Gambar 3.2 Peta Tata Ruang Kota Denpasar, 2026

Denpasar memiliki unsur geografis penting berupa: (a) sungai utama yaitu Sungai Badung, membelah kota

dari utara ke selatan, bermuara ke Teluk Benoa; (b) wilayah pesisir (Sanur dan sekitarnya); dan (c) area teluk dan laguna pesisir.

Denpasar beriklim tropis sabana (Aw – Köppen) dan dipengaruhi oleh angin monsun Australia. Topografi Denpasar relatif rendah, 59,1% wilayah berada pada 0–25 meter dpl, sisanya hingga ± 75 meter dpl. Kondisi ini menunjukkan bahwa Denpasar merupakan dataran rendah pantai dan rentan terhadap genangan air dan banjir. Struktur geologi Denpasar didominasi batuan vulkanik Kuarter (~70%). Material berasal dari aktivitas gunung api Bali (Batur, Buyan-Bratan). Endapan aluvial di daerah pantai (pasir, kerikil, lempung)

3.2 Sekilas Sejarah Berdirinya Kota Denpasar

Ditinjau dari segi historisnya, Kota Denpasar mempunyai riwayat yang relatif panjang yang pada akhirnya menjadi Ibu Kota Provinsi Bali. Asal usul kata denpasar berasal dari dua suku kata, yaitu den dan pasar. Kata den berarti utara dan kata pasar berarti pasar atau peken. Sesuai dengan asal-usul katanya, denpasar berarti di utara pasar yang sekaligus juga menunjukkan lokasi puri yang saat itu menjadi pusat orientasi penduduk berada di sebelah utara pasar (Salain dalam Wiasti, 2010; 52).

Ditinjau dari segi ruang (*space*), pada awalnya Kota Denpasar menjadi pusat Kerajaan Badung, yang pada mulanya merupakan sebuah taman. Taman ini disebut-sebut bukanlah sekadar taman karena taman ini merupakan kesayangan Raja Badung Kyai Jambe Ksatrya yang beristana di Puri Jambe Ksatrya di Pasar Satria

sampai ke utara, yang sampai sekarang pasar ini masih tetap ajeg. Selain itu, taman ini dilengkapi pula dengan tempat peraduan yang diperuntukkan khusus bagi tamu-tamu yang datang dari luar Badung. Taman itu terletak di sebelah utara pasar, tepatnya di rumah jabatan Gubernur Bali, sekarang bernama Jaya Sabha. Awalnya pasar terletak di lapangan Puputan Badung sekarang, tapi pada zaman Belanda pasar itu dipindah ke dekat Tukad Badung sehingga dikenal sebagai Pasar Badung. Oleh karena itu, Kota Denpasar merupakan perkembangan dari wilayah kerajaan yang saat itu Puri Denpasar menjadi pusat pemerintahannya.

Pada tahun 1779 terjadi konflik antara Kyai Jambe Ksatrya dengan I Gusti Ngurah Rai. Padahal, I Gusti Ngurah Rai tak lain orang kepercayaan Kyai Jambe Ksatrya, terutama dalam hal permainan aduan ayam. Konflik ini berujung pada terbunuhnya Kyai Jambe Ksatrya. Pasca terbunuhnya Kyai Jambe Ksatrya, kekuasaan dilimpahkan kepada I Gusti Ngurah Made Pemecutan. Pelimpahan kekuasaan kepada I Gusti Ngurah Made Pemecutan menandai berakhirnya kekuasaan Puri Jambe Ksatrya. Pasalnya, I Gusti Ngurah Made Pemecutan mendirikan istana baru di Taman Denpasar. Istana baru itulah dinamai Puri Denpasar dan di-pelaspas pada tahun 1788. I Gusti Ngurah Made Pemecutan pun dinobatkan sebagai Raja Denpasar I. Tahun 1788 inilah sebagai tonggak kelahiran Kota Denpasar (Sujaya: http://www.balebengong.net).

Dalam perkembangan selanjutnya wilayah Kota Denpasar dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, dan selanjutnya pada tahun 1958 Kota Denpasar dijadikan pusat pemerintahan

Provinsi Bali sekaligus menjadi ibu kota. Pada awalnya Kota Denpasar dijadikan sebagai kota Administratif dengan fokus orientasi pada urusan administrasi pemerintahan. Selanjutnya, dengan dijadikannya sebagai pusat pemerintahan Daerah Tingkat II Badung dan sebagai Ibu Kota Provinsi Bali, maka tidak bisa dipungkiri menjadi pusat orientasi berbagai aspek kehidupan dari berbagai penjuru wilayah pemerintahan sehingga secara pasti mengalami perkembangan yang sangat cepat, baik di bidang fisik, ekonomi, sosial dan budaya maupun demografinya.

Selain sebagai pusat pemerintahan, secara otomatis Kota Denpasar juga menjadi pusat perdagangan, pusat pendidikan dan pusat pariwisata yang pada awalnya secara keseluruhan wilayahnya di bagi menjadi tiga kecamatan, yakni Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan. Melihat perkembangan kota administratif ini dari berbagai sektor begitu pesat, maka tidak mungkin ditangani oleh pemerintahan sebatas pemerintahan yang berstatus kota administratif. Oleh karena itu, selanjutnya sesuai dengan perkembangan kota serta berbagai pertimbangan antara Provinsi Bali dan Kabupaten Badung sepakat untuk meningkatkan status Kota Administratif Denpasar menjadi Kota Denpasar. Akhirnya pada tanggal 15 Januari 1992 berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kota Denpasar lahir dan telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Februari 1992. Setelah Kota Denpasar dirubah statusnya, yaitu dari Kota Administratif menjadi Kota Denpasar berarti juga merupakan babak baru bagi penyelenggaraan pemerintahan kota.

3.3 Lambang Kota Denpasar dan Penjelasannya

Masing-masing kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali telah memiliki lambang tersendiri. Lambang Kota Denpasar berbentuk segi lima sama sisi sebagai berikut.



Gambar 3.3 Lambang Kota Denpasar

Warna dasar segi lima sama sisi pada lambang Kota Denpasar, yaitu berwarna biru laut, sedangkan garis pinggirnya berwarna hitam. Pita berwarna putih pada bagian bawahnya tertulis motto “PURADHIPA BHARA BHAVANA”, yang mengandung arti, yaitu “kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kemakmuran rakyat”. Di dalam segi lima sama sisi tersebut, terdapat pula lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur lambang Kota Denpasar. Arti dari lambang Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Segi lima sama sisi

a) Dasarnya berbentuk segi lima sama sisi berarti bahwa dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.
b) Warna dasar biru laut melambangkan keagungan.
c) Garis pinggir berwarna putih melambangkan kesucian/budi luhur, dan warna hitam melambangkan kekuatan.

2. Padmasana Jagatnatha

a) Melambangkan alam semesta tempat suci untuk pemujaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
b) Jagatnatha dapat pula diartikan sebagai tempat pemerintahan atau penguasa. Jadi Jagatnatha dalam hal ini diartikan sebagai Denpasar merupakan pusat pemerintahan.
c) Warna kuning emas pada Pura Jagadnatha melambangkan tempat suci untuk pemujaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

3. Keris

a) Melambangkan jiwa/melintas keperwiraan yang lazim disebut jiwa keperwiraan.
b) Keris juga melambangkan bahwa Kota Denpasar sebagai kota perjuangan.
c) Warna hitam dalam keris melambangkan ketegasan.

4. Candi Bentar

a) Melambangkan kebudayaan, yakni Kota Denpasar memiliki kebudayaan yang bersifat khas.

b) Candi bentar juga diartikan sebagai pintu gerbangnya Provinsi Bali.

5. Tangga yang berjumlah tiga buah
Melambangkan bahwa konsep pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Denpasar selalu berlandaskan konsep *TRI KAYA PARISUDHA.*

6. Lingkaran bunga teratai yang jumlahnya 8 (delapan) helai melambangkan asta dala atau asta beratha.

7. Padi Kapas serta rantai (gelang) 2 (dua) melambangkan:
a) Padi yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah melambangkan tanggal 27.
b) Rantai (gelang) berjumlah dua buah melambangkan bulan dua (Februari).
c) Kapas dengan bunga berjumlah 9 (Sembilan) buah dan daun dua helai melambangkan tahun 92. Dengan demikian, padi, kapas, serta rantai sebagai pengikat padi kapas melambangkan bahwa Kota Denpasar lahir pada tanggal 27 Februari 1992.

3.4 Visi dan Misi

Kota Denpasar yang dipimpin oleh Walikota sebagai pucuk pimpinan didalam melaksanakan roda pemerintahan merumuskan program-program pembangunan dan kebijakan-kebijakannya. Penyusunan program-program dan kebijakan-kebijakan tersebut dijabarkan dengan mengacu kepada visi dan misi yang disampaikan oleh pasangan calon yang terpilih menjadi Walikota (Walikota dan Wakilnya). Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, visi dan misi

ini mengarahkan pembangunan Kota Denpasar sebagai berikut.

3.4.1 Visi

Rumusan visi Kota Denpasar adalah “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”. Konsep kota kreatif menitikberatkan pada Denpasar Kota Hidup, dimana kota hidup memberikan kesadaran dinamis terhadap sumber daya alam untuk menggugah inovasi, sumberdaya manusia untuk menggugah dinamika kultur dan sumber daya spiritual yang dapat menggugah kreasi aparatur. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreatifitas, baik penciptaan, pelestarian maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban dan keseimbangan sosial. Berbasis budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini, Denpasar menjadi kota makmur, aman, jujur, dan unggul.

3.4.2 Misi

Relevan dengan rumusan visi tersebut di atas maka dirumuskan misi Kota Denpasar sebagai berikut.

a) Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
b) Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana.

c) Kejujuran dan spirit Sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).
d) Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
e) Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

3.5 Sistem Pemerintahan

Terdapat 4 kecamatan di Kota Denpasar, yaitu: (1) Kecamatan Denpasar Selatan, (2) Kecamatan Denpasar Timur, (3) Kecamatan Denpasar Barat, dan (4) Kecamatan Denpasar Utara. Masing-masing kecamatan tersebut dipimpin oleh satu orang sebagai pucuk pimpinan yang bernama camat.

Secara fungsional dan struktural di masing-masing camat terbagi menjadi beberapa desa dinas/kelurahan, dan desa adat. Pucuk pimpinan di level desa dinas bernama perbekel atau kepala desa, sedangkan di level kelurahan bernama lurah dan di level desa adat bernama bendesa. Selanjutnya, di level desa secara fungsional dan struktural dibagi lagi menjadi banjar dinas dan banjar adat.

Dalam konteks ini, di Bali pada umumnya dan di Kota Denpasar khususnya di level pemerintahan di tingkat desa dan banjar telah terjadi pemisahan penanganan di bidang kedinasan dan bidang adat. Demikian pula, di level banjar, ada disebut banjar adat dan banjar dinas. Walaupun demikian, dalam menjalani kewajiban sehari-hari antara desa dinas dan desa adat serta antara banjar dinas dan banjar adat bersinergi, baik secara intern

maupun ekstern. Jumlah desa/kelurahan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Denpasar tidak mengalami perubahan dari tahun 2020-2024, yaitu sebanyak 43 desa/kelurahan dan data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan, 2021-2025

Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
Denpasar Selatan	10	10	10	10	10
Denpasar Timur	11	11	11	11	11
Denpasar Utara	11	11	11	11	11
Denpasar Barat	11	11	11	11	11
Denpasar	43	43	43	43	43

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2025

3.6 Kondisi Demografi

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2025 membawa berbagai dampak signifikan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kota. Berikut adalah beberapa dampak utama yang telah teridentifikasi:

1. Pencemaran lingkungan

   Pertumbuhan penduduk yang pesat, terutama dari migrasi dengan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, telah berkontribusi pada peningkatan pencemaran lingkungan. Perilaku seperti pembuangan limbah sembarangan menjadi salah satu penyebab utama. Data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Denpasar menunjukkan bahwa volume sampah yang harus ditangani mencapai 1.500 m^3 per hari.

2. Alih fungsi lahan
   Meningkatnya kebutuhan akan pemukiman dan fasilitas lainnya akibat pertumbuhan penduduk menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi area terbangun. Hal ini mengancam keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan di Denpasar.
3. Kemacetan lalu lintas
   Bertambahnya jumlah penduduk berimplikasi pada peningkatan jumlah kendaraan di jalan raya, yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Masalah ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kenyamanan dan efisiensi mobilitas warga.
4. Pengelolaan sampah
   Dengan meningkatnya jumlah penduduk, volume sampah yang dihasilkan juga meningkat. Hal ini menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
5. Tantangan sosial dan ekonomi
   Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menimbulkan berbagai tantangan sosial dan ekonomi, seperti peningkatan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Pemerintah daerah perlu merancang kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Ditinjau dari jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di tahun 2025, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki paling banyak berada di kelompok umur 25-29 tahun (30.570 jiwa), sedangkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan paling banyak berada di kelompok umur 45-49 tahun (30.070

jiwa). Data pada Tabel 3.2 menunjukkan penduduk di Kota Denpasar mayoritas berada pada kategori produktif. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Denpasar pada tahun 2025 jika ditinjau dari jenis kelaminnya tidak menunjukkan perbedaan jumlah yang mencolok. Namun, dari perspektif gender, jumlahnya penduduk Kota Denpasar didominasi oleh jenis kelamin laki-laki.

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025

No	Pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Tidak/belum sekolah	69.697	67.222	136.919
2	Belum tamat SD/ Sederajat	33.562	33.985	67.547
3	Tamat SD/Sederajat	29.667	41.575	71.242
4	SLTP/Sederajat	32.530	36.533	69.063
5	SLTA/Sederajat	108.436	99.235	207.671
6	Diploma I/II	9.221	6.826	16.047
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	8.397	10.048	18.445
8	Diploma IV/Strata I	41.190	41.865	83.055
9	Strata II	5.401	4.338	9.739
10	Strata III	658	314	972
	Total	338.759	341.941	680.700

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2025

3.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) adalah indikator yang mengukur persentase perempuan yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun sebagai pencari kerja, dibandingkan dengan jumlah total perempuan dalam kelompok usia angkatan kerja (biasanya 15 tahun ke atas) (World Bank, 2021). TPAK Perempuan dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{TPAKP} = \frac{\text{Jumlah perempuan dalam angkatan kerja}}{\text{Jumlah total perempuan usia kerja}} \times 100\%$$

Angkatan kerja terdiri atas:

- Pekerja (*employed*): perempuan yang bekerja, baik penuh waktu maupun paruh waktu.
- Pencari kerja (unemployed): perempuan yang sedang mencari pekerjaan dan siap bekerja.

Bukan angkatan kerja mencakup perempuan yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan, seperti ibu rumah tangga penuh waktu, pelajar, dan penyandang disabilitas yang tidak dapat bekerja.

TPAKP dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik struktural maupun sosial-ekonomi:

a. Faktor Ekonomi

   Ketika ekonomi tumbuh, permintaan tenaga kerja meningkat, yang dapat mendorong lebih banyak perempuan untuk bekerja. Negara dengan sektor jasa yang lebih besar cenderung memiliki TPAKP lebih tinggi karena lebih banyak pekerjaan yang cocok untuk perempuan.

b. Faktor Sosial dan Budaya

Di beberapa negara, peran tradisional perempuan sebagai ibu rumah tangga membatasi partisipasi mereka dalam angkatan kerja. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan peluang perempuan mendapatkan pekerjaan.

c. Faktor Kebijakan dan Regulasi

Regulasi yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja (seperti cuti melahirkan, fleksibilitas kerja) dapat meningkatkan TPAKP. Ketersediaan penitipan anak dan sistem transportasi publik yang baik dapat mempermudah perempuan untuk bekerja.

TPAKP (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan) lebih rendah di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Angka sekitar 53–55% dibandingkan laki-laki yang mendekati 80% mencerminkan kombinasi faktor sosial, ekonomi, dan struktural.

Di banyak negara berkembang, norma tradisional masih kuat. Perempuan sering dipandang memiliki peran utama di ranah domestik (mengurus rumah, anak, dan keluarga). Akibatnya banyak perempuan tidak masuk pasar kerja formal dan ada tekanan sosial untuk berhenti bekerja setelah menikah atau punya anak. Perempuan yang bekerja sering tetap memikul tanggung jawab rumah tangga penuh. Tanpa dukungan (seperti penitipan anak atau pembagian peran), banyak yang akhirnya memilih tidak bekerja atau bekerja di sektor informal dengan jam fleksibel. Tidak semua pekerjaan ramah bagi perempuan, misalnya minimnya fasilitas cuti melahirkan atau fleksibilitas kerja, diskriminasi dalam rekrutmen atau

promosi dan kurangnya keamanan kerja di beberapa sektor. Negara berkembang cenderung memiliki sektor informal yang besar. Banyak perempuan bekerja di sektor ini, tetapi tidak selalu tercatat sebagai “angkatan kerja aktif” dan pendapatannya tidak stabil.

Meningkatkan TPAK perempuan bukan sekadar “mengajak perempuan bekerja”, tapi mengubah ekosistem agar mereka bisa dan mau masuk serta bertahan di pasar kerja. Di Indonesia, beberapa strategi kunci yang terbukti efektif adalah:

1. Penyediaan layanan penitipan anak (*childcare*)
   Akses ke daycare yang terjangkau dan berkualitas sangat krusial. Banyak perempuan keluar dari pekerjaan setelah punya anak karena tidak ada dukungan ini
2. Kebijakan kerja fleksibel
   Fleksibilitas membantu perempuan menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga.
   Contoh: Work from home / hybrid, jam kerja fleksibel, paruh waktu dengan perlindungan hak yang jelas.
3. Peningkatan pendidikan dan keterampilan
   Investasi pada perempuan melalui pelatihan vokasi, digital skills (teknologi, bisnis online), dan akses pendidikan tinggi. Ini membantu perempuan masuk ke sektor formal dengan upah lebih baik.
4. Mendorong pekerjaan formal dan layak
   Perempuan sering terjebak di sektor informal. Maka diperlukan formalisasi UMKM,
   perlindungan pekerja (jaminan sosial, upah minimum), dan akses pembiayaan untuk wirausaha perempuan.

5. Mengatasi diskriminasi di tempat kerja
   Langkah konkret yang dapat dilakukan seperti regulasi anti-diskriminasi, transparansi gaji, kesempatan promosi yang setara dapat menumbuhkan budaya kerja inklusif yang akhirnya membuat perempuan lebih bertahan.
6. Perubahan norma sosial
   Perubahan ini dapat dilakukan melalui kampanye publik tentang kesetaraan gender, edukasi sejak dini, atau melalui representasi perempuan di kepemimpinan.
   Ketika masyarakat menerima perempuan bekerja, partisipasi naik secara alami.

TPAK Kota Denpasar pada tahun 2025 sebesar 80,08 untuk laki-laki dan 61,74 untuk perempuan. Nilai ini masih dibawah Provinsi Bali yaitu 83,84 untuk laki-laki dan 70,84 untuk perempuan (BPS, 2026). Dari 100 laki-laki usia kerja di Kota Denpasar, sekitar 80 orang termasuk angkatan kerja. Dari 100 perempuan usia kerja di Kota Denpasar, sekitar 62 orang termasuk angkatan kerja. Data tersebut juga menunjukkan keterlibatan masyarakat usia kerja di Denpasar baik laki-laki dan perempuan dalam aktivitas ekonomi masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Bali.

3.8 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia dengan menempatkan manusia sebagai pusat dari proses pembangunan. Dalam kerangka Indeks Pembangunan Manusia, pembangunan tidak hanya dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh

mana masyarakat dapat menikmati kehidupan yang panjang, sehat, berpendidikan, dan memiliki standar hidup yang layak. Oleh karena itu, IPM menjadi alat ukur yang lebih komprehensif dalam menilai kualitas hidup dibandingkan indikator ekonomi konvensional seperti Produk Domestik Bruto (PDB).

IPM dibangun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dimensi kesehatan diukur melalui umur harapan hidup saat lahir, yang mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dan hidup dalam lingkungan yang mendukung. Dimensi pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, yang menggambarkan akses terhadap pengetahuan dan pengembangan kapasitas manusia. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur melalui pengeluaran atau pendapatan per kapita yang menunjukkan kemampuan ekonomi individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga dimensi ini secara bersama-sama memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kesejahteraan manusia (UNDP, 2023).

Dalam perspektif gender, IPM memiliki peran strategis untuk menilai sejauh mana hasil pembangunan dinikmati secara setara oleh laki-laki dan perempuan. Profil gender suatu wilayah tidak hanya dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga dari akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diperoleh dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini, IPM dapat menjadi indikator awal untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan gender, khususnya dalam hal akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Pada dimensi kesehatan, misalnya, umur harapan hidup dapat mencerminkan kualitas hidup perempuan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, gizi, dan lingkungan yang aman. Perempuan yang memiliki akses kesehatan yang baik cenderung memiliki umur harapan hidup yang lebih tinggi. Namun demikian, tingginya umur harapan hidup tidak selalu menunjukkan bahwa perempuan telah sepenuhnya berdaya, karena indikator ini tidak mengukur aspek pengambilan keputusan atau kontrol atas sumber daya. Dalam dimensi pendidikan, peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap pemberdayaan, seperti meningkatnya partisipasi dalam angkatan kerja, kemampuan mengambil keputusan, serta kesadaran terhadap hak-hak sosial. Sementara itu, pada dimensi ekonomi, IPM dapat menunjukkan kemampuan perempuan dalam mengakses sumber pendapatan, meskipun dalam praktiknya perempuan sering kali masih terkonsentrasi di sektor informal dengan tingkat upah yang relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki (UNDP, 2023).

Hubungan antara IPM dan profil gender juga dapat dilihat melalui keterkaitannya dengan indikator lain, seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPM yang tinggi umumnya berkorelasi dengan peningkatan kualitas hidup perempuan, namun tidak secara otomatis menjamin kesetaraan gender. Dalam banyak kasus, suatu wilayah dapat memiliki IPM yang tinggi, tetapi masih menunjukkan kesenjangan gender yang signifikan, terutama dalam hal partisipasi ekonomi dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa IPM lebih berfokus pada aspek kesejahteraan dasar,

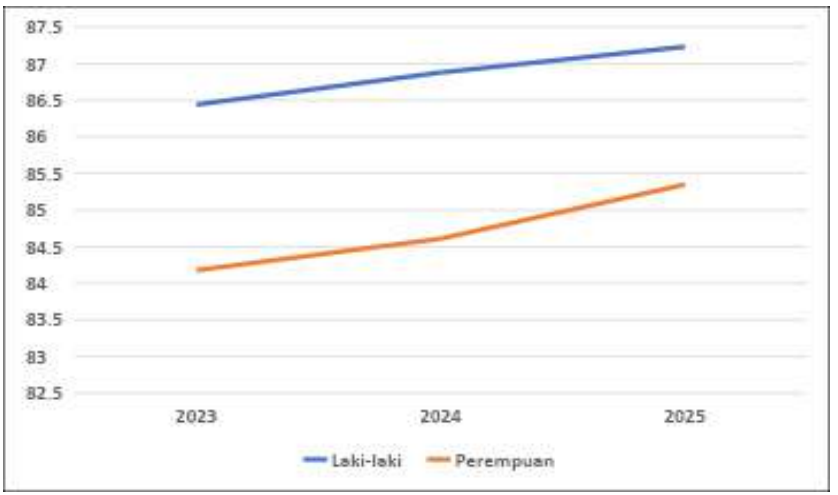
sementara indikator gender lainnya diperlukan untuk mengukur dimensi kekuasaan dan pemberdayaan secara lebih spesifik (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2021).

Meskipun IPM memiliki keunggulan sebagai indikator komprehensif, terdapat beberapa keterbatasan dalam penggunaannya untuk analisis gender. IPM tidak secara langsung mengukur aspek-aspek seperti diskriminasi, norma sosial, atau ketimpangan dalam pembagian peran domestik. Selain itu, IPM juga tidak membedakan secara rinci kondisi antara laki-laki dan perempuan, sehingga analisis yang lebih mendalam memerlukan data terpilah menurut jenis kelamin. Oleh karena itu, penggunaan IPM dalam kajian gender sebaiknya dikombinasikan dengan indikator lain agar dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi pemberdayaan perempuan.

Dapat disimpulkan bahwa IPM merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas hidup masyarakat melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dalam kaitannya dengan profil gender, IPM berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi sejauh mana perempuan memperoleh akses terhadap hasil pembangunan. Namun, karena keterbatasannya dalam mengukur aspek pemberdayaan dan kesetaraan secara langsung, IPM perlu dipadukan dengan indikator gender lainnya. Dengan demikian, analisis yang komprehensif mengenai pembangunan manusia dan gender dapat dilakukan untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

IPM Kota Denpasar pada tahun 2025 mencapai 85,63, menjadikannya yang tertinggi di Provinsi Bali. Angka ini masuk dalam kategori “sangat tinggi” dan

mencatat peningkatan sebesar 0,61% dibandingkan tahun 2024. Capaian ini melampaui rata-rata IPM Provinsi Bali 2025 yang berada di angka 79,37. Ketika IPM Kota Denpasar mencapai 85,63, itu berarti masyarakatnya rata-rata lebih sehat, lebih lama bersekolah dan lebih berpendidikan, serta memiliki daya beli/ekonomi yang lebih tinggi dibanding banyak daerah lain. Berdasarkan jenis kelamin, IPM laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan dari tahun 2023-2025 dimana laki-laki masih menduduki posisi lebih tinggi. IPM laki-laki pada tahun 2025 sebesar 87,23 dan IPM perempuan sebesar 85,35. Kondisi ini menunjukkan Denpasar sudah maju untuk semua gender, tetapi kesetaraan belum sepenuhnya tercapai, meskipun gap-nya relatif kecil.



Gambar 3.4 Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023-2025

3.9 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Musyarofah dan Istiandari (2025) memaparkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk melihat kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah. IPG pada dasarnya membandingkan capaian pembangunan manusia perempuan terhadap laki-laki. IPG merupakan pengembangan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang memperhatikan dimensi gender. Jika IPM mengukur kualitas hidup manusia secara umum, maka IPG mengukur apakah kualitas hidup perempuan sudah setara dengan laki-laki.

Tiga dimensi dasar yang digunakan sama seperti IPM, yaitu:

1. Kesehatan, diukur melalui umur harapan hidup.
2. Pendidikan, diukur melalui Harapan lama sekolah (HLS), Rata-rata lama sekolah (RLS).
3. Standar hidup layak/ekonomi, diukur melalui pendapatan atau pengeluaran yang disesuaikan.

Perbedaannya adalah pada IPG semua komponen tersebut dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, lalu dibandingkan.

IPG digunakan untuk:

1. Mengukur tingkat kesetaraan gender dalam pembangunan manusia.
2. Mengetahui apakah perempuan memperoleh akses pembangunan yang setara dengan laki-laki.
3. Menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan yang responsif gender
4. Memantau kemajuan pemberdayaan perempuan dari waktu ke waktu.

Dengan kata lain, IPG membantu menjawab pertanyaan: “Apakah perempuan menikmati hasil pembangunan pada tingkat yang sama dengan laki-laki?”

IPG penting karena pertumbuhan pembangunan tidak selalu berarti semua kelompok memperoleh manfaat yang sama. Misalnya: suatu daerah memiliki IPM tinggi, tetapi perempuan lebih sedikit bekerja, pendapatan lebih rendah, dan pendidikan tertinggal. IPM daerah bisa tetap tinggi, namun IPG menunjukkan masih ada ketimpangan gender.

Beberapa faktor yang dapat membuat IPG rendah:

1. Pendidikan, seperti: putus sekolah perempuan,akses pendidikan terbatas, perkawinan usia dini.
2. Ekonomi, seperti: rendahnya partisipasi kerja perempuan (TPAK), kesenjangan upah, pekerjaan informal.
3. Sosial budaya, norma gender tradisional, dan pembagian kerja domestik yang tidak seimbang.
4. Kesehatan, seperti: akses layanan kesehatan ibu dan reproduksi, gizi dan kesehatan perempuan.

IPG Kota Denpasar (Umur Harapan Hidup hasil Long Form SP2020) pada tahun 2025 sebesar 97,84 lebih tinggi dibandingkan IPG Provinsi Bali 95,82. Nilai 97,84 dapat diartikan bahwa capaian pembangunan manusia perempuan di Kota Denpasar telah mencapai sekitar 97,84% dari capaian laki-laki.Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Kota Denpasar lebih kecil dibandingkan Provinsi Bali secara keseluruhan. Karena angka IPG Kota Denpasar lebih tinggi dan lebih mendekati 100, maka artinya pembangunan manusia perempuan di Kota Denpasar relatif lebih setara dengan laki-laki

dibandingkan kondisi rata-rata di Provinsi Bali. Perempuan di Denpasar memiliki akses yang lebih baik terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dibanding rata-rata laki-laki di Bali atau kesetaraan gender dalam pembangunan manusia di Kota Denpasar sudah cukup baik,

3.10 Indeks Ketimpangan Gender

BPS Indonesia (2016) menjelaskan secara rinci terkait dengan Indeks Ketimpangan Gender dalam penelitian "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Ketimpangan Gender di Indonesia." Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek penting kehidupan manusia. Dalam konteks internasional, indikator ini dikenal sebagai Gender Inequality Index (GII) yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme.

IKG berbeda dengan IPG. Jika IPG mengukur perbandingan capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan, maka IKG mengukur kerugian pembangunan akibat adanya ketimpangan gender. Semakin tinggi ketimpangan gender, semakin besar potensi pembangunan yang hilang.

IKG menunjukkan sejauh mana perempuan mengalami ketertinggalan dibanding laki-laki dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, partisipasi pasar kerja. IKG menyoroti bahwa pembangunan tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal kesempatan, akses, kekuasaan, dan hak

yang setara antara laki-laki dan perempuan. IKG digunakan untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan gender, mengetahui kerugian pembangunan akibat diskriminasi gender, menjadi dasar kebijakan kesetaraan gender, mengevaluasi pemberdayaan perempuan, dan membandingkan kondisi gender antarwilayah atau antarnegara. Semakin kecil angka IKG maka semakin baik kesetaraan gender. Semakin besar angka IKG maka semakin besar ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Perbedaan antara IKG dengan IPG dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 3.3 Perbedaan IKG dengan IPG

Aspek	IPG	IKG
Fokus	Perbandingan pembangunan manusia	Ketimpangan dan kerugian akibat gender
Nilai ideal	Mendekati 100	Mendekati 0
Semakin tinggi	Semakin baik	Semakin buruk
Mengukur	Kesetaraan capaian	Ketidaksetaraan akses dan kekuasaan

Sumber: BPS Indonesia (2016)

Faktor penyebab tingginya IKG adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan rendah: putus sekolah, akses pendidikan tidak merata, budaya patriarki.
b. Perkawinan usia dini yang dapat menyebabkan putus sekolah, kehamilan remaja, ketergantungan ekonomi.

c. Rendahnya partisipasi kerja perempuan yang dipengaruhi oleh: pekerjaan domestik, keterbatasan kesempatan kerja.
d. Minimnya representasi perempuan dimana perempuan kurang terlibat dalam:politik, kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
e. Norma sosial dan budaya, misalnya anggapan laki-laki sebagai pencari nafkah, perempuan hanya bertugas domestik.

IKG Kota Denpasar sebesar 0,203 lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bali yaitu sebesar 0,178. Ini berarti ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Kota Denpasar masih lebih besar dibandingkan kondisi rata-rata Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Denpasar mungkin masih menghadapi kesenjangan pada partisipasi kerja, akses ekonomi, keterwakilan dalam pengambilan keputusan, atau aspek kesehatan reproduksi. Walaupun Denpasar mungkin memiliki tingkat pembangunan yang tinggi, belum tentu pembangunan tersebut sepenuhnya setara antara laki-laki dan perempuan.

BAB IV
PENDIDIKAN

Pendidikan tidak sekadar dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, melainkan sebagai arena transformasi sosial yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak individu maupun kelompok. Dalam konteks masyarakat kontemporer, pendidikan menjadi instrumen strategis untuk mengembangkan kapasitas manusia secara utuh tidak hanya dalam dimensi intelektual, tetapi juga moral, emosional, dan sosial. Ia bekerja sebagai ruang aktualisasi potensi yang beragam, sekaligus sebagai mekanisme untuk memproduksi manusia yang mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam dinamika zaman yang terus berubah. Oleh karena itu, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari agenda besar pembentukan manusia yang tidak hanya “cerdas”, tetapi juga berdaya dan bermakna.

Dalam kerangka pembangunan nasional Indonesia, arah pendidikan dirumuskan dalam dua spektrum yang saling melengkapi, yakni dimensi humaniora dan dimensi keilmuan. Dimensi humaniora menekankan pembentukan karakter iman, ketakwaan, etika, kemandirian, serta tanggung jawab sosial sebagai fondasi keberadaban. Sementara itu, dimensi keilmuan berorientasi pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan sebagai prasyarat partisipasi dalam struktur ekonomi modern. Ketegangan antara kedua dimensi ini sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika pendidikan lebih condong menjadi instrumen pasar tenaga kerja ketimbang ruang pembentukan manusia seutuhnya. Di sinilah

pentingnya menjaga keseimbangan agar pendidikan tidak tereduksi menjadi sekadar “pabrik tenaga kerja”.

Lebih jauh, relasi antara pendidikan dan sistem ekonomi bersifat dialektis. Di satu sisi, perkembangan ekonomi mendorong diferensiasi dan spesialisasi dalam sistem pendidikan. Di sisi lain, pendidikan berperan sebagai penyedia modal manusia (human capital) yang menopang produktivitas ekonomi. Namun, asumsi bahwa pendidikan secara otomatis membuka jalan mobilitas sosial perlu ditinjau secara kritis. Dalam praktiknya, akses terhadap pendidikan berkualitas masih terdistribusi secara tidak merata, sehingga justru berpotensi mereproduksi ketimpangan sosial yang ada. Dengan kata lain, pendidikan dapat menjadi sarana emansipasi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai mekanisme reproduksi struktur kelas apabila tidak disertai kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.

Sejalan dengan kerangka global, empat pilar pendidikan yang dirumuskan oleh UNESCO, belajar untuk mengetahui, belajar untuk berbuat, belajar untuk menjadi, dan belajar untuk hidup bersama, menegaskan bahwa pendidikan memiliki cakupan yang melampaui aspek kognitif semata. Pendidikan idealnya mampu membentuk individu yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan kemampuan hidup dalam keberagaman. Dengan demikian, dampak pendidikan tidak berhenti pada level individu, melainkan meluas menjadi fondasi bagi kohesi sosial dan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Secara normatif, komitmen negara terhadap pendidikan ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh

pendidikan tanpa diskriminasi. Prinsip universalitas ini mencakup seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin, usia, maupun latar belakang sosial ekonomi. Namun demikian, tantangan implementatif masih muncul dalam bentuk kesenjangan akses, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan, yang menuntut intervensi kebijakan berbasis data dan perspektif keadilan sosial.

Dalam konteks lokal, Denpasar sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Provinsi Bali menunjukkan komitmen yang signifikan dalam pembangunan sektor pendidikan. Hal ini tercermin dalam penempatan pendidikan sebagai prioritas strategis dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021–2026. Namun, komitmen tersebut perlu terus diuji melalui capaian empiris, khususnya dalam memastikan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah kota.

Untuk tahun 2025, evaluasi terhadap pembangunan pendidikan di Kota Denpasar tidak cukup hanya bersandar pada narasi normatif, melainkan harus didukung oleh indikator kuantitatif yang mampu menangkap realitas secara lebih objektif. Dalam hal ini, penggunaan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat keterjangkauan dan inklusivitas sistem pendidikan. Kedua indikator ini tidak hanya merefleksikan tingkat partisipasi pendidikan, tetapi juga mengungkap potensi kesenjangan yang masih terjadi, baik antar kelompok sosial maupun wilayah. Dengan demikian, analisis terhadap APM dan APK tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kritis mengenai sejauh mana pendidikan di Kota Denpasar telah berfungsi

sebagai alat transformasi sosial, bukan sekadar sebagai institusi formal semata.

4.1. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator statistik pendidikan yang menunjukkan proporsi anak usia sekolah tertentu yang sedang menempuh pendidikan sesuai dengan jenjang usianya. APM dihitung sebagai perbandingan antara jumlah siswa pada kelompok usia resmi di suatu jenjang pendidikan dengan total populasi pada kelompok usia tersebut, yang kemudian dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan partisipasi pendidikan, yaitu sejauh mana anak-anak mengikuti pendidikan sesuai dengan usia normatifnya. Dengan demikian, APM tidak hanya mencerminkan tingkat partisipasi sekolah, tetapi juga menggambarkan efisiensi sistem pendidikan dalam menempatkan peserta didik pada jenjang yang sesuai.

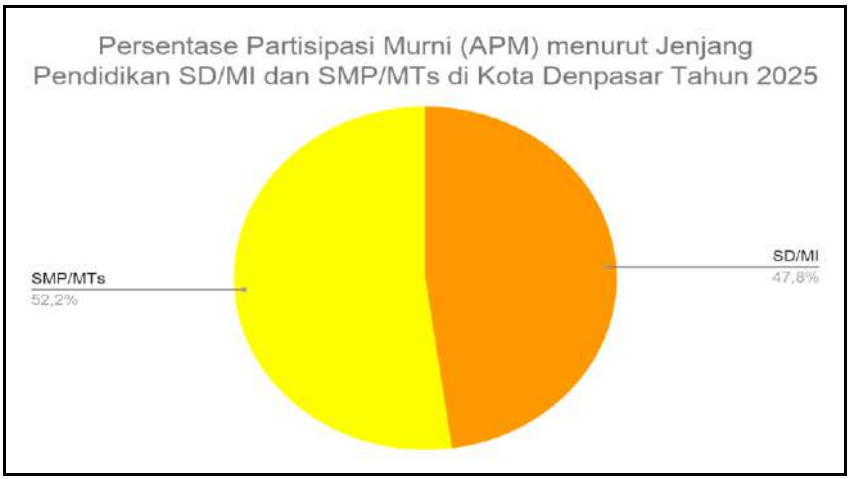
Semakin tinggi nilai APM, semakin besar proporsi anak usia sekolah yang berhasil mengakses pendidikan tepat waktu. Sebaliknya, rendahnya APM dapat mengindikasikan adanya permasalahan seperti keterlambatan masuk sekolah, putus sekolah, atau ketidaksesuaian jenjang pendidikan dengan usia, yang seringkali berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, maupun geografis. Kondisi APM di Kota Denpasar pada tahun 2025 dapat dilihat melalui Tabel 4.1. Perolehan data APM dari Dinas Pendidikan Kota Denapsar terbagi ke dalam dua tingkatan sekolah yaitu SD/MI dan SMP/MTS. Berdasarkan tabel 4.1. dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 rata-rata APM mencapai 103.49%, dengan rata-rata target sebesar 89.5% dan realisasi 92.24%.

Jenjang SD/MI menyentuh angka 98.8%, dengan target 98% dan realisasi 96.91%. Sedangkan pada jenjang SMP/MTS mencapai 108.10%, dengan target 81% dan realisasi 87.56%. Apabila diperhatikan maka tingkatan sekolah SD/MI mencapai persentase lebih rendah daripada tingkatan sekolah SMP/MTS.

Tabel 4. 1 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2025

Tingkatan Sekolah	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Persentase (%)
SD/MI	98	96.91	98.88
SMP/MTs	81	87.56	108.10
Rata-rata	89.5	92.24	103.49

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2025



Gambar 4.1 Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Denpasar Tahun 2025

Gambar 4.1 memberikan ilustrasi komparatif mengenai capaian Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Denpasar tahun 2024. Jika ditinjau secara agregat, kontribusi kedua jenjang terhadap total capaian APM relatif berimbang, dengan jenjang SMP/MTs sedikit lebih tinggi dibandingkan SD/MI. Hal ini tercermin dari nilai APM SMP/MTs yang mencapai 108,10 persen, sedangkan SD/MI berada pada angka 98,99 persen.

Secara lebih substantif, capaian APM jenjang SD/MI yang mendekati 100 persen menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia 7–12 tahun di Kota Denpasar telah mengakses pendidikan dasar sesuai dengan usia normatifnya. Kondisi ini mengindikasikan tingkat keterjangkauan dan pemerataan layanan pendidikan dasar yang relatif baik. Namun demikian, capaian APM SMP/MTs yang melebihi 100 persen justru mengisyaratkan adanya fenomena ketidaktepatan usia dalam partisipasi pendidikan. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat siswa di luar kelompok usia resmi 13–15 tahun baik yang lebih muda maupun lebih tua yang masih atau sudah mengenyam pendidikan di jenjang SMP/MTs.

Fenomena ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya dinamika transisi pendidikan yang belum sepenuhnya ideal, seperti keterlambatan masuk sekolah, pengulangan kelas, atau bahkan percepatan pendidikan pada sebagian kecil peserta didik. Dengan demikian, meskipun secara kuantitatif capaian APM tampak tinggi, secara kualitatif masih terdapat persoalan terkait kesesuaian usia dan jenjang pendidikan.

Lebih jauh, variasi capaian APM ini tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor struktural dan kultural, seperti kondisi sosial ekonomi keluarga, kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, distribusi geografis layanan pendidikan, hingga tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Selain itu, rasio ketersediaan ruang kelas terhadap jumlah anak usia sekolah serta latar belakang pendidikan orang tua juga turut mempengaruhi keberlanjutan partisipasi pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, analisis terhadap capaian APM tidak cukup berhenti pada angka partisipasi semata, tetapi perlu dilanjutkan dengan pemetaan yang lebih mendalam terkait ketimpangan akses dan ketidaksesuaian usia sekolah. Hasil pemetaan ini menjadi krusial sebagai dasar bagi Pemerintah Kota Denpasar dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka partisipasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan ketepatan layanan pendidikan di setiap jenjang.

4.2. Angka Partisipasi Khusus (APK)

Secara definisional, Angka Partisipasi Khusus dihitung sebagai perbandingan antara jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah (di jenjang apa pun) dengan total penduduk pada kelompok usia tersebut, kemudian dinyatakan dalam persentase. Dengan demikian, indikator ini memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai tingkat keterlibatan pendidikan pada fase usia tertentu, misalnya usia 7–12 tahun, 13–15

tahun, atau bahkan kelompok usia yang lebih luas seperti 16–18 tahun.

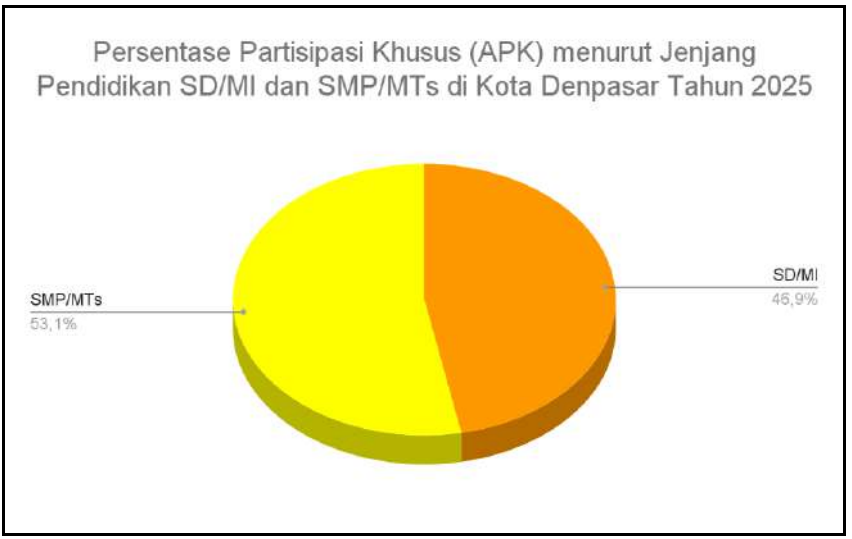
Secara analitis, Angka Partisipasi Khusus sangat berguna untuk mengidentifikasi pola partisipasi pendidikan berdasarkan siklus usia, termasuk mendeteksi potensi kerentanan seperti penurunan angka partisipasi pada jenjang usia tertentu. Misalnya, jika pada kelompok usia 13–15 tahun terjadi penurunan signifikan dibandingkan usia 7–12 tahun, maka hal tersebut dapat mengindikasikan adanya hambatan dalam transisi dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah. Kondisi APK di Kota Denpasar pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.2. menunjukkan rata-rata APK mencapai angka 107.03% dengan target rata-rata 99.23% dan realisasi 105.88%.

Kategori SD/MI mencapai persentase sebesar 100.40% dengan realisasi 104.92% dan target 104.5%. Sedangkan, kategori SMP/MTS mencapai persentase sebesar 113.66% dengan realisasi 106.84 persen dan target 94%. Data di bawah menunjukkan perbandingan persentase APM pada dua tingkatan sekolah, di mana jenjang SMP memiliki persentase lebih tinggi (113.66%) dibandingkan jenjang SD/MI (100.40%).

Tabel 4. 2 Angka Partisipasi Khusus (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2025

Tingkatan Sekolah	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Persentase (%)
SD/MI	104.50	104.92	100.40
SMP/MTs	94	106.84	113.66
Rata-rata	99.25	105.88	107.03

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2025



Gambar 4.2 Persentase Angka Partisipasi Khusus (APK) menurut Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Denpasar Tahun 2025

Diagram di atas menyajikan perbandingan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kota Denpasar tahun 2024 secara lebih visual dan terukur. Jika ditinjau dari distribusi kontribusinya, jenjang SMP/MTs menunjukkan proporsi yang sedikit lebih besar dibandingkan SD/MI, dengan capaian masing-masing sebesar 113,66 persen dan 100,40 persen. Meskipun demikian, selisih di antara keduanya tidak terlalu mencolok sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi pendidikan pada kedua jenjang berada pada tingkat yang relatif tinggi dan cukup seimbang.

Tingginya nilai APK pada kedua jenjang, yang bahkan melampaui angka 100 persen, menandakan bahwa akses terhadap pendidikan di Kota Denpasar

tergolong luas dan inklusif. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak hanya anak usia sekolah resmi
yang terakomodasi dalam sistem pendidikan, tetapi juga individu di luar rentang usia normatif turut berpartisipasi. Secara khusus, capaian APK pada jenjang SMP/MTs yang mencapai 113,66 persen mengisyaratkan adanya proporsi peserta didik yang cukup signifikan yang berada di luar kelompok usia ideal 13–15 tahun.

Fenomena tersebut dapat dimaknai secara ambivalen. Di satu sisi, tingginya APK mencerminkan keberhasilan dalam memperluas akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah. Namun di sisi lain, kondisi ini juga mengindikasikan adanya persoalan dalam ketepatan usia sekolah, seperti keterlambatan masuk sekolah, pengulangan kelas, maupun kembalinya individu ke bangku pendidikan setelah sempat terhenti. Dengan kata lain, sistem pendidikan telah mampu menjangkau lebih banyak individu, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam menjaga alur pendidikan yang sesuai dengan tahapan usia.

Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya melihat capaian APK sebagai indikator keberhasilan semata, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk mengidentifikasi dinamika dan tantangan yang masih ada dalam sistem pendidikan. Analisis lebih lanjut terkait faktor-faktor yang memengaruhi tingginya APK baik dari aspek sosial ekonomi, kapasitas infrastruktur pendidikan, maupun pola partisipasi masyarakat menjadi krusial. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, tidak hanya dalam meningkatkan akses, tetapi juga dalam memastikan

ketepatan dan keberlanjutan pendidikan pada setiap jenjang.

Data SMA/SMK/sederajat menunjukkan Nilai APK 133,61% berarti jumlah siswa SMA/sederajat (semua usia) jauh lebih banyak dibanding jumlah penduduk usia 16–18 tahun yang tinggal di Denpasar.

Nilai APM 108,33% menunjukkan jumlah siswa usia 16–18 tahun yang bersekolah di Denpasar juga melebihi jumlah penduduk usia 16–18 tahun yang tercatat di Denpasar.

Nilai yang melebihi 100% biasanya terjadi karena banyak siswa berasal dari luar wilayah Denpasar tetapi bersekolah di Denpasar, atau adanya perbedaan data domisili dan lokasi sekolah.

Tabel 4.3 APK/APM SMA/MA/SMK/Sederajat TP.2024/ 2025

No	Kota	Penduduk Usia 16-18 tahun	Total Murid Jenjang SMA/MA/SMK/Pa-ket C/SMALB	Total Murid Jenjang SMA/MA/ SMK/Pa-ket C/SMALB Semua Usia	APK	APM
1	Denpasar	31.881	34.537	42.596	133,61	108,33
2	Provinsi Bali	204.515	158.716	196.565	96,11	77,61

Sumber :
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, 2025
2. Data Pokok Pendidikan (Data Kemdikbud https://datadik.kemdikbud.go.id/), 2025
3. Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Bali, 2025
4. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali, 2025
5. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, 2025

Dapatlah disimpulkan Kota Denpasar memiliki APK dan APM di atas 100%, yang menunjukkan Denpasar menjadi pusat pendidikan menengah dan menarik banyak siswa dari luar kota. Provinsi Bali secara keseluruhan memiliki APK yang tinggi (96,11%), tetapi APM masih 77,61%, sehingga masih terdapat sebagian penduduk usia 16–18 tahun yang belum bersekolah di jenjang SMA/sederajat atau tidak bersekolah sama sekali.

Tabel 4.4 APS 16-18 tahun TP 2024/2025

No	Kota	Penduduk Usia 16-18 tahun	Total Murid Jenjang SMA/MA/SMK/ Pa-ket C/SMALB	APS
1	Denpasar	31.881	34.537	108,33
2	Provinsi Bali	204.515	158.716	96,11

Sumber :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali
2. Data Pokok Pendidikan (Data Kemdikbud https://datadik.kemdikbud.go.id/)
3. Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Bali
4. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali
5. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Berdasarkan Tabel 4.4, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16–18 tahun di Kota Denpasar mencapai 108,33%, lebih tinggi dibandingkan APS Provinsi Bali sebesar 96,11%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK/Paket C/SMALB di Kota Denpasar sangat tinggi dan bahkan

melebihi jumlah penduduk usia 16–18 tahun yang tercatat di wilayah tersebut.

Tingginya APS Kota Denpasar mengindikasikan bahwa selain melayani penduduk usia sekolah yang berdomisili di Denpasar, sekolah-sekolah di kota ini juga menampung peserta didik yang berasal dari daerah lain. Sementara itu, APS Provinsi Bali sebesar 96,11% menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia 16–18 tahun telah bersekolah, meskipun masih terdapat sebagian kecil yang belum mengenyam pendidikan pada jenjang tersebut.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa akses dan partisipasi pendidikan menengah di Kota Denpasar lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Bali, sehingga Denpasar berperan sebagai salah satu pusat pendidikan menengah di Bali.

4.3. Jumlah Siswa

Peserta didik atau siswa merupakan bagian dari masyarakat yang secara aktif menjalani proses pengembangan diri melalui kegiatan pembelajaran pada jalur dan jenjang pendidikan tertentu. Dalam dinamika pendidikan, siswa menempati posisi yang sangat sentral, tidak hanya sebagai penerima materi, tetapi juga sebagai subjek yang turut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Keberadaan dan keterlibatan siswa menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang berkualitas. Secara mendasar, partisipasi siswa dalam pendidikan didorong oleh keinginan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai yang dapat menunjang pencapaian cita-cita dan pengembangan potensi diri secara optimal. Proses ini pada akhirnya

diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup individu di masa depan, baik dari aspek sosial maupun ekonomi.

Pada bagian ini, akan disajikan gambaran mengenai jumlah peserta didik berdasarkan jenjang pendidikan di Kota Denpasar sebagai bentuk pemetaan kondisi pendidikan. Data ini penting untuk memahami distribusi siswa serta menjadi dasar dalam menganalisis kebutuhan dan arah kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

4.3.1. Siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan tahap awal dalam sistem pendidikan yang berfokus pada proses pertumbuhan dan perkembangan anak sejak lahir hingga usia enam tahun secara holistik. Proses ini mencakup pengembangan berbagai aspek, baik fisik maupun nonfisik, melalui pemberian stimulasi yang mendukung perkembangan motorik, kognitif, emosional, sosial, serta spiritual anak agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tahapan usianya. Menurut pandangan Sue Bredekamp dan Carol Copple (1993), tujuan utama PAUD adalah menciptakan lingkungan yang mampu mendorong tumbuh kembang anak secara menyeluruh dengan tetap memperhatikan norma dan nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, PAUD tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan awal, tetapi juga sebagai fondasi pembentukan karakter dan kesiapan anak untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

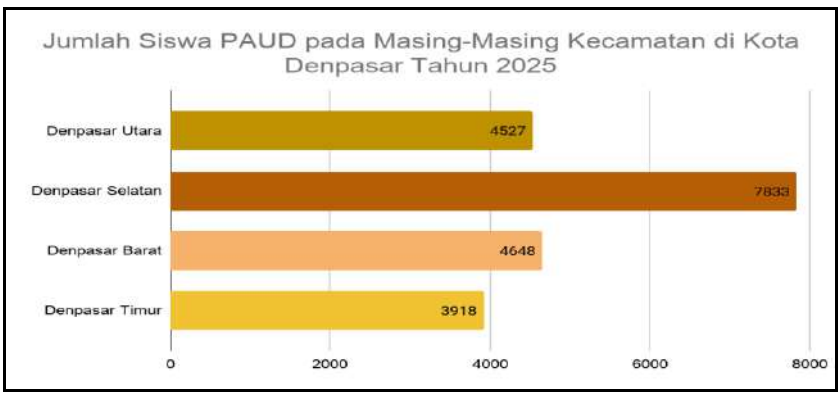
Secara konseptual, pendekatan dalam PAUD menekankan pada prinsip belajar yang menyenangkan,

yakni melalui aktivitas bermain yang terarah. Melalui pendekatan ini, anak diberikan ruang untuk bereksplorasi, berimajinasi, dan berkreasi secara aktif. Pola belajar yang demikian diharapkan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang tidak menekan, sehingga anak dapat berkembang secara alami, bebas, dan optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Tabel 4. 5 Jumlah Siswa PAUD menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025

No	Kecamatan	Tahun 2025		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Utara	2.342	2.185	4.527
2	Kec. Denpasar Selatan	2.799	2.517	7.833
3	Kec. Denpasar Barat	2.350	2.298	4.648
4	Kec. Denpasar Timur	2.009	1.909	3.918
Jumlah		9.500	8.909	20.926

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2025



Gambar 4.3 Jumlah Siswa PAUD pada Masing-Masing Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2025

Data Dinas Pendidikan Kota Denpasar pada tahun 2025 menunjukkan bahwa total jumlah siswa PAUD menyentuh angka 20.926 siswa dengan komposisi 9.500 siswa laki-laki dan 8.909 siswa perempuan. Berdasarkan empat kecamatan yang ada di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki jumlah siswa tertinggi yakni 7.833 siswa. Posisi tertinggi kedua, berada di Kecamatan Denpasar Barat yakni 4.648 siswa. Posisi ketiga berada di Kecamatan Denpasar Utara sejumlah 4.527 siswa. Sedangkan posisi terakhir berada di Kecamatan Denpasar Timur sejumlah 3.918 siswa.



Gambar 4.4 Jumlah Siswa PAUD menurut Jenis Kelamin Masing-masing Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2025

Apabila dilihat dari jenis kelamin, maka di seluruh kecamatan memilki jumlah siswa PAUD berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pertama,

dari jumlah total yakni 9.500 diantaranya adalah laki-laki, dan 8.909 sisanya adalah perempuan. Kedua, berdasarkan masing-masing kecamatan dengan perbandingan data lebih tinggi siswa PAUD berjenis kelamin laki-laki (Gambar 4.4.). Berdasarkan Gambar 4.4., Kecamatan Denpasar Selatan memiliki jumlah siswa berjenis kelamin laki-laki tertinggi yakni 2.799 siswa. Disusul secara berturut-turut dengan Denpasar Barat, Utara dan Timur yakni 2.350 siswa, 2.342 siswa, dan 2.009 siswa. Sedangkan jumlah siswa PAUD berjenis kelamin perempuan tertinggi berada di Kecamatan Denpasar Utara yaitu 2.517 siswa, dan terendah di Kecamatan Denpasar Timur yaitu 1.909 siswa.

Perbedaan jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan pada jenjang PAUD perlu dicermati secara lebih kritis. Jika perbedaan tersebut hanya disebabkan oleh komposisi demografis penduduk, maka hal ini masih dapat dianggap wajar. Namun, apabila ketimpangan muncul akibat perbedaan akses terhadap pendidikan, maka kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan partisipasi yang berpotensi bersumber dari bias gender sejak usia dini. Berbagai kajian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi pendidikan anak perempuan sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keterbatasan akses, serta konstruksi budaya yang menempatkan perempuan dalam ranah domestik. Pola pikir tersebut dapat memengaruhi keputusan keluarga dalam memberikan prioritas pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa akses pendidikan PAUD bersifat inklusif dan setara, agar tidak terjadi reproduksi ketimpangan gender di masa mendatang.

4.3.2. Siswa Sekolah Dasar (SD)

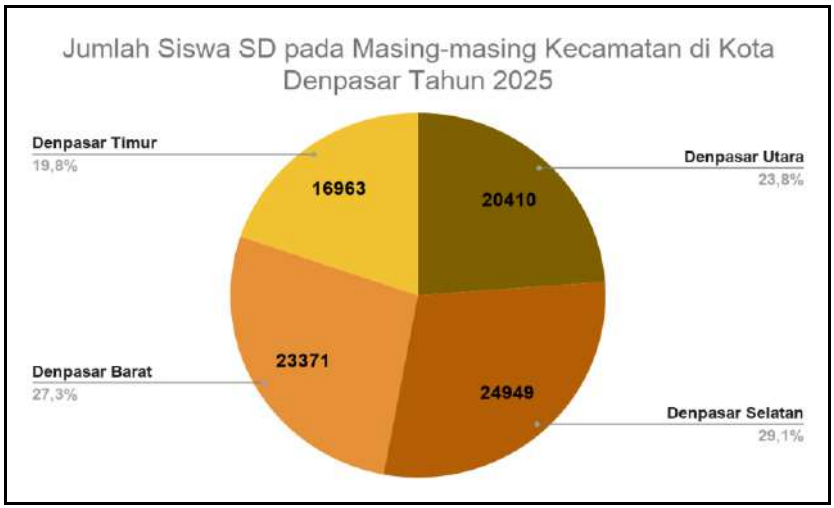
Setelah memperoleh stimulasi awal berupa pengenalan literasi, numerasi, serta pembentukan karakter pada jenjang PAUD, anak selanjutnya memasuki tahap pendidikan formal di tingkat sekolah dasar. Pendidikan sekolah dasar (SD) menjadi fondasi penting dalam sistem pendidikan, karena pada tahap ini peserta didik mulai dibekali dengan kemampuan dasar yang lebih terstruktur sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Pada jenjang ini, proses pembelajaran diarahkan pada penguatan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung, serta pengembangan pengetahuan yang disesuaikan dengan konteks lingkungan, potensi lokal, dan kondisi sosial budaya. Secara umum, peserta didik pada tingkat SD berada pada rentang usia 7 hingga 13 tahun. Oleh karena itu, analisis mengenai jumlah siswa SD berdasarkan jenis kelamin menjadi penting untuk melihat gambaran partisipasi pendidikan serta potensi adanya kesenjangan yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan Tabel 4.4., pada tahun 2025 jumlah siswa SD mencapai 85.693 siswa, di mana 44.034 siswa berjenis kelamin laki-laki, dan 41.659 siswa berjenis kelamin perempuan. Seluruh siswa tersebut terbagi ke dalam empat kecamatan di Kota Denpasar. Kecamatan dengan jumlah siswa tertinggi berada di Kecamatan Denpasar Selatan yakni 24. 949 siswa dan terendah berada di Kecamatan Denpasar Timur yakni 16.963 siswa.

Tabel 4. 6 Jumlah Siswa SD menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Tahun 2025		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Utara	10.442	9.968	20.410
2	Kec. Denpasar Selatan	12.807	12.142	24.949
3	Kec. Denpasar Barat	11.944	11.427	23.371
4	Kec. Denpasar Timur	8.841	8.122	16.963
Jumlah		44.034	41.659	85.693

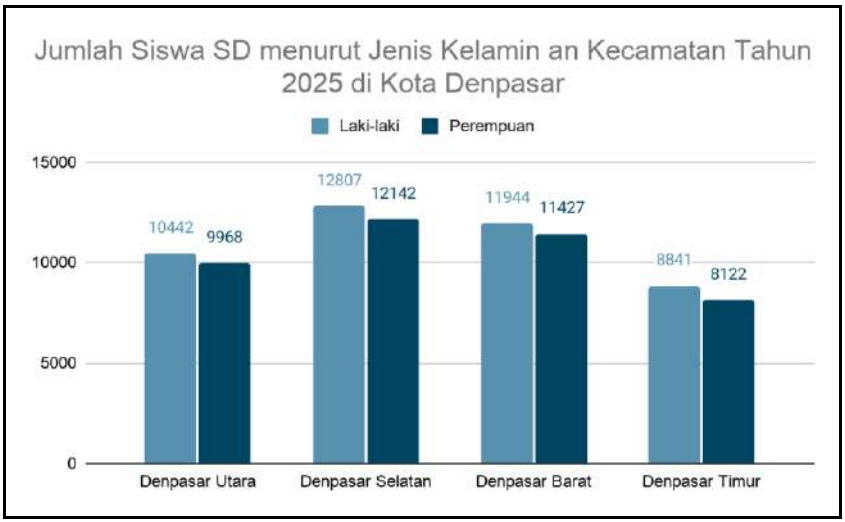
Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2025



Gambar 4.5 Jumlah Siswa SD pada Masing-masing Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2025

Gambar 4.5. memberikan visual lebih detail mengenai persentase jumlah siswa SD di Kota Denpasar pada tahun 2025. Berdasarkan gambar 4.5. dapat dilihat bahwa persentase tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Denpasar Selatan yakni 29.1%. Peringkat dua Kecamatan Denapsar Barat yakni 27.3%. Peringkat ketiga Denpasar

Utara yakni 23.8%. Kemudian peringkat keempat Denpasar Timur yakni 19.8%.



Gambar 4.6 Jumlah Siswa SD menurut Jenis Kelamin dan Kecamatandi Kota Denpasar Tahun 2025

Selain melihat sebaran data terkait jumlah total siswa SD berdasarkan jenis kelamin dan perbandingan empat kecamatan, data tersebut menyajikan perbedaan jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin dari masing-masing kecamatan Pada Gambar 4.6. memperlihatkan bahwa di seluruh kecamatan, jumlah siswa SD lebih didominasi oleh siswa dengan jenis kelamin laki-laki. Kecamatan dengan jumlah siswa laki-laki tertinggi berada di Denpasar Selatan yakni dengan jumlah 12.807 siswa sedangkan jumlah siswa laki-laki terendah berada di Denpasar Timur yakni 8.841 siswa. Adapun kecamatan dengan jumlah siswa perempuan tertinggi berada di

Denpasar Selatan yakni 12.142 siswa dan terendah berada di Denpasar Timur yakni 8.122 siswa.

Perbedaan jumlah siswa SD berdasarkan jenis kelamin yang menunjukkan dominasi siswa laki-laki tidak dapat dibaca semata sebagai refleksi dari komposisi demografis, melainkan perlu dipahami sebagai gejala sosial yang berlapis. Secara sosiologis, pola ini berpotensi mengindikasikan adanya bias akses pendidikan yang masih dipengaruhi oleh konstruksi gender dalam masyarakat. Dalam konteks tertentu, anak perempuan lebih rentan mengalami eksklusi pendidikan akibat beban domestik, praktik perkawinan usia dini, maupun prioritas keluarga yang lebih mengutamakan pendidikan anak laki-laki sebagai "investasi" masa depan. Selain itu, norma sosial yang dilekatkan pada perempuan, seperti ekspektasi untuk tinggal dekat rumah atau menjaga adik, turut mempersempit ruang partisipasi mereka dalam pendidikan formal. Dengan demikian, ketimpangan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan struktur sosial yang lebih luas, termasuk relasi kuasa berbasis gender.

Di sisi lain, faktor ekonomi dan geografis juga berpotensi memperdalam disparitas tersebut. Dalam kondisi keterbatasan sumber daya, rumah tangga seringkali melakukan strategi seleksi pendidikan yang bias gender, terutama ketika akses sekolah memerlukan biaya tambahan seperti transportasi atau perlengkapan. Pada wilayah dengan akses geografis yang sulit, jarak tempuh yang jauh dan risiko keamanan dalam perjalanan dapat menjadi pertimbangan lebih besar bagi anak perempuan dibandingkan laki-laki. Jika tidak diintervensi, kondisi ini berisiko mereproduksi ketimpangan struktural dalam

jangka panjang, di mana perempuan memiliki tingkat pendidikan lebih rendah dan pada akhirnya berdampak pada keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak dan partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pemerataan akses secara umum, tetapi juga sensitif gender, dengan mempertimbangkan konteks sosial-budaya, ekonomi, dan geografis secara komprehensif.

4.3.3. Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan fase krusial dalam sistem pendidikan yang berperan strategis dalam mengembangkan kapasitas intelektual sekaligus membentuk karakter peserta didik. Jenjang ini ditempuh setelah siswa menyelesaikan pendidikan dasar (SD), umumnya pada rentang usia 13–15 tahun, yang merupakan periode transisi penting dari masa kanak-kanak menuju remaja. Pada tahap ini, siswa mulai memperoleh penguatan pengetahuan yang lebih kompleks serta pengembangan keterampilan yang lebih beragam, meliputi kemampuan akademik, pembentukan nilai dan karakter, eksplorasi minat dan bakat, hingga penguatan keterampilan sosial dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Lebih dari sekadar kelanjutan pendidikan formal, jenjang SMP berfungsi sebagai fondasi penting dalam mempersiapkan siswa menghadapi pendidikan lanjutan dan kehidupan yang lebih luas. Proses pembelajaran pada tahap ini turut membentuk orientasi masa depan siswa, termasuk kesiapan dalam menentukan jalur karier dan peran sosialnya di masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pendidikan pada jenjang SMP tidak hanya

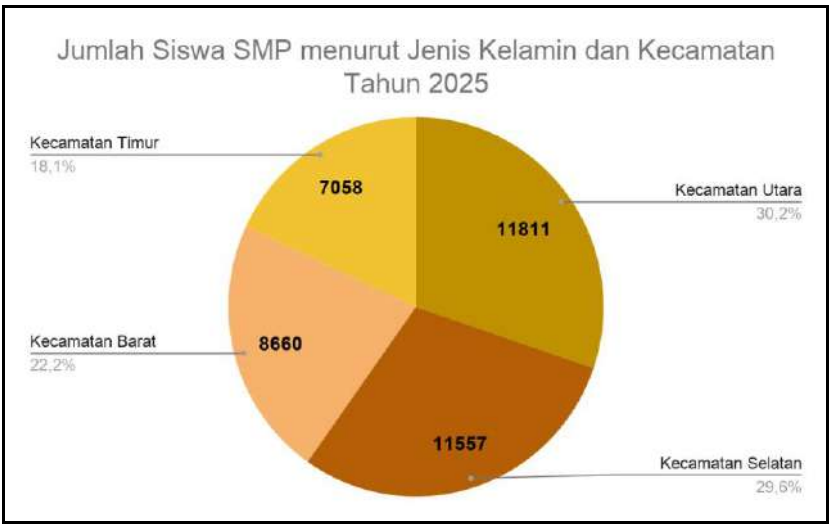
berdampak pada perkembangan individu, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Pendidikan yang optimal di tingkat ini berkontribusi dalam menciptakan generasi yang kompeten, adaptif, dan memiliki daya saing dalam menghadapi dinamika masyarakat modern.

Di Indonesia, sejak pemberlakuan otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan SMP kini menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Dalam konteks Kota Denpasar, berdasarkan Tabel 4.5., pada tahun 2025 jumlah siswa SMP mencapai angka 39.084 siswa. Di mana, 20.272 siswa diantaranya berjenis kelamin laki-laki, dan 18.814 lainnya berjenis kelamin perempuan. Seluruh siswa tersebut terbagi ke dalam empat kecamatan di Kota Denpasar. Kecamatan dengan jumlah siswa tertinggi berada di Kecamatan Denpasar Utara yakni 11.811 siswa, dan terendah berada di Kecamatan Denpasar Timur yakni 7.058 siswa.

Tabel 4. 7 Jumlah Siswa SMP menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Tahun 2025		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Utara	6.068	5.743	11.811
2	Kec. Denpasar Selatan	5.967	5.590	11.557
3	Kec. Denpasar Barat	4.547	4.113	8.660
4	Kec. Denpasar Timur	3.690	3.368	7.058
Jumlah		20.272	18.814	39.086

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2025



Gambar 4.7 Jumlah Siswa SMP menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2025

Gambar 4.7. memberikan visual lebih detail mengenai persentase jumlah siswa SMP di Kota Denpasar pada tahun 2025. Berdasarkan Gambar 4.7. dapat dilihat bahwa persentase tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Denpasar Utara yakni 30.2% atau setara dengan 11.811 siswa. Peringkat kedua berada di Kecamatan Denpasar Selatan yakni 29.6% atau setara dengan 11.557 siswa. Sedangkan peringkat tiga dan empat secara berturut-turut ialah Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Timur yakni 22.2% atau setara dengan 8.660 siswa dan 18% atau setara dengan 7.058 siswa.



Gambar 4.8 Jumlah Siswa SMP menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2025

Selain melihat sebaran data terkait jumlah total siswa SMP berdasarkan jenis kelamin dan perbandingan empat kecamatan, data tersebut menyajikan perbedaan jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin dari masing-masing kecamatan. Pada Gambar 4.8. memperlihatkan secara jelas bahwa di seluruh kecamatan, jumlah siswa SMP lebih didominasi oleh siswa dengan jenis kelamin laki-laki. Kecamatan dengan jumlah siswa laki-laki tertinggi berada di Denpasar Utara yakni 6.068 siswa dan terendah berada di Denpasar Timur yakni 3.690 siswa. Adapun kecamatan dengan jumlah siswa perempuan tertinggi berada di Denpasar Utara yakni 5.743 siswa dan terendah berada di Denpasar Timur yakni 3.368 siswa. Dengan kata lain, selisih antara siswa berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan berjumlah 1.458 siswa.

Perbedaan jumlah siswa SMP berdasarkan jenis kelamin dengan selisih mencapai 1.458 siswa menunjukkan adanya ketimpangan yang tidak lagi dapat

dikategorikan sebagai variasi kecil atau fluktuasi biasa. Jika dibandingkan dengan data nasional, komposisi siswa SMP pada umumnya relatif seimbang (sekitar 51,10% laki-laki dan 48,90% perempuan) maka selisih sebesar ini mengindikasikan adanya faktor struktural yang bekerja di tingkat lokal. Secara sosiologis, dominasi siswa laki-laki dalam jumlah yang cukup signifikan dapat mencerminkan adanya hambatan partisipasi pendidikan bagi anak perempuan, baik yang bersifat kultural maupun struktural. Dalam beberapa konteks, pendidikan bagi perempuan masih dipandang sebagai sesuatu yang kurang prioritas akibat konstruksi peran gender, di mana perempuan lebih diarahkan pada ranah domestik atau bahkan mengalami pembatasan akses pendidikan karena faktor ekonomi keluarga. Dengan demikian, selisih 1.458 siswa bukan sekadar angka, melainkan indikator awal adanya potensi eksklusi sistemik terhadap kelompok perempuan dalam akses pendidikan menengah.

Di sisi lain, penting juga mempertimbangkan dinamika yang lebih kompleks, termasuk kemungkinan adanya faktor “push and pull” dalam partisipasi pendidikan. Menariknya, beberapa data menunjukkan bahwa angka putus sekolah justru lebih tinggi pada siswa laki-laki, yang berarti dominasi laki-laki dalam jumlah siswa tidak selalu identik dengan keberlanjutan pendidikan yang lebih baik. Hal ini membuka kemungkinan bahwa ketimpangan jumlah tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor: di satu sisi, masih adanya pembatasan sosial terhadap pendidikan perempuan; di sisi lain, adanya dinamika perilaku dan partisipasi laki-laki yang lebih tinggi secara kuantitatif tetapi belum tentu stabil secara kualitatif. Jika tidak dianalisis secara mendalam, kondisi ini berisiko

mereproduksi ketimpangan gender dalam jangka panjang, baik dalam akses pendidikan lanjutan maupun dalam distribusi peluang sosial-ekonomi. Oleh karena itu, intervensi kebijakan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan angka partisipasi, tetapi juga pada penghapusan hambatan berbasis gender serta penguatan keberlanjutan pendidikan bagi kedua kelompok secara berimbang.

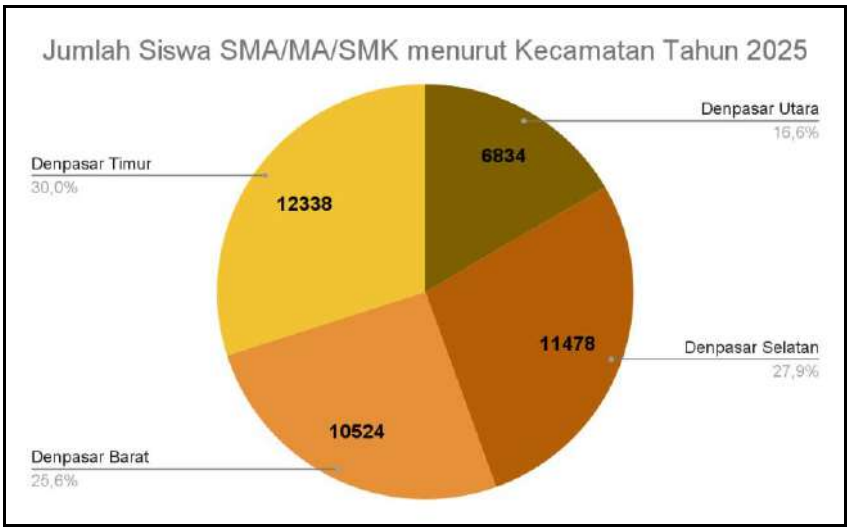
4.3.4. Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)

Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan jenjang pendidikan menengah lanjutan setelah siswa menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada tahap ini, kurikulum dirancang untuk memperkuat penguasaan pengetahuan di berbagai bidang sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis sebagai bekal melanjutkan ke perguruan tinggi. Pendidikan SMA ditempuh selama tiga tahun, yakni dari kelas 10 hingga kelas 12, dengan rentang usia siswa umumnya 15–18 tahun. Pada kelas 10, siswa memperoleh mata pelajaran umum, sedangkan mulai kelas 11 hingga kelas 12, siswa diarahkan untuk memilih peminatan sesuai dengan minat dan potensi akademiknya.

Tabel 4. 8 Jumlah Siswa SMA/MA/SMK menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	TOTAL		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Utara	3178	3656	6834
2	Kec. Denpasar Selatan	5813	5665	11478
3	Kec. Denpasar Barat	5759	4765	10524
4	Kec. Denpasar Timur	6459	5879	12338
	TOTAL	**21209**	**19965**	**41174**

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, 2025



Gambar 4.9 Jumlah Siswa SMA/MA/SMK menurut Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2025

Data di atas pada tahun 2025 menunjukkan bahwa total jumlah siswa SMA/MA.SMK menyentuh angka 41.174 siswa dengan komposisi 21.209 siswa berjenis kelamin laki-laki dan 19.965 siswa berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan empat kecamatan yang ada di

Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur memiliki jumlah siswa SMA/MA/SMK tertinggi yakni 30% atau setara dengan 12.338 siswa. Sedangkan jumlah siswa terendah berada di Denapsar Utara yakni 16.6% atau setara dengan 6.834 siswa.



Gambar 4.10 Jumlah Siswa SMA/MA/SMK menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2025

Apabila dilihat dari jenis kelamin, terdapat tiga kecamatan dengan jumlah siswa laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pertama di Denpasar Selatan dengan jumlah siswa laki-laki 5.813 siswa dan siswa perempuan 5.665 siswa. Kedua, di Denpasar Barat dengan jumlah siswa laki-laki 5.759 siswa dan siswa perempuan 4.765 siswa. Ketiga, Denpasar Timur dengan jumlah siswa laki-laki 6.459 siswa dan siswa perempuan 5.879 siswa. Hanya Denpasar Utara yang memiliki jumlah siswa lebih tinggi yakni 3.656 siswa, sedangkan jumlah siswa laki-laki 3.178 siswa.

Tabel 4. 9 Jumlah Siswa berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2025

Tingkatan Sekolah	2025		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD	44.034	41.659	85.693
SMP	20.272	18.814	39.086
SMA	21.209	19.965	41.174
Jumlah	85.515	79.438	165.953

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, 2025

Tabel 4.9. menunjukkan perbedaan jumlah siswa berdasarkan jenjang pendidikan di Kota Denpasar tahun 2025. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Denpasar dan Provinsi Bali, total jumlah siswa dari tiga jenjang mencapai angka 165.953 siswa dengan dominasi jenis kelamin laki-laki yaitu 85.515 siswa dan perempuan yaitu 79.438 siswa. Sejumlah 85.693 siswa berasal dari jenjang SD, 39.086 berasal dari jenjang SMP, dan 41.174 berasal dari jenjang SMA.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang masih kuat dipengaruhi sistem patriarki, akses pendidikan bagi perempuan kerap diposisikan sebagai sesuatu yang tidak mendesak. Konstruksi sosial-budaya secara reduktif menempatkan perempuan dalam ranah domestik, sehingga pendidikan formal dianggap tidak relevan dengan peran yang dilekatkan pada mereka. Cara pandang ini bukan hanya menyederhanakan potensi perempuan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme legitimasi yang secara halus menyingkirkan mereka dari ruang-ruang pengembangan diri dan partisipasi publik. Akibatnya, ketimpangan akses pendidikan bukan terjadi

secara alamiah, melainkan diproduksi dan direproduksi melalui norma, nilai, dan praktik sosial yang mengakar.

Dalam konteks tersebut, perbedaan jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin perlu dibaca sebagai gejala struktural, bukan sekadar variasi statistik. Ketimpangan ini berpotensi menjadi indikator adanya eksklusi sistemik yang membatasi mobilitas sosial perempuan sejak usia sekolah. Tanpa intervensi yang berbasis pada pemahaman mendalam terhadap faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berkelindan, kondisi ini akan terus melanggengkan siklus diskriminasi antargenerasi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai data terkait, guna mengidentifikasi akar persoalan secara lebih presisi sekaligus merumuskan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga transformatif dalam mendorong keadilan gender di bidang pendidikan.

Tabel 4. 10 Persentase Penduduk Berumur 25 Tahun ke Atas dengan Pendidikan SMA ke Atas di Kota Denpasar dan Provinsi Bali Menurut Jenis Kelamin (Persen) Tahun 2025

Denpasar – Bali	Laki-laki	Perempuan
	2025	2025
Kota Denpasar	68,39	64,56
Provinsi Bali	56,20	44,27

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Berdasarkan Tabel 4.10, persentase penduduk berumur 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas di Kota Denpasar tahun 2025 lebih tinggi

dibandingkan Provinsi Bali. Pada Kota Denpasar, persentase laki-laki mencapai 68,39% dan perempuan sebesar 64,56%, sedangkan di Provinsi Bali masing-masing sebesar 56,20% untuk laki-laki dan 44,27% untuk perempuan. Data ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kota Denpasar relatif lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Bali.

Selain itu, persentase pendidikan perempuan di Kota Denpasar yang cukup tinggi menunjukkan adanya peningkatan akses dan kesempatan pendidikan bagi perempuan. Meskipun masih terdapat selisih antara laki-laki dan perempuan, kesenjangan tersebut lebih kecil dibandingkan Provinsi Bali secara keseluruhan. Kondisi ini mencerminkan bahwa Kota Denpasar memiliki tingkat kesetaraan pendidikan gender yang lebih baik serta berpotensi mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah.

4.3.5. Siswa Putus Sekolah

Putus sekolah merupakan kondisi ketika siswa tidak mampu menyelesaikan pendidikan sesuai jenjang yang ditempuh dan masih menjadi persoalan serius dalam sistem pendidikan (UNICEF, 2023). Data menunjukkan bahwa jumlah anak yang tidak bersekolah di Indonesia masih cukup tinggi, sehingga menjadi tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia (Badan Pusat Statistik, 2023). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial secara lebih luas. Anak yang putus sekolah cenderung menghadapi keterbatasan akses pekerjaan, rendahnya mobilitas sosial, serta kerentanan terhadap berbagai

masalah sosial. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama, terutama ketika keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak (World Bank, 2022). Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, kondisi keluarga yang tidak harmonis, dan keterbatasan akses pendidikan juga turut berkontribusi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan yang komprehensif agar persoalan putus sekolah dapat diminimalisir secara berkelanjutan.

Berdasarkan data dinas terkait pada Tabel 4.9. jumlah siswa SD yang mengalami putus sekolah di Tahun 2025 adalah 11 siswa. Fenomena putus sekolah tertinggi berada di Kecamatan Denpasar Timur yakni 4 siswa, sedangkan terendah berada di Denpasar Barat yakni 1 siswa.

Tabel 4. 11 Jumlah Siswa SD/MI yang Putus Sekolah berdasarkan Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Tahun 2025
1	Kec. Denpasar Utara	3
2	Kec. Denpasar Selatan	3
3	Kec. Denpasar Barat	1
4	Kec. Denpasar Timur	4
	Jumlah	11

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2025

Berbeda dengan data sekolah dasar, kasus siswa putus sekolah pada jenjang SMP/MTS sejumlah 5 siswa. Hal ini dapat dilihat melalui Tabel 4.10. Masing-masing berada di Denpasar Selatan 4 orang, dan Denpasar Timur

1 orang. Sedangkan untuk Denpasar Utara dan Denpasar Barat tidak ada kasus.

Tabel 4. 12 Jumlah Siswa SMP/MTs yang Putus Sekolah berdasarkan Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Tahun 2025
1	Kec. Denpasar Utara	0
2	Kec. Denpasar Selatan	4
3	Kec. Denpasar Barat	0
4	Kec. Denpasar Timur	1
	Jumlah	5

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2025

Pada Tabel 4.13. Jumlah Anak Umur 7-18 Tahun yang Putus Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2025 memperlihatkan bahwa terdapat 16 kasus putus sekolah. Kasus tertinggi berada di tingkat SD yakni 11 kasus, dan 5 sisanya berada di tingkat SMP. Kasus tertinggi berada di Kecamatan Denpasar Selatan dengan total 7 kasus, dan terendah berada di Kecamatan Denpasar Barat yakni 1 kasus.

Tabel 4.13 Jumlah Anak Umur 7-18 Tahun Yang Putus Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2025

No	Kecamatan	SD	SMP
1	Kec. Denpasar Utara	3	0
2	Kec. Denpasar Selatan	3	4
3	Kec. Denpasar Barat	1	0
4	Kec. Denpasar Timur	4	1
	Jumlah	11	5

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, 2025

Tabel 4.14 Jumlah Siswa SMA/SMK yang Putus Sekolah Tahun 2024/2025

No	Kota	SMA			SMK			% Putus
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	Denpasar	0	0	0	20	10	30	0,13

Keterangan: Yang putus sekolah berasal dari SMK Swasta

Sumber :
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali
2. Data Pokok Pendidikan (Data Kemdikbud https://datadik.kemdikbud.go.id/)
3. Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Bali
4. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali
5. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Data tersebut menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah di Kota Denpasar tergolong sangat rendah, yaitu hanya 0,13% dari total peserta didik. Tidak terdapat siswa SMA yang putus sekolah selama Tahun Pelajaran 2024/2025. Kasus putus sekolah hanya terjadi pada jenjang SMK dengan jumlah 30 siswa, terdiri atas 20 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Selain itu, seluruh siswa yang putus sekolah berasal dari SMK swasta, sehingga perlu menjadi perhatian dalam upaya pencegahan putus sekolah melalui penguatan dukungan akademik, ekonomi, maupun sosial bagi peserta didik di sekolah swasta.

Data mengenai anak putus sekolah yang secara kuantitatif terlihat kecil berpotensi menimbulkan bias persepsi seolah persoalan ini tidak mendesak, padahal

setiap kasus mencerminkan kegagalan pemenuhan hak dasar pendidikan. Keberadaan sembilan anak yang putus sekolah, dengan enam di antaranya tidak menyelesaikan jenjang sekolah dasar, menunjukkan adanya kerentanan serius pada fase pendidikan paling fundamental yang seharusnya menjadi fondasi perkembangan kognitif dan sosial. Kondisi ini menandakan bahwa persoalan tidak hanya terletak pada akses masuk sekolah, tetapi juga pada kemampuan sistem dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan siswa hingga tuntas. Dampaknya tidak sederhana, karena anak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar berisiko mengalami keterbatasan literasi, rendahnya peluang ekonomi, serta kerentanan terhadap eksklusi sosial dalam jangka panjang.

Situasi ini menuntut pengkajian yang tajam terhadap faktor pendorong seperti tekanan ekonomi rumah tangga, hambatan geografis, serta konstruksi sosial-budaya yang dapat menghambat keberlanjutan pendidikan. Intervensi yang diperlukan tidak cukup bersifat administratif, melainkan harus kontekstual dan adaptif melalui dukungan sosial yang tepat sasaran, penguatan peran komunitas, serta kebijakan yang sensitif terhadap kondisi lokal. Pada saat yang sama, apabila faktor kesehatan menjadi penyebab utama, maka perlu dipastikan adanya dukungan layanan kesehatan, pendidikan inklusif, dan kapasitas caregiver agar anak tetap memperoleh kualitas hidup yang layak. Keterbatasan data yang tidak memuat pemilahan berdasarkan jenis kelamin juga menjadi kelemahan penting karena menghambat pembacaan ketimpangan secara lebih komprehensif, sehingga berpotensi

menghasilkan kebijakan yang kurang responsif terhadap dinamika gender.

4.4. Sekolah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki fungsi utama dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang terarah melalui kegiatan pengajaran, pembinaan, dan pelatihan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Potensi tersebut tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga mencakup perkembangan moral, emosional, sosial, dan fisik sebagai satu kesatuan yang membentuk kualitas individu. Slameto (2015) menyatakan bahwa lingkungan sekolah merupakan faktor penting yang memengaruhi proses belajar dan pembentukan karakter siswa, karena di dalamnya terjadi interaksi sosial dan proses internalisasi nilai. Berdasarkan peran tersebut, keberadaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari efektivitas proses pembelajaran. Fasilitas yang memadai, khususnya bangunan sekolah, menjadi faktor penunjang utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur pendidikan perlu menjadi perhatian serius guna menjamin keberlangsungan dan kualitas proses pendidikan.

Data Dinas Pendidikan Kota Denpasar dan Dinas Pendidikan Provinsi Bali pada Tabel 4.12. tentang Jumlah Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2024 menunjukkan jumlah sekolah ada di angka 741 sekolah. Di mana, jumlah terbesar

Tabel 4. 15 Jumlah Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2025

Pendidikan	2025
TK	291
PAUD	71
TPA	19
SD/Sederajat	266
SLTP/Sederajat	94
SLTA/Sederajat	36
SMK	28
Jumlah	805

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dan Kota Denpasar, 2025

4.5. Guru

Guru merupakan aktor kunci dalam proses pendidikan yang berperan sebagai fasilitator sekaligus penggerak utama dalam mengembangkan potensi peserta didik agar mampu tumbuh menjadi individu yang berpengetahuan, berkarakter, dan beretika. Mulyasa (2013) memandang guru sebagai tenaga profesional yang tidak hanya menjalankan fungsi pedagogis, tetapi juga memiliki tanggung jawab multidimensional yang mencakup aspek profesional, kemanusiaan, dan sosial. Dalam ranah profesional, guru bertugas untuk mendidik, mengajar, dan melatih, yang masing-masing berkaitan dengan pengembangan nilai, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan praktis siswa. Pada dimensi kemanusiaan, guru dituntut untuk mampu membangun relasi yang empatik dan suportif, bahkan seringkali berperan sebagai figur pengganti orang tua di lingkungan sekolah.

Sementara, dalam konteks sosial, posisi guru memiliki legitimasi moral yang tinggi sebagai agen perubahan yang berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan guru tidak hanya dilihat dari jumlah, tetapi juga kualitas yang dimiliki dalam menjalankan peran tersebut. Ketidakseimbangan antara jumlah guru dan kebutuhan riil di lapangan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti beban kerja yang berlebihan, ketidaksesuaian bidang ajar, serta menurunnya efektivitas proses pembelajaran, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hasil pendidikan secara keseluruhan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Denpasar pada Tabel 4.15. tentang Jumlah Guru SD menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 berjumlah 3.937 guru SD. Berdasarkan jumlah tersebut, jumlah guru di dominasi dengan guru berjenis kelamin perempuan yakni 2.977. Sedangkan, jumlah guru berjenis kelamin laki-laki hanya 960 guru. Dari total guru SD, terbagi ke dalam empat jenjang pendidikan yakni SMA, Diploma 1/2/3, S1, dan S2 serta tersebar di empat kecamatan.

Apabila dilihat dari jenjang pendidikan, guru SD dengan jenjang pendidikan S1 memiliki jumlah tertinggi yakni 3.638 guru, dimana 2.773 guru berjenis kelamin perempuan dan 865 lainnya laki-laki. Sedangkan, jenjang pendidikan dengan jumlah guru terendah berada pada jenjang Diploma 1/2/3 yakni 31 guru, dengan komposisi 21 berjenis kelamin perempuan dan 10 laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender khususnya perempuan terhadap akses pekerjaan profesional tenaga

pendidik maupun akses pendidikan tinggi sudah sangat baik.

Tabel 4.16 Jumlah Guru SD menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025

Kecamatan	Jenjang Pendidikan							
	SMA		Dip 1/2/3		S1		S2	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Kec. Denpasar Utara	7	12	2	5	190	662	14	27
Kec. Denpasar Selatan	4	13	3	4	266	802	15	31
Kec. Denpasar Barat	5	23	3	5	220	720	22	35
Kec. Denpasar Timur	9	12	2	7	189	589	9	30
Jumlah	25	60	10	21	865	2773	60	123
Total L	960							
Total P	2.977							
Total L + P	3.937							

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2025

Dominasi jumlah guru perempuan dibandingkan laki-laki bukan sekadar fenomena statistik, melainkan mencerminkan konstruksi sosial yang mengakar dalam dunia pendidikan. Secara umum, kecenderungan ini banyak ditemukan terutama pada jenjang pendidikan dasar di berbagai wilayah. Sugihartono, et al. (2013) menjelaskan bahwa persepsi masyarakat masih kuat mengaitkan profesi mengajar anak usia dini dengan peran keibuan, sehingga perempuan dianggap lebih “alami”

dalam menjalankan fungsi tersebut. Karakteristik seperti kesabaran, ketelatenan, dan kemampuan membangun kedekatan emosional sering dilekatkan pada perempuan, sementara laki-laki cenderung dipersepsikan kurang sesuai dengan tuntutan tersebut. Bahkan dalam praktik sosial, keberadaan guru laki-laki di jenjang pendidikan dasar tidak jarang dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim dan memunculkan stigma tertentu.

Selain faktor kultural, pertimbangan ekonomi juga berperan signifikan, di mana profesi guru pada jenjang dasar sering dipersepsikan memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif rendah, sehingga kurang menarik bagi laki-laki yang dibebani ekspektasi sebagai pencari nafkah utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa pilihan profesi tidak sepenuhnya didasarkan pada minat dan kompetensi, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan sosial dan struktur ekonomi. Oleh karena itu, untuk memahami apakah pola dominasi ini selaras dengan kondisi empiris yang ada, diperlukan kajian lebih lanjut yang mampu mengaitkan data kuantitatif dengan konteks sosial-budaya dan ekonomi secara lebih komprehensif.

4.6. Kepala Sekolah

Kepemimpinan pendidikan merujuk pada kapasitas seorang pemimpin dalam mengarahkan, memengaruhi, dan mengoordinasikan seluruh komponen sekolah agar bergerak menuju tujuan bersama. Dalam struktur sekolah, kepala sekolah memegang peran sentral sebagai pengambil kebijakan sekaligus pengelola utama yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan seluruh aktivitas pendidikan. Posisi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis karena menentukan

arah perkembangan sekolah, baik dari sisi akademik maupun kelembagaan. Oleh sebab itu, kualitas kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor penentu dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu.

Kepemimpinan kepala sekolah yang ideal setidaknya ditopang oleh beberapa dimensi utama. Aspek kepribadian menjadi fondasi penting, mencakup karakter positif seperti integritas, ketegasan, kepekaan sosial, dan kemampuan membangun relasi yang sehat dengan warga sekolah. Selain itu, kepala sekolah perlu memiliki pemahaman yang kuat terhadap tujuan pendidikan serta kemampuan merumuskan dan mengimplementasikan program strategis bersama berbagai pemangku kepentingan. Penguasaan pengetahuan di bidang ilmu, teknologi, dan perkembangan pendidikan juga menjadi bekal penting dalam menghadapi dinamika zaman. Di sisi lain, keterampilan profesional dalam mengelola administrasi dan organisasi sekolah menjadi penunjang agar seluruh fungsi berjalan secara efektif. Mengingat besarnya pengaruh kepala sekolah terhadap arah dan kualitas pendidikan, evaluasi terhadap kinerja kepemimpinan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan sekolah terus berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

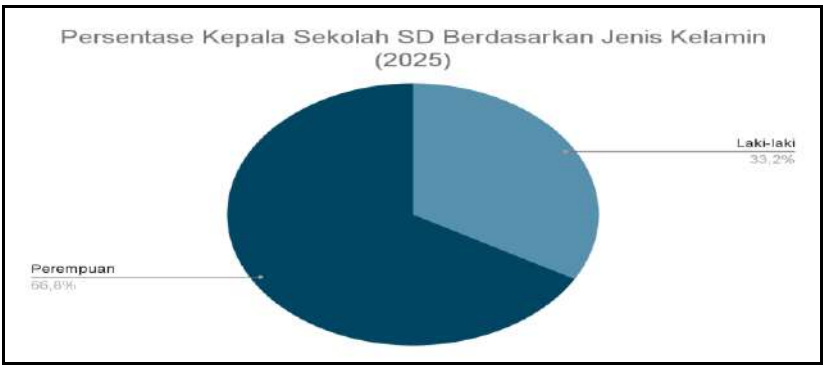
Berdasarkan data 4.17 tentang jumlah kepala sekolah SD menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di Kota Denpasar tahun 2025, dapat disoroti melalui dua kategori menarik, yaitu jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Jumlah total kepala sekolah SD pada tahun 2025 mencapai 256 kepal sekolah. Di mana, 171 diantaranya

adalah perempuan dan 85 lainnya adalah laki-laki. Jika diperhatikan berdasarkan tiga kategori jenjang pendidikan, kualitas kepala sekolah di Denpasar sangat baik sebab tidak ada di bawah jenjang S1. Kepala sekolah dengan jumlah tertinggi berada pada jenjang S1 yakni 189 kepala sekolah. Sedangkan pada jenjang lebih tinggi dari S1 berjumlah 67 kepala sekolah. Menariknya, baik di jenjang S1 maupun >S1, perempuan mendominasi jumlah sebagai kepala sekolah SD.

Tabel 4.17 Jumlah Kepala Sekolah SD menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025

Jenjang Pendidikan	Tahun 2025	
	Laki-laki	Perempuan
<S1	-	-
S1	64	125
>S1	21	46
Jumlah	85	171

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2025



Gambar 4.11 Persentase Kepala Sekolah SD berdasarkan Jenis Kelamin (2025)

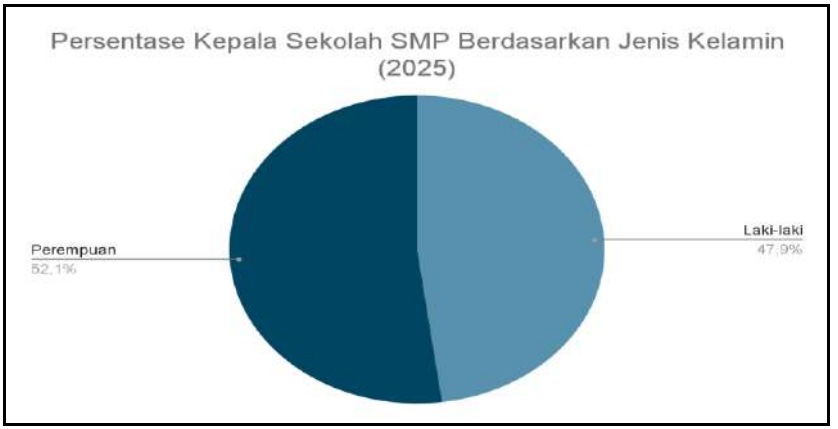
Gambar 4.11. secara visual lebih konkret memberikan gambaran mengenai perbandingan jumlah persentase kepala seklah SD berdasarkan jenis kelamin. Sejalan dengan dominasi guru SD seperti sub bab sebelumnya, dominasi kepala sekolah SD perempuan juga erat kaitannya dengan stereotipe serupa. Hal ini mengingat usia siswa SD berada di kisaran 7-13 tahun atau dalam klasifikasi usia anak-anak dan transisi remaja. Sehingga pendekatan ideal yakni kesabaran, ketelitian, dan ketelatenan dalam membentuk karakter anak dilekatkan pada perempuan.

Berbeda dengan Tabel 4.16., Tabel 4.17 memberikan sajian data mengenai jumlah kepala sekolah SMP menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024. Tabel 4.15. menyertakan jumlah kepala sekolah berdasarkan kategori jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Denpasar, jumlah kepala sekolah SMP menyentuh angka 94 kepala sekolah, didominasi oleh perempuan yakni 49 kepala sekolah dan 45 kepala sekolah laki-laki. Apabila dilihat dari jenjang pendidikan, maka jumlah terendah berada pada jenjang pendidikan kurang dari S1 karena tidak ada sama sekali. Sedangkan jumlah kepala sekolah tertinggi berada pada jenjang S1 yakni 60 kepala sekolah dengan komposisi 28 perempuan dan 32 laki-laki. Sedangkan kepala sekolah dengan jenjang pendidikan lebih dari S1 berjumlah 36 dengan komposisi 21 perempuan dan 15 laki-laki.

Tabel 4.18 Jumlah Kepala Sekolah SMP menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025

Jenjang Pendidikan	Tahun 2025	
	Laki-laki	Perempuan
<S1	-	-
S1	32	28
>S1	15	21
Jumlah	45	49

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2025



Gambar 4.12 Persentase Kepala Sekolah SMP berdasarkan Jenis Kelamin (2025)

Gambar 4.12. memberikan bayangan konkret mengenai perbandingan persentase jumlah kepala sekolah SMP berdsarkan jenis kelamin. Berbeda dengan asumsi umum mengenai dominasi kepemimpinan laki-laki, data pada jenjang ini justru menunjukkan komposisi yang relatif berimbang antara kepala sekolah laki-laki dan perempuan, dengan selisih yang sangat tipis (45 laki-laki dan 49 perempuan). Kondisi ini mengindikasikan bahwa

pada tingkat SMP tidak terdapat dominasi yang benar-benar kuat dari salah satu jenis kelamin, melainkan kecenderungan menuju distribusi yang lebih setara. Jika dikontekstualisasikan dengan dinamika perkembangan siswa usia 13–15 tahun yang telah melewati fase pembentukan karakter dasar, maka kebutuhan terhadap figur kepemimpinan tidak lagi terikat pada stereotipe tertentu seperti pendekatan “keibuan”. Namun demikian, keberadaan selisih tipis ini tetap menarik untuk dikaji karena dapat mencerminkan pergeseran sekaligus resistensi terhadap konstruksi sosial yang selama ini melekat pada peran gender dalam kepemimpinan pendidikan. Struktur patriarki yang masih berpengaruh memungkinkan adanya bias dalam persepsi maupun praktik rekrutmen, meskipun tidak lagi tampak dominan secara kuantitatif. Oleh karena itu, data ini tidak hanya menunjukkan keseimbangan numerik, tetapi juga membuka ruang analisis mengenai sejauh mana kesetaraan gender benar-benar terwujud dalam praktik kepemimpinan pendidikan.

Tabel 4.19 Jumlah Kepala SMA (Negeri dan Swasta) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kota	< S1		S1 Sederajat		>S1		Total
		L	P	L	P	L	P	
1	Denpasar	0	0	6	4	17	10	37
2	Provinsi Bali	1	0	34	16	82	20	153

Sumber :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali
2. Data Pokok Pendidikan (Data Kemdikbud https://datadik.kemdikbud.go.id/)
3. Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Bali
4. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali
5. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Berdasarkan Tabel 4.19, jumlah kepala SMA negeri dan swasta di Kota Denpasar sebanyak 37 orang. Sebagian besar kepala sekolah telah memiliki kualifikasi pendidikan di atas Strata 1 (>S1), yaitu 27 orang (17 laki-laki dan 10 perempuan), sedangkan 10 orang berkualifikasi S1 sederajat (6 laki-laki dan 4 perempuan). Tidak terdapat kepala sekolah yang memiliki kualifikasi pendidikan di bawah S1.

Pada tingkat Provinsi Bali, terdapat 153 kepala SMA yang terdiri atas 102 orang berkualifikasi >S1, 50 orang berkualifikasi S1 sederajat, dan hanya 1 orang yang memiliki kualifikasi di bawah S1. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas kepala SMA di Bali telah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kualitas akademik kepala SMA di Kota Denpasar maupun Provinsi Bali tergolong sangat baik, karena seluruh kepala SMA di Denpasar dan hampir seluruh kepala SMA di Bali telah memenuhi bahkan melampaui kualifikasi pendidikan minimal S1. Dominasi kepala sekolah dengan kualifikasi pascasarjana (>S1) mencerminkan

tingginya kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pendidikan menengah. Selain itu, keterwakilan kepala sekolah perempuan juga terlihat cukup baik, terutama pada kelompok kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi.

4.7. Guru yang Tersertifikasi

Guru merupakan elemen kunci dalam menentukan kualitas pendidikan, sehingga upaya peningkatan profesionalitasnya menjadi suatu keharusan dalam sistem pendidikan. Sebagai tenaga pendidik, guru dituntut memiliki seperangkat kompetensi yang mencakup aspek pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guna menjalankan peran secara optimal. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menempatkan guru sebagai profesi yang memiliki standar dan tanggung jawab setara dengan profesi lain. Untuk mendukung penguatan profesionalitas tersebut, pemerintah mengatur mekanisme sertifikasi melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 sebagai instrumen penilaian terhadap kelayakan kompetensi guru. Dengan demikian, kepemilikan sertifikat profesi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas dan profesionalitas seorang guru.

Sertifikasi tidak dapat dipahami sekadar sebagai sarana peningkatan kesejahteraan melalui tambahan penghasilan, melainkan sebagai bentuk pengakuan formal atas kompetensi dan integritas profesi guru. Pengakuan ini mencerminkan kapasitas keilmuan, kualitas praktik pembelajaran, serta kontribusi nyata dalam dunia pendidikan. Apabila fungsi sertifikasi dijalankan secara

konsisten dan objektif, maka peningkatan jumlah guru bersertifikat berpotensi mendorong perbaikan mutu pendidikan secara lebih terukur. Namun demikian, efektivitasnya tetap bergantung pada bagaimana sertifikasi diiringi dengan pengawasan, pengembangan kompetensi berkelanjutan, serta komitmen profesional dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Pada Tabel 4.20 merupakan data bersumber dari Dinas Pendidikan Kota Denpasar mengenai Jumlah Guru SD yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar. Total jumlah guru SD tersertifikasi berjumlah 1.526 guru berdasarkan 21 klasifikasi bidang studi. Apabila ditelisik berdasarkan jenis kelamin, maka jumlah guru tersertifikasi didominasi oleh guru berjenis kelamin perempuan yaitu 1.075 guru. Sedangkan guru tersertifikasi berjenis kelamin laki-laki berjumlah yakni hanya 451 guru.

Apabila dilihat berdasarkan bidang studi, maka tiga bidang studi dengan guru tersertifikasi paling tinggi adalah Guru Kelas SD, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, dan Pendidikan Agama Hindu. Guru Kelas SD berjumlah 839 guru dengan 640 diantaranya berjenis kelamin perempuan dan 199 lainnya berjenis kelamin laki-laki. Bidang studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan berjumlah 127 guru dengan dominasi dari guru laki-laki yaitu 102 guru dan 25 lainnya guru perempuan. Sedangkan, pada Pendidikan Agama Hindu berjumlah 112 guru, di mana 90 guru perempuan dan 32 guru laki-laki. Adapun bidang studi tanpa guru tersertifikasi hanya kewirausahaan.

Tabel 4.20 Jumlah Guru SD yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025

Bidang Studi Sertifikasi	Tahun 2025	
	Laki-laki	Perempuan
Bahasa dan Sastra Bali	11	26
Bahasa Inggris	19	79
Bahasa Jepang	0	2
Bimbingan dan Konseling (Konselor)	1	5
Ekonomi	1	14
Guru Kelas SD/MI	199	640
Kependidikan Dasar	1	5
Kewirausahaan	0	0
Lainnya	44	111
Matematika	7	36
Muatan Lokal Bahasa Daerah	4	6
Pendidikan Agama Budha	5	3
Pendidikan Agama Hindu	32	80
Pendidikan Agama Islam	16	30
Pendidikan Agama Katholik	1	3
Pendidikan Agama Kong hu chu	3	3
Pendidikan Agama Kristen	2	1
Bimbingan dan Konseling (Konselor)	1	5
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	102	25
Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn)	1	0
Seni Budaya	1	1
Jumlah	451	1.075

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2025



Gambar 4.13 Persentase Guru SD yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025

Gambar 4.13. memberikan visual konkret mengenai perbandingan jumlah guru SD tersertifikasi dengan didominasi sebesar 70.5% oleh guru perempuan. Selain data guru SD tersertifikasi Kota Denpasar melalui Dinas Pendidikan turut memiliki data guru SMP tersertifikasi pada tahun 2025. Berdasarkan Tabel 4.16. Jumlah Guru SMP yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025, terdapat 26 bidang studi sertifikasi dengan total jumlah guru mencapai 728 guru. Dari total jumlah tersebut, di dominasi oleh guru perempuan dengan total jumlah 465 guru dan 263 lainnya adalah guru laki-laki. Apabila ditelisik berdasarkan bidang studi, maka tiga bidang dengan jumlah guru tersertifikasi tertinggi adalah Matematika, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan

Alam. nariknya, dominasi guru perempuan terjadi pada ketiga ranah tersebut.

Bidang studi dengan jumlah guru tersertifikasi tertinggi pertama adalah matematika yakni 83 guru tersertifikasi. 43 dari total 99 guru tersebut adalah perempuan dan 40 lainnya laki-laki. Bahasa Indonesia menjadi salah satu bidang studi dengan guru tersertifikasi tertinggi yakni sejumlah 81 guru. Dari total 81 guru, 57 diantaranya berjenis kelamin perempuan dan 24 lainnya laki-laki. Pada posisi ketiga ditempati oleh bidang studi IPA dengan total 73 guru, 48 diantaranya adalah perempuan dan 25 lainnya laki-laki. Adapun bidang studi dengan jumlah guru tersertifikasi paling rendah adalah Bahasa Perancis yakni 0 guru.



Tabel 4. 21 Jumlah Guru SMP yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025

Bidang Studi Sertifikasi	Tahun 2025	
	Laki-laki	Perempuan
Bahasa Bali	6	8
Bahasa Indonesia	24	57
Bahasa Inggris	7	44
Bahasa Prancis	0	0
Bimbingan dan Konseling (Konselor)	6	38
Fisika	4	4
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	25	48
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	10	35
Keterampilan	1	2
KKPI	1	1
Matematika	40	43
Muatan Lokal Bahasa Daerah	8	7
Pendidikan Agama Budha	2	1
Pendidikan Agama Hindu	7	31
Pendidikan Agama Islam	7	5
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	23	46
Pendidikan Agama Katholik	0	1
Pendidikan Agama Kong hu chu	0	3
Pendidikan Agama Kristen Protestan	0	1
Pendidikan Biologi	4	20
Pendidikan Ekonomi	3	19
Pendidikan Jasmani (OR dan kesehatan)	41	5
Sejarah	5	3
Seni Budaya	15	18
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	9	5
Lainnya	15	20
Jumlah	263	465

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2025

BAB V
KESEHATAN

World Health Organization mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan individu menjalani kehidupan produktif dalam masyarakat (WHO, 2020). Dalam kerangka pembangunan, kesehatan menjadi salah satu indikator utama dalam Indeks Pembangunan Manusia selain pendidikan dan pendapatan (UNDP, 2022). Kondisi tubuh yang sehat menjadi fondasi bagi individu untuk beraktivitas secara optimal, sehingga standar kesehatan yang belum terpenuhi kerap dipersepsikan sebagai lemahnya komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan data statistik kesehatan menjadi instrumen penting untuk membaca dinamika kondisi kesehatan sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia sejak fase paling awal kehidupan.

Keragaman geografis dan sosial di Indonesia menghadirkan tantangan yang kompleks dalam pemerataan layanan kesehatan. Tingginya jumlah penduduk, ketimpangan akses terhadap pangan dan layanan dasar, serta perbedaan praktik sosial-budaya turut membentuk disparitas kualitas kesehatan antarwilayah (Badan Pusat Statistik, 2023). Di sejumlah daerah, keterbatasan fasilitas kesehatan masih berdampak pada tingginya risiko kehamilan, angka kematian bayi, serta kasus malnutrisi. Situasi ini menegaskan pentingnya intervensi kesehatan yang dimulai sejak masa kehamilan hingga kelahiran sebagai

fase krusial dalam siklus kehidupan manusia. Kelahiran menjadi titik awal pencatatan kehidupan individu, sehingga analisis kondisi kesehatan masyarakat dapat diawali dari indikator kelahiran bayi. Selanjutnya, pemahaman tersebut perlu dilengkapi dengan data terkait imunisasi, ketersediaan fasilitas kesehatan, serta indikator kesehatan lainnya untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Dalam konteks Denpasar, pemantauan tren kesehatan secara berkelanjutan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan tepat sasaran.

5.1. Angka Kelahiran Bayi

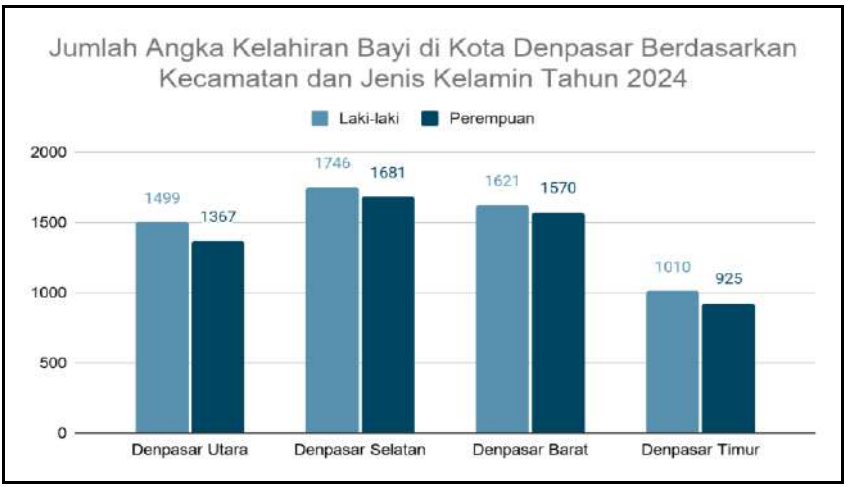
Angka kelahiran bayi merupakan salah satu indikator demografi yang digunakan untuk mengukur dinamika pertumbuhan penduduk melalui jumlah kelahiran hidup dalam periode tertentu. Salah satu ukuran yang umum digunakan adalah Crude Birth Rate (CBR), yaitu jumlah kelahiran hidup dalam satu tahun per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun. Di Denpasar, pendataan kelahiran bayi dilakukan secara rutin setiap tahun oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dengan pengelompokan data berdasarkan wilayah kecamatan (Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Selatan, dan Denpasar Utara) serta berdasarkan jenis kelamin bayi. Klasifikasi ini memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai distribusi kelahiran, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan pelayanan kesehatan yang lebih terarah dan responsif sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5. 1 Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 dan 2025

No	Kecamatan	2024		2025	
		L	P	L	P
1.	Denpasar Utara	1499	1367	1360	1285
2.	Denpasar Selatan	1746	1681	1666	1656
3.	Denpasar Barat	1621	1570	1576	1613
4.	Denpasar Timur	1010	925	915	858
Jumlah		**5876**	**5543**	**5517**	**5412**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2025

Tabel 5.1. tentang Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar berdasarkan jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan terjadinya penurunan. Gambar 5.1. dan 5.2. di bawah menunjukkan jumlah angka kelahiran bayi di Kota Denpasar pada tahun 2023 dan 2024 dalam bentuk grafik.



Gambar 5.1 Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Gambar 5.2 Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

Dari tabel dan grafik di atas, data kuantitatif menunjukkan bahwa secara akumulatif kelahiran bayi laki-laki dan perempuan pada tahun 2024 berjumlah 11.419 jiwa mengalami penurunan di tahun berikutnya menjadi 10.929 jiwa atau terjadi penurunan jumlah kelahiran sebesar 490. Penurunan terjadi pada kelahiran bayi laki-laki sebesar 359 dari tahun sebelumnya. Sedangkan kelahiran pada bayi perempuan mengalami penurunan sebesar 131 dari tahun sebelumnya.

Melalui Tabel 5.1. juga dapat dilihat kelahiran terendah pada tahun 2024 berturut-turut terjadi di Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Utara, Denpasar Barat dan Denpasar Selatan memiliki jumlah kelahiran yang paling tinggi. Jumlah kelahiran bayi di Kecamatan Denpasar Timur pada tahun 2025 yaitu sebanyak 1.773 bayi menurun dari tahun sebelumnya. Sedangkan di Kecamatan Denpasar Selatan yang memiliki jumlah kelahiran bayi tertinggi pada tahun 2025 yaitu sebanyak 3.322 bayi menurun dibandingkan dengan tahun 2024 dan sebagai kecamatan yang mengalami penurunan angka kelahiran tertinggi dari tahun sebelumnya.

Penurunan angka kelahiran pada tahun 2024 tidak dapat dipahami semata sebagai fenomena demografis, melainkan sebagai refleksi dari transformasi struktural dalam sistem sosial, ekonomi, dan kultural. Secara global, tren ini menunjukkan kelanjutan dari transisi demografi menuju tingkat fertilitas rendah, yang dipengaruhi oleh meningkatnya biaya hidup, ketidakpastian ekonomi, serta bergesernya makna anak dalam keluarga modern. Dalam konteks ini, reproduksi tidak lagi dipandang sebagai kewajiban sosial, melainkan sebagai pilihan rasional yang melibatkan kalkulasi ekonomi dan kesiapan psikososial.

Minimnya dukungan struktural negara dalam menjamin kesejahteraan keluarga turut memperkuat kecenderungan individu untuk menunda atau bahkan menghindari memiliki anak.

Di sisi lain, peningkatan akses terhadap kontrasepsi dan menguatnya agensi perempuan dalam menentukan pilihan hidup turut berkontribusi pada penurunan fertilitas. Fenomena ini beriringan dengan pergeseran nilai menuju individualisasi, di mana pilihan seperti childfree semakin diterima sebagai bagian dari gaya hidup modern. Dalam konteks Kota Denpasar, dinamika urbanisasi, tekanan ekonomi kawasan pariwisata, serta perubahan struktur keluarga memperkuat tren tersebut. Oleh karena itu, penurunan angka kelahiran perlu dibaca secara kritis sebagai hasil interaksi antara faktor struktural dan kultural, sekaligus sebagai indikator perubahan mendasar dalam cara masyarakat memaknai keluarga, reproduksi, dan masa depan.

Tabel 5. 2 Proporsi Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun yang pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam 2 Tahun Terakhir Tidak di Fasilitasi Kesehatan (MTF) di Kota Denpasar

Denpasar - Bali	2025
Kota Denpasar	0
Provinsi Bali	0

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Berdasarkan Tabel 5.2, proporsi perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir namun tidak di

fasilitas kesehatan di Kota Denpasar tahun 2025 tercatat sebesar 0%. Angka yang sama juga ditunjukkan pada tingkat Provinsi Bali, yaitu sebesar 0%. Data tersebut menunjukkan bahwa seluruh proses persalinan pada kelompok tersebut telah dilakukan di fasilitas kesehatan.

Kondisi ini mencerminkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kota Denpasar maupun Provinsi Bali yang sudah sangat baik. Tingginya pemanfaatan fasilitas kesehatan saat persalinan menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan ibu dan bayi, serta dukungan pemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, capaian ini juga menjadi indikator positif dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan penurunan risiko kematian ibu maupun bayi.

5.2. Angka Kelahiran Balita

Balita merupakan fase perkembangan anak pada rentang usia 12–59 bulan yang sering disebut sebagai periode emas (golden age), karena pada tahap ini terjadi akselerasi signifikan dalam pertumbuhan otak, fisik, serta kapasitas kognitif. Pada fase ini, intervensi kesehatan tidak dapat dipahami secara sempit sebagai layanan medis semata, melainkan sebagai upaya komprehensif yang mencakup pemenuhan gizi, akses terhadap imunisasi, sistem rujukan yang responsif, pemantauan tumbuh kembang, hingga rehabilitasi bagi anak dengan kondisi khusus. Selain itu, kualitas pengasuhan, stimulasi perkembangan, serta lingkungan yang aman dan sehat menjadi faktor kunci yang secara simultan membentuk fondasi awal kehidupan anak. Dengan demikian,

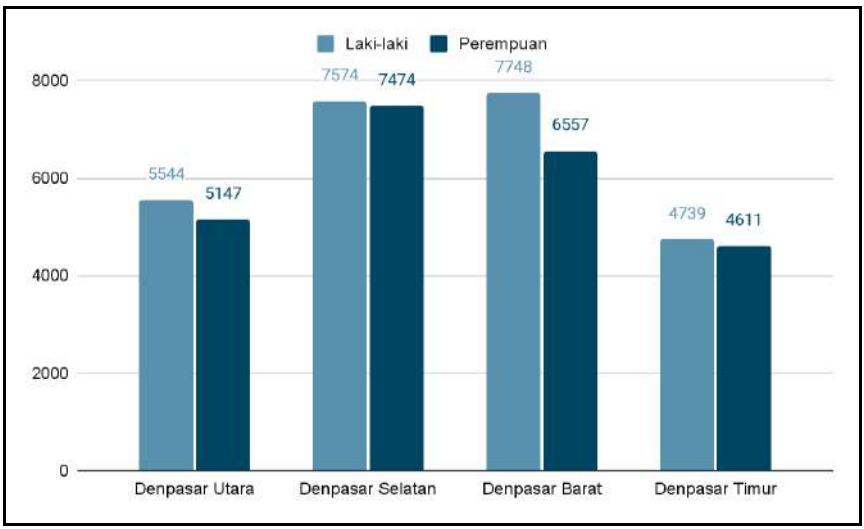
kesehatan balita merupakan hasil dari interaksi multidimensional antara aspek biologis, sosial, dan institusional.

Tumbuh kembang anak tidak dapat dilepaskan dari konteks struktural yang melingkupinya, termasuk kondisi ekonomi keluarga, nilai sosial-budaya, serta akses terhadap sumber daya. Masa balita menjadi periode krusial dalam pembentukan kemampuan bahasa, kreativitas, kesadaran sosial, emosi, hingga dasar kepribadian, yang akan menentukan kualitas individu di masa depan. Oleh karena itu, kegagalan dalam mendeteksi dan menangani gangguan perkembangan sejak dini berpotensi menghasilkan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, penyediaan data yang komprehensif dan terpilah menjadi sangat penting sebagai basis perumusan kebijakan. Upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam menghimpun data terkait kondisi balita berdasarkan wilayah dan jenis kelamin, sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.2, dapat dibaca sebagai langkah strategis, meskipun tetap perlu dikritisi sejauh mana data tersebut mampu merepresentasikan kompleksitas persoalan anak secara utuh.

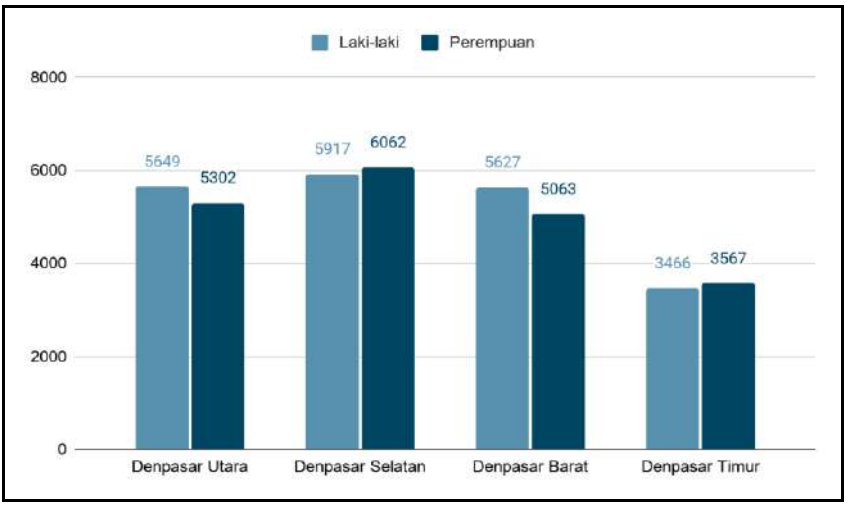
Tabel 5. 3 Jumlah Angka Kelahiran Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 dan 2025

No	Kecamatan	2024		2025	
		L	P	L	P
1.	Denpasar Utara	5544	5147	5649	5302
2.	Denpasar Selatan	7574	7474	5917	6062
3.	Denpasar Barat	7748	6557	5627	5063
4.	Denpasar Timur	4739	4611	3466	3567
Jumlah		**25605**	**23789**	**20659**	**19994**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2025



Gambar 5.3 Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Gambar 5.4 Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

Dari data tabel dan grafik di atas, dapat dilihat jumlah balita (laki-laki dan perempuan) pada tahun 2024 berjumlah 49.394 balita dan pada tahun 2025 berjumlah 40.656 balita. Dengan kata lain, terjadi penurunan jumlah balita di Kota Denpasar pada tahun 2025 sejumlah 8.738 balita. Sejalan dengan angka kelahiran bayi, jumlah balita dengan jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Pada tahun 2024, jumlah balita laki-laki 25.605 balita dan perempuan 23.789 balita. Sedangkan pada tahun 2025 jumlah balita laki-laki 20.659 balita dan perempuan 19.994 balita.

Penurunan atau berkurangnya jumlah balita didominasi oleh Kecamatan Denpasar Barat yakni penurunan sebesar 3.615 balita. Kemudian disusul oleh Kecamatan Denpasar Selatan yakni penurunan sebesar 3.069 balita. Dan terakhir Kecamatan Denpasar Timur

yakni penurunan sebesar 2.317 balita. Menariknya, Kecamatan Denpasar Utara mengalami peningkatan satu-satunya dibandingkan tiga kecamatan lain yakni sebesar 260 balita.

Penurunan jumlah balita di Kota Denpasar pada tahun 2024 memiliki keterkaitan erat dengan tren penurunan angka kelahiran bayi dalam beberapa tahun terakhir. Secara logis, berkurangnya jumlah kelahiran akan berdampak langsung pada penurunan populasi balita. Namun demikian, pembacaan terhadap data ini tidak dapat berhenti pada penjelasan demografis semata, melainkan perlu ditelusuri lebih lanjut melalui analisis yang lebih mendalam dan kontekstual.

Penting untuk membedakan sumber penurunan tersebut: apakah disebabkan oleh menurunnya angka kelahiran dan mobilitas penduduk, atau justru berkaitan dengan meningkatnya angka kematian balita. Jika faktor pertama yang dominan, maka hal tersebut masih berada dalam batas wajar dinamika demografi. Namun, apabila penurunan berkorelasi dengan mortalitas, maka ini menjadi sinyal serius yang menuntut intervensi kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan investigasi komprehensif guna mengidentifikasi faktor risiko serta merumuskan langkah preventif demi menjamin kesehatan ibu hamil, janin, dan keberlangsungan kualitas generasi mendatang.

5.3. ASI Eksklusif

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif di Indonesia telah diatur secara normatif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa bayi berhak memperoleh ASI sejak lahir hingga usia enam

bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain, kecuali untuk kepentingan medis seperti obat, vitamin, dan mineral. Setelah periode tersebut, pemberian ASI tetap dilanjutkan hingga usia dua tahun dengan didampingi Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas gizi. Secara fisiologis, kontribusi ASI terhadap kebutuhan energi bayi masih sangat signifikan, yakni sekitar 65% pada usia 6–8 bulan, 50% pada 9–12 bulan, dan sekitar 20% pada usia 1–2 tahun. Hal ini menegaskan bahwa ASI bukan hanya sumber nutrisi awal, tetapi juga fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal anak.

Meskipun manfaat ASI eksklusif telah banyak dibuktikanbaik dalam meningkatkan imunitas bayi, mendukung perkembangan sel tubuh, maupun memberikan manfaat kesehatan bagi ibu seperti menurunkan risiko kanker payudara dan ovarium implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Keberhasilan pemberian ASI sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis ibu, dukungan keluarga terutama suami, serta lingkungan kerja yang ramah terhadap perempuan menyusui. Dalam konteks yang lebih luas, isu ASI eksklusif juga berkaitan erat dengan upaya pencegahan stunting, sehingga menjadi perhatian penting dalam kebijakan kesehatan publik. Oleh karena itu, komitmen pemerintah tidak hanya diperlukan dalam bentuk regulasi, tetapi juga melalui penguatan sistem pendataan, edukasi, dan intervensi yang responsif guna memastikan setiap bayi memperoleh haknya atas ASI secara optimal.

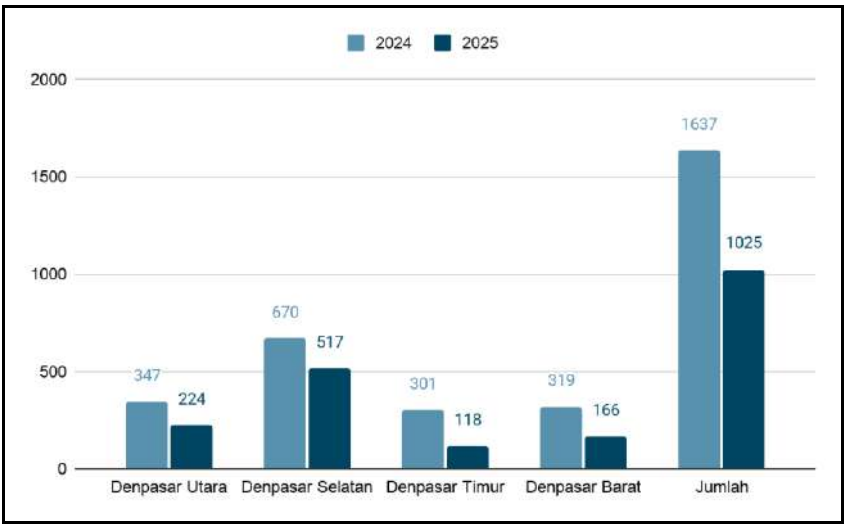
Untuk mengetahui bagaimana pemberian ASI eksklusif di Kota Denpasar dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 5. 4 ASI Eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2024 dan 2025

No	Kecamatan	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Denpasar Utara	347	224
2.	Denpasar Selatan	670	517
3.	Denpasar Timur	301	118
4.	Denpasar Barat	319	166
Jumlah		**1637**	**1025**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2025

Data di atas memperlihatkan secara kuantitatif ASI eksklusif dari tahun 2024 hingga 2025 terjadi penurunan. Secara keseluruhan, pemberian ASI Eksklusif di Kota Denpasar mengalami penurunan dari 1.637 menjadi 1.025. Apabila diperhatikan berdasarkan wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki jumlah pemberian ASI tertinggi pada tahun 2025 yakni 517. Sebaliknya, Kecamatan Denpasar Barat memiliki jumlah pemberian ASI terendah pada tahun 2025 yakni 166.



Gambar 5.5. ASI Eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2024 dan 2025

Penurunan kasus pemberian ASI eksklusif di Kota Denpasar, khususnya di wilayah Denpasar Barat, secara probabilistik dapat dikaitkan dengan meningkatnya hambatan struktural yang dihadapi ibu menyusui, terutama dalam konteks transisi dari ranah domestik ke ranah publik (pekerjaan). Sejumlah studi menunjukkan bahwa kembalinya ibu bekerja setelah cuti melahirkan merupakan salah satu faktor paling signifikan yang memengaruhi keberlanjutan pemberian ASI eksklusif, terutama ketika tidak diimbangi dengan dukungan kebijakan tempat kerja yang memadai (World Health Organization; UNICEF). Keterbatasan fasilitas ruang laktasi, kurangnya fleksibilitas waktu kerja, serta beban kerja yang tinggi menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi praktik menyusui, sehingga meningkatkan

kemungkinan ibu menghentikan ASI eksklusif sebelum waktu yang direkomendasikan.

Penurunan ini juga mengindikasikan bahwa keberhasilan program ASI eksklusif tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengetahuan individu, tetapi sangat bergantung pada dukungan sistem sosial yang lebih luas. Studi global menunjukkan bahwa keberhasilan menyusui sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga, tenaga kesehatan, serta kebijakan pemerintah yang implementatif (World Health Organization, UNICEF). Oleh karena itu, secara analitis, penurunan angka ASI eksklusif dapat dipahami sebagai konsekuensi dari lemahnya integrasi antara kesadaran individu dan dukungan struktural. Hal ini menegaskan bahwa intervensi kebijakan perlu diarahkan tidak hanya pada edukasi, tetapi juga pada penciptaan lingkungan sosial dan kerja yang lebih ramah terhadap ibu menyusui guna memastikan keberlanjutan praktik ASI eksklusif.

5.4. Status Gizi

Gizi merupakan fondasi utama dalam menentukan kualitas kesehatan dan pertumbuhan individu, khususnya pada anak. Konsep gizi seimbang tidak hanya merujuk pada kecukupan asupan makanan, tetapi juga pada kesesuaian komposisi zat gizi dengan kebutuhan tubuh berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. Dalam kerangka kebijakan kesehatan di Indonesia, prinsip gizi seimbang dibangun di atas empat pilar utama, yaitu konsumsi pangan beragam dengan proporsi seimbang, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, aktivitas fisik yang teratur, serta pemantauan berat badan secara berkala (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,

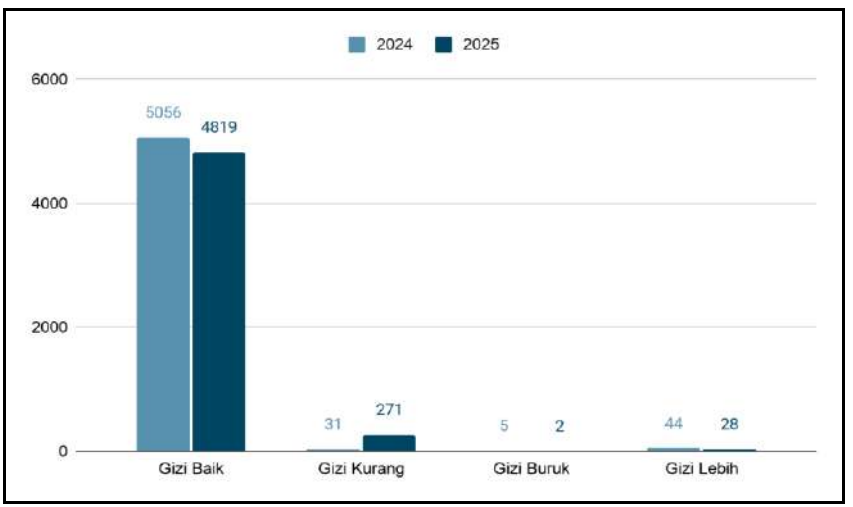
2014). Ketidakseimbangan dalam pola konsumsi dan gaya hidup berpotensi menimbulkan berbagai masalah gizi, baik dalam bentuk kekurangan seperti anemia dan underweight, maupun kelebihan seperti overweight dan obesitas. Dengan demikian, persoalan gizi tidak dapat dipisahkan dari pola hidup dan struktur sosial yang memengaruhi akses terhadap pangan bergizi.

Secara konseptual, status gizi merefleksikan kondisi tubuh sebagai hasil interaksi antara asupan zat gizi dan pemanfaatannya dalam tubuh, yang umumnya diukur melalui indikator antropometri. Organisasi kesehatan global seperti World Health Organization (WHO, 2006) menekankan pentingnya penggunaan standar baku seperti Z-score dalam menilai status gizi anak, termasuk indikator berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Klasifikasi seperti stunting (tinggi badan di bawah standar usia), wasting (penurunan berat badan akut), dan obesitas menjadi parameter penting dalam membaca kualitas tumbuh kembang anak. Dampak jangka panjang dari permasalahan gizi, terutama stunting, tidak hanya bersifat fisik tetapi juga kognitif dan produktivitas di masa depan (UNICEF, 2020). Oleh karena itu, data pemantauan status gizi, seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar tahun 2025, menjadi instrumen strategis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga harus digunakan secara kritis sebagai dasar intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

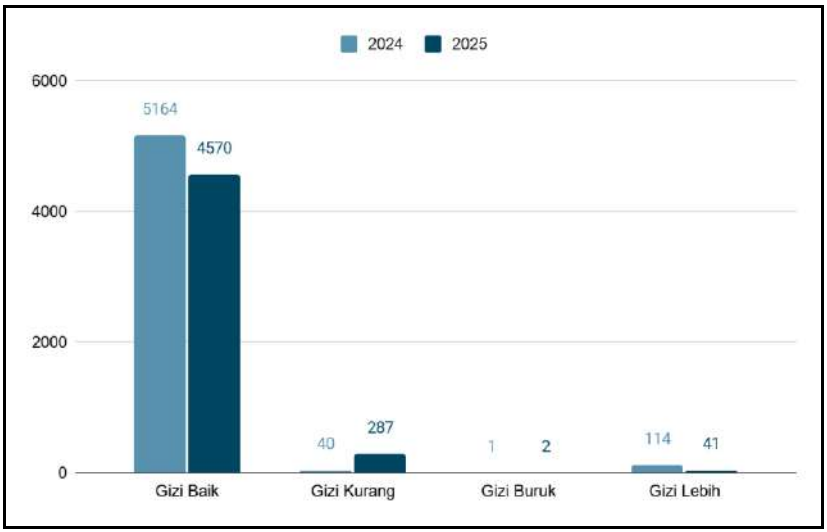
Tabel 5. 5 Status Gizi di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025

No	Kecamatan	Status Gizi	2024	2025
1.	Denpasar Utara	Gizi Baik	5056	4819
		Gizi Kurang	31	271
		Gizi Buruk	5	2
		Gizi Lebih	44	28
2.	Denpasar Selatan	Gizi Baik	5164	4570
		Gizi Kurang	40	287
		Gizi Buruk	1	2
		Gizi Lebih	114	41
3.	Denpasar Barat	Gizi Baik	3648	356
		Gizi Kurang	83	1
		Gizi Buruk	4	54
		Gizi Lebih	103	112
4.	Denpasar Timur	Gizi Baik	3940	3531
		Gizi Kurang	31	18
		Gizi Buruk	2	8
		Gizi Lebih	104	96

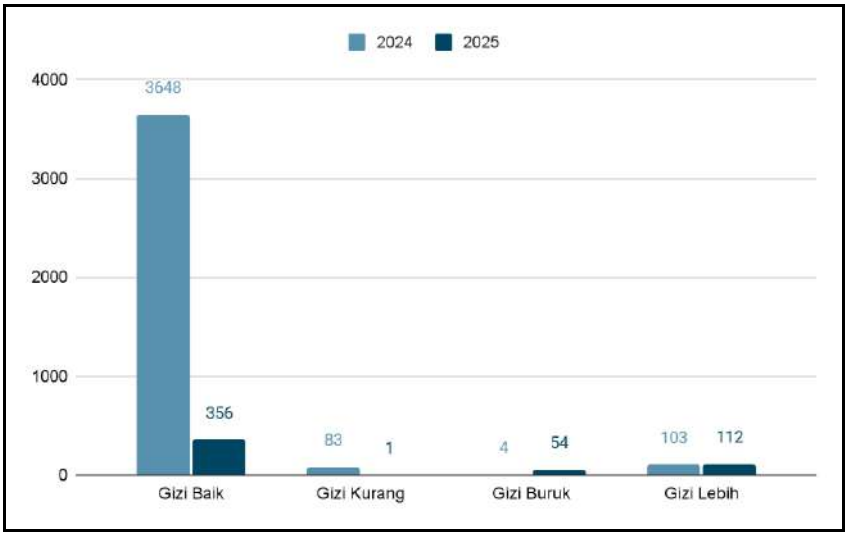
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2025



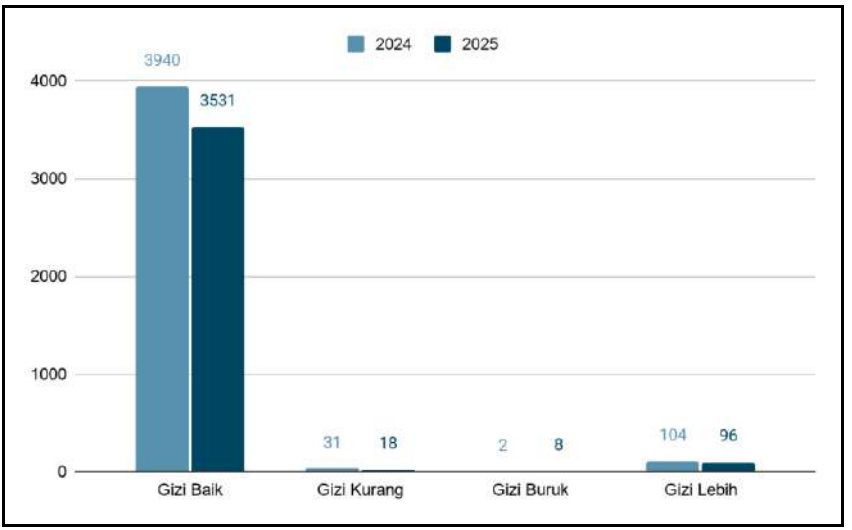
Gambar 5.6 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024 dan 2025



Gambar 5.7 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2024 dan 2025



Gambar 5.8 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2024 dan 2025



Gambar 5.9 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2024 dan 2025

Berdasarkan data statistic pada tabel dan grafik tentang Status Gizi di Kota Denpasar tahun 2024 dan 2025, mengarahkan pemahaman bahwa jumlah status gizi baik mengalami penurunan di seluruh wilayah. Penurunan tertinggi berada di Kecamatan Denpasar Barat yakni sejumlah 3.292 kasus. Sedangkan penurunan terendah beada di Kecamatan Denpasar Utara yakni 237 kasus. Adapun dalam konteks gizi kurang terjadi peningkatan di Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Selatan sebesar 240 kasus dan 247 kasus. Sedangkan untuk kategori gizi kurang di Denpasar Barat dan Denpasar Timur mengalami penurunan sebesar 82 kasus dan 13 kasus.

Dalam kategori gizi buruk, terjadi penurunan hanya di Denpasar Utara yakni 3 kasus. Sedangkan, Denapsar Selatan, Denpasar Barat, dan Denpasar Timur mengalami

peningkatan secara berturut-turut sebesar 1 kasus, 50 kasus, dan 6 kasus. Adapun gizi lebih mengalami peningkatan hanya pada Denpasar Barat yakni 9 kasus. Sedangkan pada Denpasar Utara, Denpasar Selatan, dan Denpasar Timur mengalami penurunan secara berturut-turut sebesar 16 kasus, 73 kasus, dan 8 kasus.

Permasalahan gizi yang paling krusial terletak pada tiga spektrum utama, yaitu gizi kurang, gizi buruk, dan gizi lebih, yang sama-sama merepresentasikan ketidak seimbangan asupan dan kebutuhan nutrisi. Gizi kurang dan gizi buruk umumnya berakar pada defisit makronutrien maupun mikronutrien yang berdampak langsung pada gangguan pertumbuhan anak, seperti berat badan rendah, stunting, hingga gagal tumbuh. Namun, keduanya memiliki derajat keparahan yang berbeda; gizi kurang cenderung menghambat perkembangan secara bertahap, sementara gizi buruk telah memasuki fase klinis serius seperti kwashiorkor dan marasmus yang mengancam keselamatan jiwa (World Health Organization, 2020). Jika ditelaah lebih dalam, persoalan ini tidak semata disebabkan oleh kurangnya asupan makanan, tetapi juga berkaitan erat dengan rendahnya literasi gizi orang tua, ketimpangan sosial-ekonomi, buruknya sanitasi, serta adanya penyakit penyerta. Dengan demikian, masalah gizi kurang dan gizi buruk mencerminkan kegagalan sistemik dalam menjamin distribusi sumber daya dan layanan kesehatan yang merata.

Di sisi lain, gizi lebih menunjukkan paradoks dalam sistem pangan modern, di mana kelebihan konsumsi energi (sering kali berasal dari makanan tinggi gula, garam, dan lemak) tidak diimbangi dengan kebutuhan

tubuh, sehingga memicu obesitas dan berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, dan gangguan kardiovaskular (World Health Organization, 2021). Fenomena ini menandakan bahwa persoalan gizi tidak lagi hanya terkait kekurangan, tetapi juga kelebihan yang sama-sama berisiko tinggi. Dalam konteks ini, intervensi pemerintah tidak cukup hanya bersifat kuratif, melainkan harus mencakup pendekatan preventif dan promotif yang menyasar pola konsumsi, edukasi gizi, serta regulasi sistem pangan. Tanpa upaya yang komprehensif, individu dengan status gizi tidak seimbang akan terus berada dalam kondisi rentan, terutama karena sistem imun yang lemah membuat mereka lebih mudah mengalami komplikasi penyakit dan hambatan dalam tumbuh kembang optimal.

5.5. Pojok ASI

Pojok ASI atau ruang laktasi merupakan fasilitas yang dirancang untuk mendukung aktivitas menyusui, baik secara langsung maupun melalui kegiatan memerah, menyimpan ASI, hingga dalam beberapa kasus menyediakan layanan edukasi dan pendampingan bagi ibu menyusui (Susilowati et al., 2021). Keberadaan fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik, tetapi juga merepresentasikan keberpihakan institusi terhadap pemenuhan hak kesehatan ibu dan anak. Dalam konteks yang lebih luas, ruang ASI menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana ruang kerja dan ruang publik mampu menciptakan lingkungan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan, khususnya dalam menjaga keberlanjutan praktik ASI eksklusif tanpa mengorbankan peran produktif ibu.

Meskipun urgensi pemberian ASI eksklusif telah banyak diakui, ketersediaan ruang laktasi di berbagai sektor masih tergolong terbatas dan belum merata. Kondisi ini berdampak pada kesulitan yang dihadapi ibu bekerja dalam mempertahankan praktik menyusui, terutama akibat keterbatasan waktu, tekanan kerja, serta minimnya fasilitas yang memadai. Sebagai bentuk respons kebijakan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 guna mendorong penyediaan fasilitas menyusui di tempat kerja dan ruang publik. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih perlu dievaluasi secara kritis, terutama terkait konsistensi penerapan di lapangan. Oleh karena itu, data pada Tabel 5.5 mengenai jumlah Pojok ASI di Kota Denpasar menjadi penting tidak hanya sebagai informasi kuantitatif, tetapi juga sebagai dasar untuk menilai efektivitas kebijakan dalam menjamin akses ibu terhadap fasilitas menyusui yang layak.

Tabel 5. 6 Pojok ASI di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025

No	Instansi	Tahun	
		2024	2025
1	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	1	1
2	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	1	1
3	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	1	1
4	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat	1	1
5	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat	1	1
6	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur	1	1
7	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur	1	1
8	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	1	1
9	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	1	1
10	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	1	1
11	UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	1	1
12	Dikes Kota Denpasar	1	1
Jumlah		12	12

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 5.5, jumlah Pojok ASI di Kota Denpasar tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu 2023 hingga 2024, yakni tetap berjumlah 12 unit. Seluruh unit tersebut tersebar di masing-masing UPTD Puskesmas, yang berarti setiap Puskesmas telah memiliki

satu fasilitas ruang laktasi. Secara kuantitatif, kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan Pojok ASI pada fasilitas layanan kesehatan dasar telah memenuhi standar minimal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013.

Jika ditelaah secara lebih kritis, capaian tersebut masih terbatas pada sektor layanan kesehatan dan belum mencerminkan pemerataan akses di ruang publik yang lebih luas. Ketersediaan Pojok ASI di instansi pemerintah non-kesehatan, sektor swasta, maupun fasilitas umum lainnya masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Hal ini penting mengingat implementasi kebijakan menyusui di lingkungan kerja, khususnya sektor swasta, kerap menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya regulasi internal, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas pendukung, serta alokasi anggaran yang belum prioritas. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong perluasan implementasi kebijakan secara lintas sektor dan memastikan kepatuhan institusi, terutama pada instansi besar. Data yang lebih komprehensif akan menjadi instrumen penting untuk menilai secara riil tingkat komitmen dan keberpihakan berbagai institusi terhadap pemenuhan hak ibu menyusui dan investasi kesehatan generasi mendatang.

5.6. Cakupan Imunisasi Pada Bayi

Pencegahan stunting tidak dapat dilepaskan dari intervensi kesehatan dasar, salah satunya melalui imunisasi. Secara konseptual, imunisasi merupakan upaya untuk membangun kekebalan tubuh secara aktif terhadap penyakit tertentu dengan cara merangsang sistem imun agar mampu mengenali dan melawan

patogen. Kekebalan yang terbentuk bersifat spesifik, sehingga hanya memberikan perlindungan terhadap penyakit yang ditargetkan, namun tetap berperan penting dalam menurunkan risiko keparahan penyakit dan komplikasi jangka panjang. Dalam konteks ini, imunisasi tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan individual, tetapi juga sebagai strategi kesehatan publik untuk menjaga kualitas tumbuh kembang anak, termasuk dalam menekan faktor risiko yang berkontribusi terhadap stunting.

Secara programatik, imunisasi dibagi menjadi imunisasi rutin, tambahan, dan khusus, dengan imunisasi rutin sebagai fondasi utama yang diberikan sejak bayi, terutama pada usia di bawah satu tahun. Jenis imunisasi dasar mencakup perlindungan terhadap berbagai penyakit menular seperti hepatitis B, tuberkulosis, polio, difteri, pertusis, tetanus, hingga campak dan rubella. Namun, capaian imunisasi tidak cukup dinilai dari ketersediaan program semata, melainkan perlu dilihat dari tingkat cakupan dan aksesibilitasnya di masyarakat. Data cakupan imunisasi bayi di Kota Denpasar yang bersumber dari Dinas Kesehatan menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan program tersebut. Meski demikian, analisis yang lebih kritis tetap diperlukan untuk mengidentifikasi kesenjangan, baik dari sisi distribusi layanan, kesadaran masyarakat, maupun hambatan struktural yang memengaruhi keberhasilan imunisasi sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.

Tabel 5. 7 Cakupan Imunisasi Pada Bayi di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025

Kecamatan	Bayi Diimunisasi	2024	2025
Denpasar Utara	DPT-HB-Hib3	113,58	99,16
	Polio 4*	114,33	100,26
	Campak / MR	115,16	102,69
	Imunisasi Dasar Lengkap	112,80	99,64
Denpasar Selatan	DPT-HB-Hib3	155,21	87,75
	Polio 4*	160,16	68,36
	Campak / MR	123,56	93,69
	Imunisasi Dasar Lengkap	172,79	100,03
Denpasar Barat	DPT-HB-Hib3	125,62	91,39
	Polio 4*	128,28	95,81
	Campak / MR	98,54	101,14
	Imunisasi Dasar Lengkap	97,17	101,10
Denpasar Timur	DPT-HB-Hib3	101,90	100,18
	Polio 4*	101,73	100,47
	Campak / MR	101,68	101,73
	Imunisasi Dasar Lengkap	100,36	98,58
Jumlah		**1922,87**	**1541.98**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat cakupan imunisasi bayi di Kota Denpasar tahun 2025 mengalami penurunan. Jika dilihat secara keseluruhan selisih tahun 2025 dan 2024 menyentuh angka 380,89. Kecamatan yang mengalami cakupan imunisasi paling menurun ada di Kecamatan Denpasar Selatan sebesar 261,89, disusul Denpasar Barat sebesar 60,17, kemudian Denpasar Utara sebesar 54,12, dan terakhir Denpasar Timur sebesar 4,71.

Menurunnya cakupan imunisasi perlu dipahami secara lebih komprehensif dengan menelusuri berbagai faktor penyebab yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi

juga sosial. Secara umum, hambatan yang sering muncul meliputi keterbatasan informasi dan motivasi dari caregiver, kondisi tempat layanan imunisasi yang kurang nyaman, ketidaksesuaian waktu layanan, keterbatasan tenaga kesehatan, hingga persoalan domestik seperti beban keluarga dan kondisi kesehatan ibu maupun anak (World Health Organization, 2019). Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan imunisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan program, tetapi juga oleh aksesibilitas dan kesiapan sosial rumah tangga dalam memanfaatkan layanan tersebut.

Penurunan cakupan imunisasi juga berkaitan erat dengan ketimpangan gender dalam rumah tangga. Perempuan sering kali memikul beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh utama, yang dalam literatur dikenal sebagai *double burden* (UN Women, 2020). Konstruksi sosial yang menempatkan pekerjaan domestik sebagai tanggung jawab perempuan memperkuat ketimpangan ini, sehingga keterlibatan laki-laki dalam pengasuhan anak, termasuk dalam memastikan imunisasi, menjadi minim. Akibatnya, berbagai aspek penting dalam pemenuhan kesehatan anak dapat terhambat karena terpusat pada satu pihak. Oleh karena itu, upaya peningkatan cakupan imunisasi tidak cukup hanya melalui pendekatan kesehatan, tetapi juga memerlukan intervensi sosial berupa penguatan kesetaraan gender dan peningkatan peran laki-laki dalam pengasuhan sebagai bagian dari strategi kesehatan keluarga.

5.7. Kematian Ibu

Secara keseluruhan, tren Angka Kematian Ibu di Kota Denpasar selama periode 2022–2025 berfluktuasi. Meskipun sempat mengalami penurunan yang sangat baik pada tahun 2023, peningkatan kembali pada tahun 2024 dan masih tingginya angka pada tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu, deteksi dini risiko kehamilan, serta penanganan komplikasi persalinan perlu terus diperkuat untuk menekan angka kematian ibu secara berkelanjutan.

Tabel 5. 8 Jumlah Angka Kematian Ibu Maternal di Kota Denpasar Tahun 2022- 2025

No	Tahun	Angka Kematian Ibu
1	2022	103,19
2	2023	49,64
3	2024	123,2
4	2025	118,09

Sumber: Dinas Kesehatan Denpasar, 2025

5.8. Angka Harapan Hidup

Secara umum, angka harapan hidup digunakan sebagai indikator kualitas kesehatan masyarakat dan menjadi salah satu komponen utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka harapan hidup (AHH) Kota Denpasar pada tahun 2022-2025 mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2025 sebesar 76,49 tahun. Angka ini meningkat dibanding tahun 2024 yang berada di angka 75,80 tahun.

Tabel 5. 9 Jumlah Angka Harapan Hidup di Kota Denpasar 2021-2024

No	Tahun	Angka Harapan Hidup
1	2022	75,30
2	2023	75,59
3	2024	75,80
4	2025	76,16

Sumber: Dinas Kesehatan Denpasar, 2025

5.9. Jumlah Dokter Umum dan Dokter Spesialis

Sumber daya manusia kesehatan merupakan elemen fundamental dalam menentukan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan. Dalam hal ini, dokter umum memegang peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan tingkat pertama, mulai dari penanganan awal, penegakan diagnosis, hingga penentuan rujukan ke layanan spesialis. Keberadaan dokter umum yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, menjadi prasyarat penting untuk menjamin pelayanan yang merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tanpa distribusi tenaga medis yang seimbang, kualitas layanan kesehatan berpotensi timpang, terutama di tengah meningkatnya kompleksitas kebutuhan kesehatan masyarakat.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, kebutuhan akan dokter umum juga terus mengalami peningkatan. Dalam konteks ini, analisis tidak hanya perlu berfokus pada jumlah, tetapi juga pada distribusi dan karakteristik tenaga kesehatan, termasuk berdasarkan jenis kelamin. Data tahun 2024 dan 2025 yang menunjukkan tidak adanya perubahan jumlah dokter

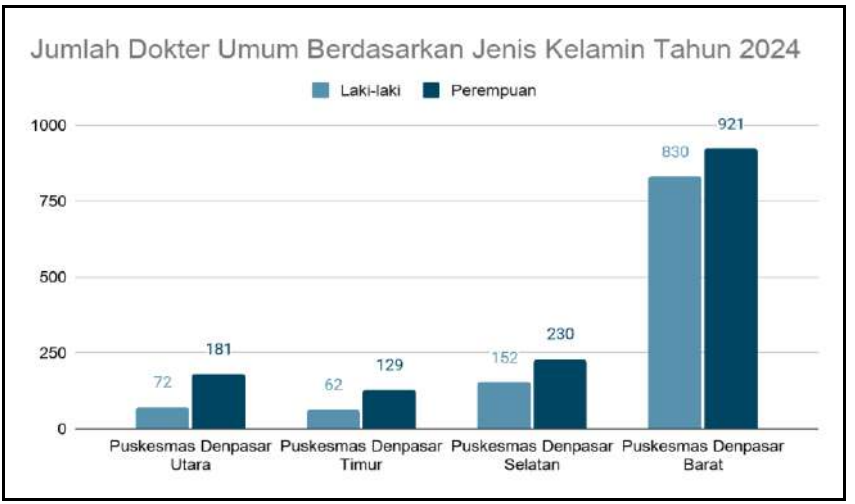
umum di Kota Denpasar mengindikasikan stagnasi dalam pemenuhan tenaga medis. Kondisi ini perlu dikritisi lebih lanjut, mengingat stagnasi tersebut berpotensi tidak sebanding dengan peningkatan kebutuhan layanan kesehatan. Oleh karena itu, pemetaan yang lebih komprehensif menjadi penting untuk menilai apakah ketersediaan dokter umum saat ini telah mencerminkan prinsip pemerataan dan keadilan dalam akses layanan kesehatan.

Dilihat dari Tabel 5.9., jumlah dokter umum mengalami penurunan sebesar 248 dokter. Jumlah dokter laki-laki dan perempuan mengalami penurunan dalam satu tahun terakhir ini. Dapat dilihat juga kecamatan dengan jumlah dokter terbanyak berada di Puskesmas Denpasar Barat 1.337 dokter. Sedangkan Puskesmas Denpasar Timur memiliki jumlah dokter paling rendah yakni 234 dokter. Data menarik juga terlihat dari sebaran dokter umum berdasarkan jenis kelamin di seluruh puskesmas, jumlah dokter perempuan tercata lebih sedikit dibandingkan dokter laki-laki.

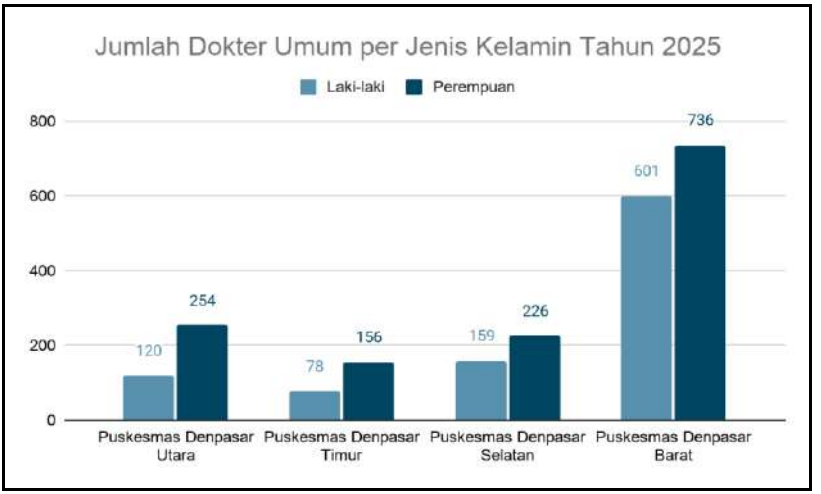
Tabel 5. 10 Jumlah Dokter Umum menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025

No	Tempat Tugas	Dokter Umum					
		2024			2025		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Puskesmas Denpasar Utara	72	181	253	120	254	374
2	Puskesmas Denpasar Timur	62	129	192	78	156	234
3	Puskesmas Denpasar Selatan	152	230	382	159	226	385
4	Puskesmas Denpasar Barat	830	921	1751	601	736	1337
Jumlah		**1116**	**1461**	**2578**	**958**	**1372**	**2330**

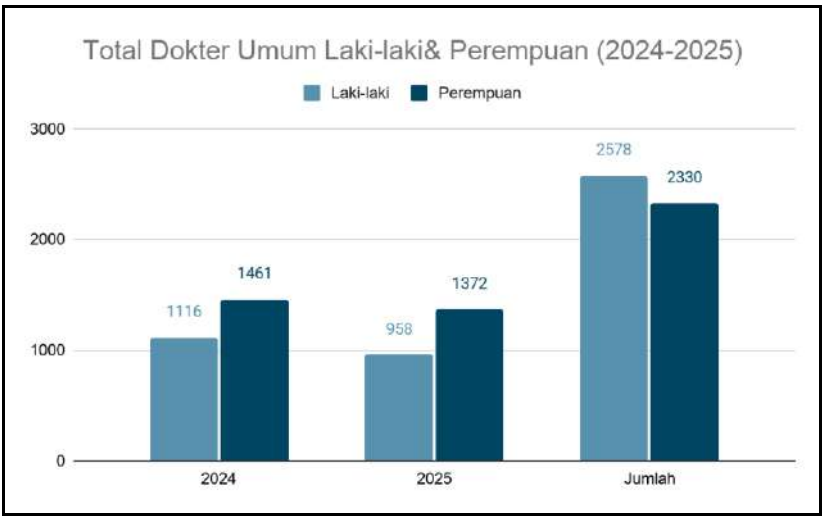
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2025



Gambar 5.10 Jumlah Dokter Umum berdasarkan Jenis Kelamin pada Masing-Masing Puskesmas Tahun 2024



Gambar 5.11 Jumlah Dokter Umum berdasarkan Jenis Kelamin pada Masing-Masing Puskesmas Tahun 2025



Gambar 5.12 Jumlah Dokter Umum Laki-laki & Perempuan pada Puskesmas di Kota Denpasar (2024-2025)

Dominasi jumlah dokter umum laki-laki menunjukkan adanya ketimpangan representasi gender dalam tenaga kesehatan yang tidak dapat dipandang sebagai fenomena netral. Kondisi ini berpotensi merefleksikan hambatan struktural yang masih dihadapi perempuan dalam mengakses dan mempertahankan profesi medis, seperti beban ganda domestik, keterbatasan fleksibilitas kerja, hingga bias institusional dalam pengembangan karier. Padahal, dalam konteks pelayanan kesehatan, keberagaman gender memiliki implikasi penting, terutama dalam membangun relasi yang sensitif terhadap kebutuhan pasien, termasuk isu kesehatan reproduksi dan kenyamanan pasien perempuan. Dengan demikian, dominasi laki-laki tidak hanya berkaitan dengan angka, tetapi juga menyangkut

kualitas dan inklusivitas layanan kesehatan yang diberikan.

Di sisi lain, ketimpangan ini juga dapat mengindikasikan belum optimalnya kebijakan afirmatif dalam mendorong partisipasi dan keberlanjutan karier perempuan di sektor kesehatan. Minimnya dukungan terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi (work-life balance), seperti fasilitas penitipan anak, cuti melahirkan yang memadai, serta lingkungan kerja yang ramah gender, dapat menjadi faktor penghambat bagi perempuan untuk tetap bertahan dalam profesi ini. Jika tidak diintervensi, kondisi ini berisiko memperkuat reproduksi ketimpangan gender dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih progresif dan sensitif gender untuk memastikan bahwa distribusi tenaga kesehatan tidak hanya merata secara geografis, tetapi juga adil secara sosial.

Tabel 5. 11 Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat dan Bidan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025

No	Tempat Tugas	Dokter Spesialis		Dokter Umum		Dokter Gigi		Perawat		Bidan	Jml
		L	P	L	P	L	P	L	P	P	
1	Puskesmas Denpasar Utara	0	0	6	24	4	11	3	20	18	86
2	Puskesmas Denpasar Timur	0	1	5	7	2	10	7	19	31	82
3	Puskesmas Denpasar Selatan	0	0	16	30	3	17	7	34	39	146
4	Puskesmas Denpasar Barat	0	0	4	13	3	7	3	18	25	73
Sub Total 1		**0**	**1**	**31**	**74**	**12**	**45**	**20**	**91**	**113**	**387**
1	RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah	59	61	471	511	1	7	290	740	126	2266
2	RS Umum Daerah Wangaya	45	31	20	27	2	11	94	249	97	576
3	RS TK. II Udayana	41	21	10	11	0	2	27	123	67	302
4	RS Umum Manuaba	10	6	3	3	0	2	0	12	4	40
5	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	3	4	3	10	0	0	28	79	0	127
6	RS Umum Surya Husadha	60	29	15	20	2	3	37	173	22	361
7	RS Umum Bali Royal	60	44	14	33	3	4	48	158	31	395
8	RS Umum Kasih Ibu	59	31	8	16	2	4	17	73	16	226
9	RS Umum Dharma Yadnya	29	12	10	16	0	2	9	40	13	131
10	RS Umum Puri Raharja	55	26	10	20	0	3	26	130	21	291
11	RS Umum Bhakti Rahayu	30	22	11	21		1	6	28	17	136
12	RS Gigi dan Mulut Saraswati Denpasar	2	1	2	2	11	39	1	6	0	64
13	RS Umum Prima Medika	72	38	25	25	3	1	32	124	50	370
14	RS BaliMed	79	48	17	30	1	4	43	158	24	404
15	RS Ibu dan Anak Puri Bunda	50	25	5	17	0	0	6	85	66	254
16	RS Bhayangkara Denpasar	27	20	11	20	3	9	34	73	33	230
17	RS Umum Surya Husadha	30	21	11	21	1	4	27	90	15	220
18	RS Khusus Ibu dan Anak Pucuk Permata Hati	9	3	0	5	0	0	2	13	14	46
19	RS Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali	35	37	11	25	3	10	148	293	92	654
20	RS Khusus Mata Ramata	8	14	2	2	0	0	7	41	0	74
21	RS Ibu dan Anak Bunda Denpasar	22	18	6	12	1	6	10	42	10	127
22	RS Khusus Bedah Dharma Usadha Sidhi	5	5	3	1	0	0	0	3	3	20
23	RS Ibu dan Anak Bali Royal	23	29	7	10	0	3	6	70	26	174
24	RS Bali International Hospital	20	20	9	8	1	2	27	73	13	173
Sub Total 2		**833**	**566**	**684**	**866**	**34**	**117**	**925**	**2876**	**760**	**7661**
JUMLAH TOTAL (Sub Total 1 dan 2)		**833**	**567**	**715**	**940**	**46**	**162**	**945**	**2967**	**873**	**8048**

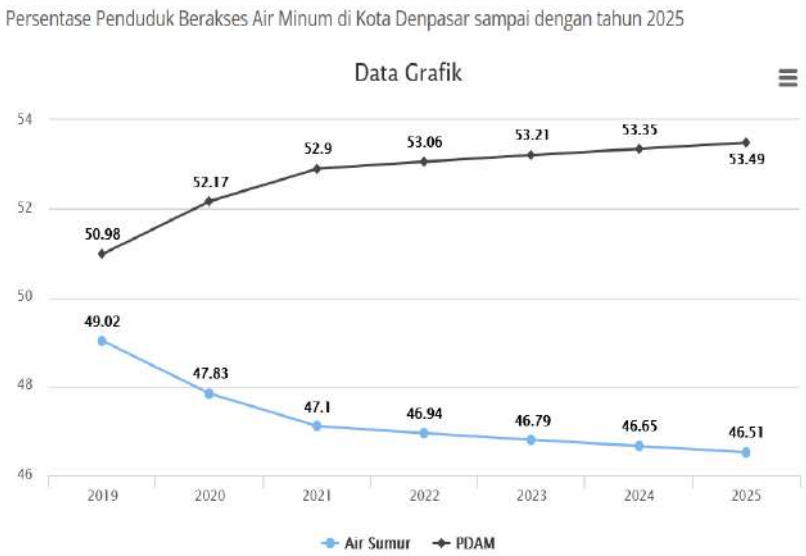
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2025

Dari Tabel 5.11. dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan tenaga kesehatan yang ada di Kota Denpasar untuk Tahun 2025 berjumlah 8.048 orang yang terbagi menjadi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, dan bidan. Dari jumlah tersebut, tenaga kesehatan yang paling banyak berasal dari perawat yakni 3.912 dimana secara keseluruhan didominasi oleh 75.8 persen perempuan dan 24.1 persen perawat laki-laki. Kategori ke-dua terbanyak adalah dokter umum yakni 1.665 dokter dengan bagian 43.2 persen dokter umum laki-laki dan 56.8 persen dokter umum perempuan. Kategori selanjutnya berasal dari dokter spesialis yakni 1.400 dengan pembagian 59.5 persen laki-laki dan 40.5 persen dokter spesialis perempuan. Kategori tenaga kesehatan selanjutnya yaitu bidan yakni 873 orang dimana seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Kategori tenaga kesehatan dengan jumlah terendah adalah dokter gigi yakni 208 dokter, didominasi oleh dokter perempuan yaitu sebesar 77.8 persen dan 22.1 persen sisanya adalah laki-laki.

Jika dilihat berdasarkan tempat tugasnya, maka RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah memiliki tenaga kesehatan terbanyak yakni 2.266 orang yang mayoritas terdiri dari 63.7 persen perempuan dan 36.2 persen laki-laki. Di samping itu, RS Khusus Bedah Dharma Usadha Sidhi justru menjadi fasilitas kesehatan dengan jumlah tenaga kesehatan terendah yakni sebanyak 20 orang yang terdiri dari 40 persen laki-laki dan 60 persen perempuan. Jika dilihat berdasarkan kategori, maka dokter spesialis di dominasi oleh laki-laki sedangkan dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan didominasi oleh perempuan.

Ditinjau dari akses air minum, terlihat adanya perubahan pola akses air minum masyarakat dari penggunaan air sumur menuju layanan PDAM. Akses air minum melalui PDAM mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahun. Pada tahun 2019 persentasenya sebesar 50,98%, kemudian meningkat menjadi 52,17% pada 2020, dan terus naik hingga mencapai 53,49% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan air perpipaan/PDAM sebagai sumber air minum utama.

Sebaliknya, penggunaan air sumur mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2019 persentasenya sebesar 49,02%, turun menjadi 47,83% pada 2020, lalu terus menurun hingga mencapai 46,51% pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan berkurangnya ketergantungan masyarakat terhadap sumber air tanah atau sumur.



Sumber:https://dota.denpasarkota.go.id/?domain=dota.denpasarkota go.id&page=Data-List-Denpasar

Gambar 5.13 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Denpasar Tahun 2019-2025

Secara keseluruhan, grafik memperlihatkan bahwa masyarakat Kota Denpasar semakin beralih ke layanan PDAM karena dianggap lebih praktis, aman, dan memiliki kualitas air yang lebih terjamin dibandingkan penggunaan air sumur. Tren ini juga dapat mencerminkan peningkatan infrastruktur penyediaan air bersih oleh pemerintah daerah hingga tahun 2025.

BAB VI
EKONOMI

Ekonomi memiliki peran penting sebagai dasar dalam mengatur pemanfaatan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan dan keinginan, baik pada tingkat individu maupun masyarakat secara luas. Hal ini berkaitan erat dengan upaya dalam mempertahankan serta meningkatkan kualitas hidup. Kondisi perekonomian Indonesia umumnya diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB), di mana peningkatan PDB mencerminkan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat yang sejalan dengan pertumbuhan pendapatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan PDB Indonesia pada periode 2023 hingga 2025 menunjukkan pola yang sempat mengalami penurunan dan kemudian kembali meningkat. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi 5,05%, kemudian mengalami penurunan menjadi 5,03% pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 5,11%. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika konsumsi rumah tangga sebagai salah satu komponen utama dalam pembentukan PDB.

Konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh individu maupun keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, hingga hiburan. Tingkat konsumsi sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang dimiliki. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar pula kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan

keinginan tersebut. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Ketimpangan ekonomi berbasis gender masih menjadi permasalahan yang berlangsung hingga saat ini, bahkan telah terjadi sejak sebelum Indonesia merdeka dan juga ditemukan di berbagai negara lain. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti norma sosial dan budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan lebih diarahkan pada peran domestik. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja juga menjadi penyebab, di mana perempuan sering kali memiliki peluang yang lebih terbatas dibandingkan laki-laki.

Perbedaan akses tersebut berdampak pada kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan cenderung bekerja di sektor informal atau pada pekerjaan dengan tingkat upah yang relatif lebih rendah. Bahkan dalam kondisi pekerjaan, jabatan, kualifikasi, dan wilayah kerja yang sama, masih terdapat perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan yang dikenal sebagai *gender pay gap*. Kesenjangan ini juga dipengaruhi oleh adanya beban ganda yang dihadapi perempuan, yaitu menjalankan peran domestik sekaligus bekerja, sehingga dapat menghambat perkembangan karier mereka.

Selain itu, diskriminasi dan stereotip gender juga masih sering terjadi, seperti anggapan bahwa perempuan kurang kompeten dalam bidang tertentu. Sebagai contoh, laki-laki yang bersikap tegas sering dianggap memiliki jiwa kepemimpinan, sedangkan perempuan dengan sikap yang sama justru dinilai emosional. Meskipun demikian, seiring

perkembangan zaman, peran perempuan dalam perekonomian semakin meningkat. Banyak perempuan yang tidak hanya berperan sebagai pendukung, tetapi juga menjadi penopang utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Komposisi penduduk yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan menunjukkan pentingnya pemberdayaan masyarakat berbasis potensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam konteks ini, perempuan yang masih menghadapi berbagai bentuk ketimpangan diharapkan dapat terus meningkatkan peran ekonominya, baik dalam memenuhi kebutuhan pribadi maupun dalam mendukung perekonomian keluarga.

Kesadaran terhadap pentingnya kesetaraan gender juga semakin berkembang, sehingga perempuan dan laki-laki diharapkan dapat memiliki peran yang setara dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Perempuan tidak hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga berkontribusi dalam kegiatan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Upaya mewujudkan kesetaraan gender tentunya memerlukan dukungan dari pemerintah melalui kebijakan dan program yang berfokus pada peningkatan kapasitas perempuan. Pemerintah telah mengimplementasikan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai upaya untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyelenggarakan berbagai program pelatihan guna meningkatkan keterampilan perempuan.

Di tingkat daerah, Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali juga menunjukkan komitmennya terhadap kesetaraan gender. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan berbasis gender. Pemerintah Kota Denpasar juga aktif menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pemberdayaan perempuan guna meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi.

Sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi kebijakan tersebut, diperlukan adanya data yang menggambarkan kondisi pembangunan ekonomi, termasuk penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan pendapatan masyarakat. Data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesetaraan gender dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, khususnya di Kota Denpasar, sehingga upaya peningkatan kesetaraan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.

6.1 Kegiatan Utama Penduduk

Kota Denpasar merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, serta pariwisata di Provinsi Bali. Sebagai pusat aktivitas tersebut, Kota Denpasar mampu menyediakan berbagai peluang kerja bagi masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, secara administratif Kota Denpasar terdiri atas 4 kecamatan, 16 kelurahan, dan 27 desa, dengan jumlah penduduk di tahun 2025 mencapai 676.300 jiwa serta luas wilayah 125,97 km^2. Kepadatan penduduk di wilayah ini tercatat sebesar 23.000 jiwa/km^2.

Jumlah penduduk yang besar berpotensi menimbulkan persaingan dalam memperoleh pekerjaan apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Selain berasal dari dalam Kota Denpasar, pencari kerja juga datang dari berbagai kabupaten di Bali maupun dari luar daerah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi ini semakin meningkatkan tingkat persaingan di pasar tenaga kerja.

Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan dituntut untuk memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai agar mampu bersaing dalam memperoleh pekerjaan. Di sisi lain, peluang kerja tidak hanya terbatas pada sektor formal atau perusahaan, tetapi juga dapat dilakukan melalui kegiatan wirausaha. Dengan membangun usaha sendiri, masyarakat tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan ekonominya, tetapi juga berpotensi membuka lapangan kerja bagi orang lain. Hal ini turut didukung oleh tingginya tingkat konsumsi masyarakat di Kota Denpasar.

6.2 Penduduk Usia 15-59 Tahun Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk pada pertengahan tahun mengalami kenaikan dari sekitar 278 ribu jiwa pada tahun 2023 menjadi 281 ribu jiwa pada tahun 2024 serta kembali meningkat pada tahun 2025, yaitu 284 ribu jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut memberikan dampak ganda, baik sebagai peluang maupun tantangan dalam pembangunan. Dari sisi peluang, peningkatan jumlah penduduk berkaitan dengan

adanya potensi bonus demografi, yaitu kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif (15–59 tahun) lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia nonproduktif (0–14 tahun dan 60 tahun ke atas). Kondisi ini dapat menjadi keuntungan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dimanfaatkan secara optimal.

Namun demikian, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah ketimpangan distribusi penduduk yang dapat berdampak pada ketidakmerataan pembangunan ekonomi. Penduduk usia produktif cenderung berpindah dan mencari pekerjaan di wilayah perkotaan, sehingga pertumbuhan ekonomi lebih terpusat di kota-kota besar. Salah satu contohnya dapat dilihat di Kota Denpasar, yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan menarik banyak tenaga kerja dari berbagai daerah. Berikut disajikan tabel mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kota Denpasar pada tahun 2024 dan 2025.

Tabel 6. 1 Jumlah Penduduk Usia Produktif (0-60 Tahun+) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 (ribu orang)

Kelompok Umur	Tahun 2024 (ribu orang)			Tahun 2025 (ribu orang)		
	Laki-laki	Perem-puan	Jumlah	Laki-laki	Perem-puan	Jumlah
0-14 Tahun	78,95	75,32	154,27	78,67	75,16	153,83
15-59 Tahun	257,75	253,74	511,49	258,75	254,36	513,11
60 Tahun +	44,99	44,83	89,82	47,73	47,84	95,57
Jumlah	**381,69**	**373,89**	**755,58**	**385,15**	**377,36**	**762,51**

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, komposisi penduduk di Kota Denpasar terbagi menjadi tiga kelompok umur, yaitu 0–14 tahun, 15–59 tahun, dan 60 tahun ke atas. Pada periode 2024 hingga 2025, jumlah penduduk usia 0–14 tahun mengalami sedikit penurunan, dari 154,27 ribu jiwa menjadi 153,83 ribu jiwa. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan melambatnya pertumbuhan pada kelompok usia anak. Sebaliknya, kelompok usia 15–59 tahun yang termasuk kategori usia produktif mengalami peningkatan, dari 511,49 ribu jiwa pada tahun 2024 menjadi 513,11 ribu jiwa pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan adanya dinamika penduduk, seperti urbanisasi dan migrasi masuk, mengingat Denpasar memiliki daya tarik sebagai pusat ekonomi, pemerintahan, dan pariwisata.

Pada kelompok usia 60 tahun ke atas, juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 89,82 ribu jiwa menjadi 95,57 ribu jiwa. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam aspek kesehatan, yang berdampak pada meningkatnya usia harapan hidup. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pada kelompok usia produktif tahun 2025, jumlah laki-laki (258,75 ribu jiwa) sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan (254,36 ribu jiwa). Hal ini menunjukkan bahwa komposisi tenaga kerja masih relatif seimbang, meskipun terdapat selisih kecil yang tidak terlalu signifikan. Secara umum, jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan usia non-produktif menunjukkan adanya potensi bonus demografi di Kota Denpasar. Kondisi ini dapat memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi, karena tingginya jumlah penduduk usia kerja mampu meningkatkan produktivitas serta

menekan beban ketergantungan terhadap kelompok usia non-produktif.

6.3 Kegiatan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas

Kelompok usia produktif, yaitu penduduk berusia 18 tahun ke atas, memiliki beragam aktivitas. Pada rentang usia ini, kegiatan yang dilakukan meliputi bekerja, menganggur, bersekolah, mengurus rumah tangga, serta aktivitas lainnya. Berikut disajikan tabel mengenai penduduk usia 18 tahun ke atas berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan dan jenis kelamin di Kota Denpasar tahun 2024 dan 2025.

Tabel 6. 2 Penduduk Usia 18 Tahun Keatas Menurut Kegiatan yang Dilakukan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025 (orang)

Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Bekerja	234.267	176.775	411.042	241.836	184.800	426.636
Pengangguran	4.681	4.171	8.852	3.987	2.118	6.105
Sekolah	30.316	25.368	55.684	27.415	28.001	55.416
Mengurus Rumah Tangga	26.615	85.950	112.565	26.382	81.234	107.616
Lainnya	7.345	6.830	14.175	7.358	6.573	13.931
Jumlah	**303.224**	**229.094**	**602.318**	**306.978**	**302.726**	**609.704**

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data di atas, aktivitas penduduk usia 18 tahun ke atas di Kota Denpasar didominasi oleh kegiatan bekerja. Pada tahun 2025, jumlah penduduk yang bekerja meningkat dibandingkan tahun 2024, dari 411.042 orang menjadi 426.636 orang. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami peningkatan jumlah pekerja, yang mencerminkan keterlibatan tenaga kerja yang semakin luas dan inklusif.

Di sisi lain, jumlah pengangguran mengalami penurunan cukup signifikan, dari 8.852 orang pada tahun 2024 menjadi 6.105 orang pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan serta meningkatnya kesempatan kerja di Kota Denpasar. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih aktif dalam mencari atau terlibat dalam kegiatan produktif.

Untuk kegiatan lainnya, jumlah penduduk yang masih bersekolah relatif stabil, yaitu dari 55.684 orang pada tahun 2024 menjadi 55.416 orang pada tahun 2025. Sementara itu, penduduk yang mengurus rumah tangga mengalami penurunan dari 112.565 orang menjadi 107.616 orang. Penurunan ini dapat diartikan sebagai adanya pergeseran sebagian penduduk ke aktivitas lain, terutama ke sektor pekerjaan. Kegiatan lainnya di luar kategori utama juga sedikit menurun dari 14.175 orang menjadi 13.931 orang.

Secara keseluruhan, kondisi ini menggambarkan adanya perbaikan struktur ketenagakerjaan di Kota Denpasar, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah

penduduk bekerja dan menurunnya angka pengangguran. Hal ini menjadi indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, berdasarkan data ketenagakerjaan, jenis pekerjaan penduduk di Kota Denpasar cukup beragam, dengan dominasi pada sektor karyawan swasta. Jumlah pekerja sebagai karyawan swasta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan masih terbukanya peluang kerja di sektor formal. Pekerjaan ini masih didominasi oleh laki-laki, namun jumlah pekerja perempuan juga terus mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan semakin besarnya peran perempuan dalam dunia kerja serta adanya kecenderungan berkurangnya kesenjangan gender dalam kesempatan kerja.

Tabel 6. 3 Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025

No	Pekerjaan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Belum/Tidak Bekerja	72.833	69.590	75.565	71.925
2	Pelajar/Mahasiswa	77.450	70.017	76.677	69.360
3	Pensiunan	5.637	2.503	5.565	2.608
4	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8.968	8.528	8.811	8.418
5	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1.716	93	1.741	95
6	Kepolisian RI (POLRI)	2.306	269	2.323	282
7	Perdagangan	2.004	2.940	1.952	2.894
8	Petani/Pekebunan	1.814	1.363	1.789	1.333

9	Peternak	102	36	99	31
10	Nelayan/Perikanan	525	139	515	135
11	Industri	169	112	162	107
12	Kontruksi	323	67	320	66
13	Transportasi	466	31	453	30
14	Karyawan Swasta	93.778	68.665	95.488	70.703
15	Karyawan Bumn	2.249	1.233	2.217	1.232
16	Karyawan Bumd	515	273	511	270
17	Karyawan Honorer	1.553	1.436	1.551	1.431
18	Buruh Harian Lepas	4.338	2.356	4.340	2.329
19	Buruh Tani/Perkebunan	763	612	725	588
20	Buruh Nelayan/Perikanan	77	11	78	11
21	Buruh Peternakan	20	9	19	10
23	Pembantu Rumah Tangga	15	269	16	266
24	Tukang Cukur	52	5	54	4
25	Tukang Listrik	175	2	166	2
26	Tukang Batu	404	13	393	13
27	Tukang Kayu	514	9	503	9
28	Tukang Sol Sepatu	13	1	13	1
29	Tukang Las/Pandai Besi	108	2	104	2
30	Tukang Jahit	317	846	306	829
31	Pedagang	2.850	6.355	2.830	6.245
32	Perangkat Desa	96	61	94	57
33	Kepala Desa	13	0	10	0
34	Wiraswasta	45.480	26.455	45.699	26.864
35	Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	51	60	50	54

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 6.3, jumlah penduduk di Kota Denpasar menurut status pekerjaan dan jenis kelamin mengalami peningkatan dari tahun 2024 ke 2025. Kategori belum atau tidak bekerja masih tergolong tinggi dan cenderung meningkat pada kedua tahun tersebut, sementara jumlah pelajar atau mahasiswa relatif besar meskipun mengalami sedikit penurunan. Dalam struktur pekerjaan, karyawan swasta menjadi kelompok terbesar dan terus mengalami peningkatan, diikuti oleh wiraswasta yang juga menunjukkan jumlah yang signifikan. Sementara itu, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) cenderung stabil, dan pekerjaan di sektor keamanan seperti TNI dan POLRI masih didominasi oleh laki-laki.

Dilihat dari perbedaan gender, terdapat pola yang cukup jelas dalam pembagian jenis pekerjaan. Laki-laki lebih banyak terlibat dalam pekerjaan teknis dan fisik, seperti konstruksi, transportasi, dan berbagai jenis pekerjaan pertukangan, sedangkan perempuan lebih dominan pada pekerjaan layanan dan perawatan. Pada beberapa profesi seperti dokter dan guru, keterlibatan perempuan juga relatif tinggi. Secara keseluruhan, kondisi ketenagakerjaan di Kota Denpasar menunjukkan dominasi sektor swasta dan informal, disertai peningkatan jumlah tenaga kerja, namun masih menghadapi tantangan berupa tingginya jumlah penduduk yang belum bekerja serta adanya perbedaan distribusi pekerjaan berdasarkan gender.

Tabel 6. 4 Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kota Denpasar Tahun 2024-2025

Kecamatan	Jumlah KWT Tahun 2024-2025
Denpasar Utara	4
Denpasar Timur	3
Denpasar Selatan	3
Denpasar Barat	3
Jumlah	**13**

Sumber : Dinas Pertanian Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 6.4, jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kota Denpasar pada tahun 2024–2025 tercatat sebanyak 13 kelompok yang tersebar di empat kecamatan. Kecamatan Denpasar Utara memiliki jumlah KWT terbanyak yaitu 4 kelompok, sedangkan Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Selatan, dan Denpasar Barat masing-masing memiliki 3 kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan KWT sudah merata di seluruh wilayah Kota Denpasar, meskipun dengan jumlah yang sedikit berbeda.

Data pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan jumlah yang sama, yang berarti tidak terjadi perubahan jumlah Kelompok Wanita Tani dalam periode tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa jumlah KWT di Kota Denpasar cenderung stabil tanpa adanya penambahan maupun pengurangan kelompok. Secara keseluruhan, distribusi KWT di Kota Denpasar tergolong cukup seimbang antar kecamatan, dengan dominasi tipis di Denpasar Utara. Keberadaan kelompok ini mencerminkan partisipasi perempuan dalam sektor pertanian dan kegiatan produktif berbasis komunitas, serta memiliki potensi untuk terus dikembangkan dalam upaya

pemberdayaan perempuan dan peningkatan ketahanan pangan di tingkat lokal.

6.4 Tenaga Penyuluh Pertanian

Penyuluh pertanian kerap dikenal sebagai *agent of change* atau agen perubahan, yang tentu memiliki alasan penting di balik sebutan tersebut. Mereka berperan dalam mendorong serta memfasilitasi perubahan pada perilaku, pengetahuan, dan keterampilan petani, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Kehadiran agen perubahan ini mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan petani serta perkembangan sektor pertanian di Indonesia, khususnya di Kota Denpasar. Dalam pelaksanaannya, penyuluh pertanian memiliki berbagai peran, mulai dari sebagai pendidik, analis, konsultan, hingga organisator. Berikut disajikan tabel mengenai jumlah tenaga penyuluh pertanian berdasarkan jenis kelamin di Kota Denpasar tahun 2024-2025.

Tabel 6. 5 Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 - 2025

No	Kecamatan	No	Nama	Jenis Kelamin
1	Denpasar Utara	1	Luh Ketut Ari Abadi, S.P.	Perempuan
		2	Rully Fitri Sianti Dewi	Perempuan
		3	I Ketut Budiawan, S.P.	Laki-laki
		4	Ni Luh Erna Wati, S.P.	Perempuan
2	Denpasar Timur	1	Ni Wayan Lilis Sukma Dewi	Perempuan
		2	I Made Dwipayasa, S.P.	Laki-laki
		3	Ir. Luh Mas Ayustini	Perempuan
		4	Drh. Putu Gede Eka Dharmana, S.Kh.	Laki-laki

3	Denpasar Selatan	1	Ni Nyoman Trisna Kartika, S.P.	Perempuan
		2	Drh. Man Hetik, S.Kh.	Perempuan
		3	I Komang Adi Widyastama, S.P.	Laki-laki
		4	Muhammad David Hermawan, S.P.	Laki-laki
4	Denpasar Barat	1	Luh Ketut Ayu Sukarmi, S.P.	Perempuan
		2	Drh. Kadek Nancy Marcolina, S.Kh.	Perempuan
		3	Randini Resmi Anitis, S.P.	Perempuan

Sumber : Dinas Pertanian Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 6.5, jumlah tenaga penyuluh pertanian di Kota Denpasar pada tahun 2024–2025 tersebar di empat kecamatan dengan total 15 orang. Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan masing-masing memiliki 4 penyuluh, sedangkan Denpasar Barat memiliki 3 penyuluh. Komposisi ini menunjukkan bahwa distribusi tenaga penyuluh relatif merata di setiap kecamatan, meskipun Denpasar Barat memiliki jumlah sedikit lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya.

Dilihat dari jenis kelamin, tenaga penyuluh pertanian di Kota Denpasar didominasi oleh perempuan. Dari total keseluruhan, jumlah penyuluh perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki di hampir setiap kecamatan. Hal ini mencerminkan peran aktif perempuan dalam kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat lokal. Keterlibatan ini menjadi potensi penting dalam mendukung pengembangan sektor pertanian, khususnya dalam hal pendampingan petani dan pemberdayaan masyarakat di masing-masing wilayah.

6.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator penting dalam bidang ketenagakerjaan. TPAK menunjukkan tingkat keterlibatan penduduk usia produktif, yaitu mereka yang berusia 15 tahun ke atas, dalam kegiatan ekonomi. Angkatan kerja dalam TPAK mencakup individu yang telah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin besar jumlah penduduk usia produktif yang aktif dalam pasar kerja, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Berikut disajikan tabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berdasarkan jenis kelamin di Kota Denpasar tahun 2024 dan 2025.

Tabel 6. 6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Denpasar dan Provinsi Bali Jenis Kelamin (persen)

Denpasar - Bali	Laki – laki	Perempuan
	2025	2025
Kota Denpasar	80,08	61,74
Provinsi Bali	83,84	70,84

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 6.6, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Denpasar tahun 2025 menunjukkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki di Kota Denpasar mencapai 80,08%, sedangkan perempuan sebesar 61,74%. Sementara itu, di tingkat Provinsi Bali, tingkat

partisipasi angkatan kerja laki-laki tercatat lebih tinggi yaitu 83,84%, dan perempuan sebesar 70,84%.

Data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dalam kegiatan ekonomi masih lebih tinggi dibandingkan perempuan, baik di Kota Denpasar maupun di Provinsi Bali. Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Denpasar juga lebih rendah dibandingkan perempuan di tingkat Provinsi Bali. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peran domestik, kesempatan kerja, tingkat pendidikan, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat. Meskipun demikian, tingkat partisipasi perempuan yang telah mencapai lebih dari 60% menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam dunia kerja cukup besar dan memiliki potensi untuk terus meningkat melalui dukungan kebijakan yang mendorong kesetaraan kesempatan kerja.

Tabel 6. 7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025

Jenis Kelamin	2024 (orang)	2025 (orang)
Laki-laki	4.681	3.987
Perempuan	4.171	2.118
Total	**8.852**	**6.105**

Sumber: BPS Denpasar 2025

Tabel 6.7 menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kota Denpasar, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 8.852 orang, sedangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 6.105 orang. Jumlah penduduk ini menunjukkan adanya dinamika perubahan

yang cukup signifikan dalam kurun waktu satu tahun. Data ini menjadi salah satu indikator penting dalam melihat perkembangan struktur demografi serta perencanaan pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja, layanan publik, dan kebijakan sosial.

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2024 jumlah laki-laki tercatat sebanyak 4.681 orang dan perempuan sebanyak 4.171 orang. Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah laki-laki menurun menjadi 3.987 orang dan perempuan menjadi 2.118 orang. Penurunan jumlah ini terjadi pada kedua kelompok, baik laki-laki maupun perempuan. Jika dilihat dari komposisinya, jumlah laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan perempuan pada kedua tahun tersebut, yang menunjukkan bahwa proporsi penduduk laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan dalam struktur penduduk di Kota Denpasar.

6.6 Partisipasi Perempuan di Sektor Swasta

Partisipasi perempuan di sektor swasta menunjukkan peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perempuan terlibat dalam berbagai posisi, seperti menjadi karyawan di perusahaan swasta pada bidang manufaktur, jasa, perdagangan, hingga teknologi. Selain itu, perempuan juga berperan sebagai pemilik atau pendiri usaha (wirausaha), termasuk dalam sektor UMKM yang banyak didominasi oleh perempuan di berbagai daerah. Tidak hanya itu, perempuan juga mulai menempati posisi sebagai manajer dan eksekutif, meskipun masih terdapat ketimpangan gender, terutama pada level pimpinan tertinggi.

Tabel 6. 8 Jumlah Perempuan yang Bekerja di Sektor Swasta Tahun 2024-2025

No	Perempuan yg bekerja di Lembaga Swasta	Tahun	
		2024	2025
1	Karyawan Swasta	68.665	70.703
2	Wiraswasta	26.455	26.864
3	Konsultan	45	46
4	Akuntan	27	28
5	Arsitek	60	61
6	Notaris	116	125
7	Pengacara	58	371
8	Pedagang	6.355	6.245
9	Perancang busana	27	26
10	Seniman	55	55
11	Juru masak	51	50
12	Penata rambut	70	68
13	Penata Rias	113	110
14	Penata Busana	13	12
	Jumlah	**102.110**	**104.764**

Sumber: Discapil Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 6.8, jumlah perempuan yang bekerja di sektor swasta pada tahun 2024 tercatat sebanyak 102.110 orang dan meningkat menjadi 104.764 orang pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan di sektor swasta. Sebagian besar perempuan bekerja sebagai karyawan swasta, dengan jumlah tertinggi dibandingkan jenis pekerjaan lainnya, yaitu 68.665 orang pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 70.703 orang pada tahun 2025. Selain itu, jumlah perempuan yang bekerja sebagai wiraswasta juga cukup besar, yaitu 26.455 orang pada

tahun 2024 dan meningkat menjadi 26.864 orang pada tahun 2025.

Pada beberapa profesi seperti notaris, akuntan, arsitek, dan konsultan, jumlah perempuan relatif kecil namun cenderung mengalami peningkatan. Sementara itu, terdapat beberapa jenis pekerjaan yang mengalami penurunan, seperti pedagang, perancang busana, juru masak, serta penata rambut. Menariknya, terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada profesi pengacara, yang menunjukkan adanya perkembangan partisipasi perempuan dalam bidang hukum. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa sektor swasta masih menjadi pilihan utama bagi perempuan dalam bekerja.

Tabel 6. 9 Persentase Perempuan yang Bekerja di Lembaga Swasta di Kota Denpasar 2025

No	Indikator	Tahun	
		2024	2025
1	Jumlah pekerja Perempuan (kecuali IRT, Pelajar/Mahasiswa, Pensiunan, dan Tidak Bekerja) (orang)	176.775	132.298
2	Jumlah pekerja perempuan sebagai karyawan swasta (orang)	102.105	70.703
Persentase Partisipasi Perempuan yang bekerja di Lembaga Swasta (%)		**57,76**	**53.44**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar , 2025

Berdasarkan Tabel 6.9, jumlah perempuan yang bekerja di Kota Denpasar pada tahun 2024 tercatat sebanyak 176.775 orang, dengan 102.105 orang bekerja di lembaga swasta. Persentase partisipasi perempuan yang bekerja di sektor swasta mencapai 57,76%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan lebih banyak terserap di sektor swasta dibandingkan sektor lainnya. Pada tahun 2025, jumlah pekerja perempuan tercatat sebanyak 132.298 orang, dengan 70.703 orang bekerja di karyawan swasta. Persentase partisipasinya sebesar 53,44%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi penurunan sebesar 4,32%.

Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti berkurangnya kesempatan kerja di sektor swasta, perubahan kondisi ekonomi, serta adanya pergeseran minat perempuan ke sektor lain seperti wirausaha atau sektor informal. Secara umum, meskipun mengalami penurunan, sektor swasta tetap menjadi salah satu pilihan utama bagi perempuan dalam bekerja dan memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan.

Tabel 6. 10 Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kota Denpasar dan Provinsi Bali

Denpasar – Bali	2024
Kota Denpasar	42,01
Provinsi Bali	38,83

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Berdasarkan Tabel 6.10, persentase sumbangan pendapatan perempuan di Kota Denpasar tahun 2024 mencapai 42,01%, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bali yang sebesar 38,83%. Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan di Kota Denpasar memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan rumah tangga maupun perekonomian daerah. Tingginya kontribusi pendapatan perempuan juga mencerminkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan dunia kerja.

Selain itu, capaian Kota Denpasar yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Bali menunjukkan bahwa peluang kerja dan keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi di Kota Denpasar relatif lebih baik. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh tingginya tingkat pendidikan, berkembangnya sektor jasa dan perdagangan, serta meningkatnya kesadaran perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Kontribusi perempuan terhadap pendapatan keluarga juga menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung kesejahteraan rumah tangga dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 6. 11 Persentase Keterlibatan Perempuan Sebagai Tenaga Profesional di Kota Denpasar dan Provinsi Bali (Persen) Tahun 2024

Denpasar – Bali	2024
Kota Denpasar	47,98
Provinsi Bali	47,60

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Berdasarkan Tabel 6.11, persentase keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional di Kota Denpasar

tahun 2024 mencapai 47,98%, sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bali yang sebesar 47,60%. Data tersebut menunjukkan bahwa hampir setengah dari tenaga profesional di Kota Denpasar merupakan perempuan. Tingginya keterlibatan perempuan dalam pekerjaan profesional mencerminkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan serta semakin terbukanya kesempatan kerja bagi perempuan di berbagai bidang pekerjaan.

Selain itu, capaian tersebut menunjukkan bahwa perempuan di Kota Denpasar memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial daerah. Tingkat pendidikan yang semakin baik, akses terhadap dunia kerja, serta meningkatnya kesadaran mengenai kesetaraan gender menjadi faktor yang mendorong keterlibatan perempuan dalam sektor profesional. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa Kota Denpasar memiliki peluang yang cukup baik dalam menciptakan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan di dunia kerja.

6.7 Tenaga Kerja Asing Pendatang

Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan individu yang bukan warga negara Indonesia tetapi bekerja di Indonesia untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk dapat bekerja secara legal, TKA diwajibkan memiliki visa kerja. Kehadiran TKA di Indonesia diharapkan mampu mengisi kekurangan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian profesional yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh tenaga kerja lokal. Selain itu, keberadaan TKA juga diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan

melalui dukungan teknologi serta peningkatan investasi. Berikut disajikan tabel mengenai Tenaga Kerja Asing pendatang berdasarkan jenis kelamin di Kota Denpasar tahun 2024-2025.

Tabel 6. 12 Tenaga Kerja Asing Pendatang Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025

Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
256	165	421

Sumber : Buku Saku Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 6.12, jumlah tenaga kerja asing (TKA) pendatang di Kota Denpasar pada tahun 2024 dan 2025 tercatat sebanyak 421 orang. Dari jumlah tersebut, 256 orang atau sekitar 60,81 persen merupakan tenaga kerja asing laki-laki, sedangkan 165 orang atau sekitar 39,19 persen merupakan tenaga kerja asing perempuan.

Data tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di Kota Denpasar masih didominasi oleh laki-laki. Meskipun demikian, proporsi tenaga kerja asing perempuan juga tergolong cukup besar, yaitu hampir dua perlima dari total tenaga kerja asing yang ada. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peluang kerja bagi tenaga kerja asing di Kota Denpasar terbuka bagi kedua jenis kelamin, terutama pada sektor-sektor yang berkembang di wilayah tersebut seperti pariwisata, perhotelan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan berbagai bidang profesional lainnya.

Dominasi tenaga kerja asing laki-laki dapat dipengaruhi oleh karakteristik jenis pekerjaan yang membutuhkan tenaga profesional atau teknis tertentu yang masih lebih banyak diisi oleh pekerja laki-laki. Namun demikian, keterlibatan tenaga kerja asing perempuan yang mencapai lebih dari sepertiga total tenaga kerja asing menunjukkan adanya partisipasi yang cukup signifikan dalam berbagai aktivitas ekonomi di Kota Denpasar.

Secara keseluruhan, komposisi tenaga kerja asing berdasarkan jenis kelamin di Kota Denpasar memperlihatkan bahwa keberadaan tenaga kerja asing tidak hanya didominasi oleh satu kelompok gender tertentu, tetapi juga mencerminkan keterlibatan perempuan yang cukup aktif dalam mendukung berbagai sektor usaha dan kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

Tabel 6.13 Negara Asal Tenaga Kerja Asing

No	Negara Asal	Jumlah (Orang)
1	Inggris	65
2	Australia	40
3	Prancis	30
4	Philipina	29
5	Amerika Serikat	28
6	Jepang	23
7	Korea Selatan	24
8	India	17
9	Russian federation	17
10	Belanda	15
11	Jerman	14
12	RRC	13
13	Belgia	9
14	Italia	8

15	Irlandia	7
16	Taiwan	6
17	Ukraina	6
18	Singapura	6
19	Spanyol	5
20	New Zeland	4
21	Austria	4
22	Kanada	3
23	Denmark	3
24	Polandia	3
25	Canada	3
26	Yunani	2
27	Switzerland	2
28	Filipina	2
29	British	2
30	Belarusia	2
31	Dominika	2
32	Macedonia	2
33	Swedia	2
34	Finlandia	2
35	Malaisia	2
36	Swis	2
37	Brazil	1
38	Kazakhstan	1
39	Rep. Ceko	1
40	Hungaria	1
41	Kyrgyzstan	1
42	Srilanka	1
43	Iran	1
44	Romania	1
45	Brunai Darrusalam	1
46	Nigeria	1
47	Slovakia	1
48	Bulgaria	1
49	Turkiye	1

50	Thailand	1
51	Moldova	1
52	Portugal	1
53	Estonia	1
Total Keseluruhan		421

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 6.13, jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Kota Denpasar pada tahun 2026 mencapai 421 orang yang berasal dari 53 negara. Keberadaan TKA tersebut menunjukkan bahwa Kota Denpasar memiliki daya tarik yang cukup tinggi bagi tenaga kerja internasional, terutama karena perkembangan sektor pariwisata, perdagangan, jasa, dan investasi yang terus berkembang.

Negara asal TKA terbanyak adalah Inggris dengan jumlah 65 orang, diikuti oleh Australia sebanyak 40 orang, Prancis sebanyak 30 orang, Philipina sebanyak 29 orang, dan Amerika Serikat sebanyak 28 orang. Selain itu, terdapat pula tenaga kerja asing yang berasal dari negara-negara Asia seperti Korea Selatan sebanyak 24 orang, Jepang sebanyak 23 orang, India sebanyak 17 orang, RRC sebanyak 13 orang, dan Singapura sebanyak 6 orang.

Negara-negara Eropa juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap jumlah TKA di Kota Denpasar, antara lain Belanda sebanyak 15 orang, Jerman sebanyak 14 orang, Belgia sebanyak 9 orang, Italia sebanyak 8 orang, Irlandia sebanyak 7 orang, Spanyol sebanyak 5 orang, serta beberapa negara lainnya dengan jumlah yang relatif lebih sedikit. Sementara itu, negara-negara seperti Taiwan, Ukraina, dan Singapura masing-masing tercatat sebanyak 6 orang.

Pada kelompok negara dengan jumlah tenaga kerja asing yang lebih kecil, terdapat beberapa negara yang masing-masing menyumbang antara satu hingga empat orang tenaga kerja, seperti Kanada, Denmark, Polandia, Yunani, Swiss, Brasil, Kazakhstan, Republik Ceko, Hungaria, Sri Lanka, Iran, Romania, Brunei Darussalam, Nigeria, Slovakia, Bulgaria, Turkiye, Thailand, Moldova, Portugal, dan Estonia.

Secara umum, komposisi tenaga kerja asing di Kota Denpasar didominasi oleh negara-negara dari kawasan Eropa, Australia, dan Amerika Utara, yang mencerminkan kuatnya keterkaitan Kota Denpasar dengan jaringan ekonomi dan industri pariwisata internasional. Keragaman asal negara tenaga kerja asing tersebut menunjukkan bahwa Kota Denpasar merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata yang mampu menarik tenaga profesional dari berbagai belahan dunia.

Tabel 6.14 Legalitas Tenaga Kerja Asing

Legal	Tidak Legal	Jumlah (Orang)
421	-	421

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 6.15, seluruh tenaga kerja asing (TKA) yang tercatat bekerja di Kota Denpasar pada tahun 2026 telah memiliki status legal. Dari total 421 orang tenaga kerja asing yang terdata, seluruhnya telah memenuhi ketentuan perizinan dan administrasi ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga tidak ditemukan tenaga kerja asing dengan status tidak legal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas

Tenaga Kerja Kota Denpasar berjalan dengan baik. Kepatuhan tenaga kerja asing dan perusahaan pengguna tenaga kerja asing terhadap regulasi ketenagakerjaan juga tercermin dari tidak adanya temuan tenaga kerja asing yang bekerja tanpa izin atau melanggar ketentuan yang berlaku.

Selain itu, seluruh tenaga kerja asing yang bekerja secara legal memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun perusahaan, serta mendukung terciptanya iklim investasi dan dunia usaha yang tertib. Keberadaan tenaga kerja asing yang legal juga memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan, pendataan, dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

6.8 Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Lingkungan hidup dan kebersihan mencerminkan kondisi suatu daerah yang terbebas dari kotoran, sampah, debu, serta berbagai bentuk pencemaran yang dapat membahayakan masyarakat. Peningkatan kualitas lingkungan hidup akan berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan lingkungan yang baik, diperlukan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat perlu memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, sementara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana program harus mampu mengajak serta memberdayakan masyarakat. Di Kota Denpasar, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan antara lain melalui pengelolaan dan pengurangan sampah, penataan taman, serta penataan pohon perindang di

wilayah kota Denpasar. Berikut merupakan data mengenai Jumlah Tenaga Kebersihan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025.

Tabel 6. 15 Jumlah Tenaga Kebersihan dan TPST Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025

Jenis Kelamin	Tahun	
	2024 (Orang)	2025 (Orang)
Laki-laki	854	806
Perempuan	535	524
Jumlah	**1.389**	**1.327**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar, 2026

Berdasarkan Tabel 6.13, jumlah tenaga kebersihan dan TPST di Kota Denpasar pada tahun 2025 tercatat sebanyak 1.327 orang, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 1.389 orang. Penurunan tersebut terjadi pada tenaga kerja laki-laki maupun perempuan. Jumlah tenaga kebersihan laki-laki menurun dari 854 orang pada tahun 2024 menjadi 806 orang pada tahun 2025, sedangkan tenaga kebersihan perempuan berkurang dari 535 orang menjadi 524 orang pada periode yang sama.

Dilihat dari komposisinya, tenaga kebersihan dan TPST di Kota Denpasar masih didominasi oleh tenaga kerja laki-laki. Pada tahun 2025, tenaga kerja laki-laki mencapai 60,7 persen dari total tenaga kebersihan dan TPST, sementara perempuan sebesar 39,5 persen. Meskipun jumlah tenaga kerja mengalami penurunan, keterlibatan perempuan tetap cukup besar dalam

mendukung pengelolaan kebersihan dan operasional TPST di Kota Denpasar. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya penurunan jumlah tenaga kebersihan dan TPST sebesar 62 orang atau sekitar 4,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang perlu menjadi perhatian dalam upaya menjaga kualitas pelayanan kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan.

Tabel 6. 16 Jumlah Tenaga TPS3R Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025

Jenis Kelamin	Tahun	
	2024 (Orang)	2025 (Orang)
Laki-laki	44	42
Perempuan	1	1
Jumlah	**45**	**43**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar, 2026

Berdasarkan Tabel 6.14, jumlah tenaga TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) di Kota Denpasar pada tahun 2025 tercatat sebanyak 43 orang, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 45 orang. Penurunan tersebut seluruhnya terjadi pada tenaga kerja laki-laki, yang berkurang dari 44 orang pada tahun 2024 menjadi 42 orang pada tahun 2025. Sementara itu, jumlah tenaga kerja perempuan tetap sebanyak 1 orang pada kedua tahun tersebut.

Dilihat dari komposisinya, tenaga TPS3R di Kota Denpasar didominasi oleh tenaga kerja laki-laki. Pada tahun 2025, tenaga kerja laki-laki mencapai 97,7 persen dari total tenaga TPS3R, sedangkan tenaga kerja

perempuan hanya sebesar 2,3 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan sampah berbasis TPS3R masih didominasi oleh laki-laki, meskipun terdapat keterlibatan perempuan dalam operasionalnya. Secara keseluruhan, jumlah tenaga TPS3R mengalami penurunan sebesar 2 orang atau sekitar 4,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, keberadaan tenaga TPS3R tetap memiliki peran penting dalam mendukung pengurangan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Denpasar.

Tabel 6. 17 Jumlah Petugas Kebersihan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025

Jenis Pekerjaan	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Bengkel	21	1	22	17	1	18
Pasukan	200	-	200	195	-	195
Pemilah/ Pengolah Sampah	124	31	155	119	27	146
Pengawas Pembuangan Sampah Akhir	2	-	2	2	-	2
Pengelola Lingkungan Jumali	37	13	50	33	12	45
Penyapuan	128	463	591	125	454	579
Pertamanan	155	26	181	135	27	162
Satgas	41	-	41	41	-	41
Sopir Angkutan Sampah	93	-	93	88	-	88
Sopir Operator Alat Berat	9	-	9	8	-	8
Jumlah	854	535	1389	806	524	1327

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2026

Berdasarkan Tabel 6.15, jumlah tenaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan di Kota Denpasar pada tahun 2025 tercatat sebanyak 1.327 orang, menurun dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 1.389 orang. Penurunan jumlah tenaga kerja terjadi pada beberapa jenis pekerjaan, seperti bengkel, pasukan kebersihan, pemilah/pengolah sampah, pengelola lingkungan Jumali, penyapuan, pertamanan, sopir angkutan sampah, serta sopir/operator alat berat. Sementara itu, jumlah tenaga kerja pada bidang pengawas pembuangan sampah akhir dan satgas tetap tidak mengalami perubahan.

Pada tahun 2025, tenaga kerja terbanyak terdapat pada bidang penyapuan dengan jumlah 579 orang, diikuti oleh pasukan kebersihan sebanyak 195 orang, pertamanan sebanyak 162 orang, dan pemilah/pengolah sampah sebanyak 146 orang. Bidang penyapuan juga menjadi jenis pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja perempuan terbanyak, yaitu 454 orang. Sebaliknya, beberapa jenis pekerjaan seperti pasukan kebersihan, satgas, sopir angkutan sampah, dan sopir/operator alat berat seluruhnya diisi oleh tenaga kerja laki-laki.

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, tenaga kerja laki-laki masih mendominasi dengan jumlah 806 orang pada tahun 2025, sedangkan tenaga kerja perempuan berjumlah 524 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan yang berkaitan dengan operasional lapangan dan penggunaan kendaraan masih didominasi oleh laki-laki, sementara perempuan lebih banyak terlibat pada pekerjaan penyapuan dan pemilahan sampah.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa sektor kebersihan dan pengelolaan lingkungan di Kota Denpasar tetap didukung oleh tenaga kerja yang tersebar pada berbagai jenis pekerjaan. Meskipun jumlah tenaga kerja mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, keberadaan tenaga kerja pada masing-masing bidang tetap berperan penting dalam mendukung kebersihan dan pengelolaan lingkungan di Kota Denpasar.

Tabel 6. 18 Jumlah Tenaga Kebersihan dan Pertamanan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sektor Taman Kota	12	9	21
2	Sektor Lapangan Lumintang	7	3	10
3	Sektor Puputan Badung	6	10	16
4	Sektor Taman Janggan	5	3	8
5	Sektor Penyiraman	26	0	26
6	Sektor Pembibitan	5	0	5
7	Sektor Perawatan	74	2	76
Jumlah		**135**	**27**	**162**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Berdasarkan Tabel 6.15, jumlah tenaga kebersihan dan pertamanan di Kota Denpasar tahun 2025 tersebar pada beberapa sektor dengan total 187 orang, terdiri dari 135 laki-laki dan 27 perempuan.

Sektor dengan jumlah tenaga kerja terbesar terdapat pada sektor perawatan, diikuti oleh sektor penyiraman dan taman kota. Beberapa sektor seperti penyiraman dan pembibitan seluruhnya didominasi oleh tenaga kerja laki-laki, sedangkan pada sektor tertentu seperti Puputan Badung terdapat keterlibatan perempuan yang cukup signifikan.

Secara keseluruhan, komposisi tenaga kerja menunjukkan dominasi laki-laki yang cukup tinggi dibandingkan perempuan. Meskipun demikian, perempuan tetap berperan dalam beberapa sektor, terutama pada kegiatan yang relatif tidak terlalu berat secara fisik, seperti di sektor taman kota dan Puputan Badung. Hal ini mencerminkan adanya pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dalam pengelolaan kebersihan dan pertamanan di Kota Denpasar, sekaligus menunjukkan peluang untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di berbagai sektor tersebut.

6.9 Petugas Layanan Parkir

Petugas layanan parkir adalah individu yang bertugas mengatur dan mengelola kendaraan yang diparkir di area umum maupun pelataran. Pengelolaan petugas parkir di Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan perparkiran. Tabel 6.16 berikut menyajikan data mengenai jumlah petugas layanan parkir di tepi jalan umum dan pelantaran menurut jenis kelamin di Kota Denpasar tahun 2025.

Tabel 6. 19 Jumlah Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pelantaran menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025

Juru Parkir Tepi Jalan Umum (Dalam Rumija)

Kecamatan	Tahun 2025		
	L	P	Jumlah (Orang)
Denpasar Utara	102	2	104
Denpasar Selatan	94	2	96
Denpasar Barat	78	7	85
Denpasar Timur	103	5	108
Jumlah	377	16	393

Sumber : Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar, 2025

Juru Parkir Pelataran (Di luar Rumija)

Kecamatan	Tahun 2025		
	L	P	Jumlah (Orang)
Denpasar Utara	122	11	133
Denpasar Selatan	127	4	131
Denpasar Barat	178	4	182
Denpasar Timur	140	6	146
Jumlah	567	25	592

Sumber : Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 6.19, jumlah juru parkir di Kota Denpasar tahun 2025 terbagi menjadi dua kategori, yaitu juru parkir tepi jalan umum (dalam Rumija) dan juru parkir pelataran (di luar Rumija). Pada juru parkir tepi jalan umum, total terdapat 393 orang, terdiri dari 377 laki-laki dan 16 perempuan. Jumlah terbanyak berada di Kecamatan Denpasar Timur sebanyak 108 orang, diikuti Denpasar Utara, Denpasar Selatan, dan Denpasar Barat.

Sementara itu, pada juru parkir pelataran, jumlahnya lebih besar yaitu 592 orang, dengan 567 laki-laki dan 25 perempuan. Kecamatan Denpasar Barat memiliki jumlah terbanyak pada kategori ini, disusul Denpasar Timur, Denpasar Utara, dan Denpasar Selatan.

Secara keseluruhan, jumlah juru parkir di pelataran lebih tinggi dibandingkan di tepi jalan umum, yang menunjukkan tingginya aktivitas parkir di luar badan jalan. Dari sisi jenis kelamin, pekerjaan juru parkir sangat didominasi oleh laki-laki, dengan jumlah perempuan yang relatif sangat sedikit di kedua kategori. Hal ini mencerminkan bahwa pekerjaan tersebut masih cenderung dilakukan oleh laki-laki, meskipun perempuan tetap memiliki keterlibatan meski dalam jumlah terbatas.

6.10 Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata

Bali dikenal luas karena keindahan alamnya yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Hal ini menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian, termasuk di Kota Denpasar. Keberadaan berbagai hotel, restoran, dan fasilitas pariwisata lainnya menjadi bukti nyata bahwa sektor ini mampu mendorong aktivitas usaha lain dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Perkembangan sektor pariwisata juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari wisatawan, penyedia jasa, pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga media. Berikut disajikan tabel mengenai jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pariwisata berdasarkan jenis kelamin di Kota Denpasar tahun 2025.

Tabel 6.20 Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Sektor Pariwisata menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025

Jenis Usaha	2025		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
Hotel Bintang	3.217	1.191	4.408
Hotel Non Bintang	1.081	572	1.653
Pondok Wisata	142	109	251
Villa	322	158	480
Restoran	1.751	1.346	3.097
Rumah Makan	1.007	1.098	2.105
Kafe	402	279	681
Usaha Rekreasi	173	163	336
Pramuwisata	83	17	100
Jumlah	**8.178**	**4.933**	**13.111**

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2025
Keterangan : Pramuwisata yang sudah tersertifikasi

Berdasarkan Tabel 6.20, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pariwisata Kota Denpasar tahun 2025 mencapai 13.111 orang, terdiri atas 8.178 laki-laki (62,37%) dan 4.933 perempuan (37,63%). Jenis usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbesar adalah hotel bintang sebanyak 4.408 orang, yang terdiri atas 3.217 laki-laki dan 1.191 perempuan. Selanjutnya, restoran menyerap 3.097 tenaga kerja, terdiri dari 1.751 laki-laki dan 1.346 perempuan, sedangkan rumah makan menyerap 2.105 tenaga kerja yang terdiri atas 1.007 laki-laki dan 1.098 perempuan.

Pada usaha hotel non bintang tercatat sebanyak 1.653 tenaga kerja, terdiri dari 1.081 laki-laki dan 572 perempuan. Sementara itu, kafe menyerap 681 tenaga kerja, terdiri atas 402 laki-laki dan 279 perempuan, villa

sebanyak 480 tenaga kerja dengan 322 laki-laki dan 158 perempuan, serta usaha rekreasi sebanyak 336 tenaga kerja yang terdiri atas 173 laki-laki dan 163 perempuan. Penyerapan tenaga kerja paling sedikit terdapat pada usaha pramuwisata sebanyak 100 orang, terdiri atas 83 laki-laki dan 17 perempuan, serta pondok wisata sebanyak 251 orang dengan 142 laki-laki dan 109 perempuan.

Secara umum, tenaga kerja laki-laki masih mendominasi sektor pariwisata, terutama pada jenis usaha perhotelan dan pramuwisata yang sudah tersertifikasi. Hal ini disebabkan pekerjaan pada sektor tersebut cenderung membutuhkan mobilitas tinggi, jam kerja fleksibel, serta kesiapan bekerja pada malam hari sehingga lebih banyak diminati laki-laki. Sementara itu, keterlibatan perempuan cukup besar pada usaha restoran dan rumah makan karena pekerjaan pada sektor kuliner lebih berkaitan dengan pelayanan dan pengolahan makanan. Tingginya jumlah pramuwisata laki-laki dibandingkan perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh tuntutan pekerjaan yang memerlukan mobilitas tinggi dan fleksibilitas waktu, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya. Di Bali, perempuan umumnya memiliki tanggung jawab domestik, ekonomi, dan sosial (*triple role*) yang dapat membatasi keterlibatan mereka dalam profesi kepemanduan. Selain itu, masih terdapat stigma bahwa profesi pemandu wisata lebih sesuai dijalankan oleh laki-laki sebagai pemimpin rombongan wisatawan, serta adanya pertimbangan aspek keamanan karena pekerjaan ini sering menuntut mobilitas tinggi dan jam kerja yang tidak menentu.

Tenaga kerja dalam sektor pariwisata pada tabel tersebut tersebar pada berbagai jenis usaha seperti hotel, villa, restoran, rumah makan, kafe, serta usaha rekreasi di Kota Denpasar. Berikut merupakan tabel mengenai jumlah penanggung jawab usaha akomodasi di Kota Denpasar menurut jenis kelamin tahun 2025.

Tabel 6.21 Jumlah Penanggung Jawab Usaha Akomodasi di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

Jenis Usaha	Tahun 2025		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
Hotel Bintang	60	15	75
Hotel Non Bintang	337	97	434
Pondok Wisata	83	15	98
Villa	120	40	160
Restoran	449	160	609
Rumah Makan	343	101	445
Kafe	30	109	139
Jumlah	**1.422**	**537**	**1.959**

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Tabel 6.21 menunjukkan jumlah penanggung jawab usaha akomodasi dan usaha terkait pariwisata di Kota Denpasar tahun 2025 masih didominasi oleh laki-laki. Tercatat sebanyak 1.422 laki-laki menjadi penanggung jawab usaha, sedangkan perempuan berjumlah 537 orang. Hal ini menunjukkan bahwa peran pengelolaan usaha masih lebih banyak dipegang oleh laki-laki, sejalan dengan dominasi tenaga kerja laki-laki di sektor pariwisata. Dilihat dari jenis usahanya, jumlah

penanggung jawab terbanyak terdapat pada usaha restoran, yaitu sebanyak 449 laki-laki dan 160 perempuan. Selain itu, usaha rumah makan dan hotel non bintang juga memiliki jumlah yang cukup besar, masing-masing sebanyak 343 laki-laki dan 101 perempuan pada rumah makan, serta 337 laki-laki dan 97 perempuan pada hotel non bintang.

Sementara itu, pada usaha lainnya seperti hotel berbintang, pondok wisata, dan villa, jumlah penanggung jawab laki-laki tetap lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun, terdapat pengecualian pada usaha kafe, di mana jumlah perempuan (109 orang) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (30 orang). Hal ini menunjukkan bahwa pada jenis usaha tertentu, perempuan memiliki peran yang lebih dominan dalam pengelolaan usaha. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa meskipun laki-laki masih mendominasi dalam kepemimpinan usaha pariwisata, perempuan juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan, terutama pada jenis usaha tertentu seperti kafe. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengelolaan usaha pariwisata di Kota Denpasar.

Tabel 6.22 Tenaga Kerja yang Diserap pada Bidang Usaha Hotel dan Restaurant menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

Jenis Usaha	Tahun 2025		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran)	7.922	4.753	12.675

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 6.22 di atas, sektor pariwisata khususnya hotel dan restoran mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar, yaitu sebanyak 12.675 orang. Dari jumlah tersebut, tenaga kerja laki-laki berjumlah 7.922 orang, sedangkan tenaga kerja perempuan sebanyak 4.753 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja laki-laki lebih mendominasi dibandingkan perempuan dalam sektor tersebut. Selisih jumlah yang cukup signifikan ini mengindikasikan adanya ketimpangan gender dalam penyerapan tenaga kerja di bidang hotel dan restoran.

6.11 Pemilik Usaha Salon Kecantikan

Pada era modern, penampilan menjadi hal yang penting karena turut mempengaruhi kesan pertama terhadap seseorang. Setiap individu berusaha menampilkan diri dengan sebaik mungkin, terutama perempuan. Penampilan yang terawat, khususnya pada wajah dan rambut, dapat meningkatkan rasa percaya diri. Namun demikian, tidak hanya perempuan, laki-laki juga semakin memperhatikan penampilan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Berikut merupakan tabel mengenai usaha salon kecantikan menurut jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025.

Tabel 6. 23 Usaha Salon Kecantikan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025

Kecamatan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
Denpasar Utara	7	38	45
Denpasar Timur	7	32	39
Denpasar Selatan	10	64	74
Denpasar Barat	9	38	47
Jumlah	33	172	205

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 6.23, usaha salon kecantikan di Kota Denpasar tahun 2025 didominasi oleh perempuan. Tercatat sebanyak 172 perempuan memiliki usaha salon kecantikan, sedangkan laki-laki sebanyak 33 orang. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang lebih besar dalam menjalankan usaha di bidang kecantikan.

Dilihat berdasarkan wilayah kecamatan, jumlah usaha salon kecantikan terbanyak terdapat di Denpasar Selatan, dengan total 74 unit usaha, yang terdiri dari 64 perempuan dan 10 laki-laki. Sementara itu, kecamatan lainnya seperti Denpasar Utara, Denpasar Timur, dan Denpasar Barat juga menunjukkan dominasi perempuan dalam kepemilikan usaha salon kecantikan, meskipun jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan Denpasar Selatan.

6.12 Kartu Keluarga (KK) Terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mencatat individu, keluarga, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial dan penerima bantuan sosial. Data ini menjadi dasar dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial. Berikut disajikan tabel mengenai jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar dalam DTKS berdasarkan Rumah Tangga (RT) dan Anggota Rumah Tangga (ART) di Kota Denpasar tahun 2024 dan 2025.

Tabel 6. 24 Jumlah KK Terdaftar Pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) menurut Rumah Tangga (RT) dan Anggota Rumah Tangga (ART) di Kota Denpasar Tahun 2024

Tahun	RT	ART
2024	55.264	159.998
Jumlah	**55.264**	**159.998**

Sumber: Dinas Sosial Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 6.24, jumlah Kepala Keluarga (RT) dan Anggota Rumah Tangga (ART) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Denpasar pada tahun 2024 tercatat sebanyak 55.264 RT dan 159.998 ART. Data ini menunjukkan jumlah rumah tangga beserta anggota keluarga yang telah terdata

sebagai penerima atau calon penerima program kesejahteraan sosial dari pemerintah.

Tabel 6. 25 Jumlah KK Terdaftar Pada DTSEN di Kota Denpasar Tahun 2025

Tahun 2025	RT	ART
Desil 1	3.860	14.618
Desil 2	6.756	25.600
Desil 3	8.510	32.641
Jumlah	**19.126**	**72.859**

Sumber: Dinas Sosial Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 6.25, jumlah rumah tangga (RT) dan anggota rumah tangga (ART) yang terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kota Denpasar tahun 2025 tercatat sebanyak 19.126 RT dan 72.859 ART. Berdasarkan kelompok desil, Desil 1 memiliki jumlah 3.860 RT dan 14.618 ART, Desil 2 sebanyak 6.756 RT dan 25.600 ART, serta Desil 3 sebanyak 8.510 RT dan 32.641 ART.

Pengelompokan desil menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Desil 1 merupakan kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau kategori sangat miskin, sehingga menjadi prioritas utama dalam penerimaan bantuan sosial pemerintah. Desil 2 merupakan kelompok rumah tangga miskin dan rentan miskin, sedangkan Desil 3 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dua desil sebelumnya, namun masih termasuk dalam sasaran program perlindungan sosial.

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah RT dan ART terbanyak berada pada Desil 3, diikuti Desil 2 dan Desil 1. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN di Kota Denpasar berada pada kategori rentan dan masih memerlukan dukungan program kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tabel 6. 26 PPKS di Kota Denpasar Tahun 2024

No.	Jenis PPKS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	1	8	9
2	Anak Terlantar	300	290	590
3	Anak dengan Kedisabilitasan	107	79	186
4	Lanjut Usia Terlantar	101	177	278
5	Penyandang Disabilitas	1.017	724	1.741
6	Pengemis	1	0	1
7	Pemulung	3	7	10
8	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan	1	1	2
9	Orang dengan HIV/AIDS	2	1	3
10	Korban Penyalahgunaan NAPZA	7	1	8
11	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0	476	476
12	Fakir Miskin (ART/Jiwa)	4.755	4.821	9.576
	Total Keseluruhan	**6.295**	**6.585**	**12.880**

Sumber: Dinas Sosial Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 6.26, jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Denpasar tahun 2025 mencapai 12.880 jiwa, yang terdiri dari 6.295 laki-laki dan 6.585 perempuan. Jenis PPKS dengan jumlah tertinggi adalah fakir miskin sebanyak 9.576 jiwa, terdiri dari 4.755 laki-laki dan 4.821 perempuan. Selain itu, penyandang disabilitas juga tergolong cukup tinggi dengan jumlah 1.741 jiwa, didominasi oleh laki-laki sebanyak 1.017 jiwa dibandingkan perempuan sebanyak 724 jiwa.

Kelompok PPKS lainnya yang cukup banyak ditemukan yaitu anak terlantar sebanyak 590 jiwa dan perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 476 jiwa yang seluruhnya merupakan perempuan. Sementara itu, lanjut usia terlantar tercatat sebanyak 278 jiwa, dengan jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Di sisi lain, beberapa kategori PPKS seperti anak jalanan, korban trafficking, korban bencana alam, korban bencana sosial, serta komunitas adat terpencil tidak tercatat pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan sosial di Kota Denpasar masih didominasi oleh kemiskinan, disabilitas, dan keterlantaran anak yang memerlukan perhatian serta penanganan berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat.

Tabel 6. 27 PPKS di Kota Denpasar Tahun 2025

No.	Jenis PPKS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	2	5	7
2	Anak Terlantar	315	264	579
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	1	0	1
5	Anak dengan Kedisabilitasan	83	57	140
8	Lanjut Usia Terlantar	98	150	248
9	Penyandang Disabilitas	930	672	1.602
13	Pemulung	1	1	2
16	Orang dengan HIV/AIDS	2	1	3
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0	308	308
24	Fakir Miskin (ART/Jiwa)	3.720	3.894	7.614
	Total Keseluruhan	**5.152**	**5.352**	**10.504**

Sumber: Dinas Sosial Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 6.27, jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Denpasar tahun 2025 tercatat sebanyak 10.504 jiwa, terdiri dari 5.152 laki-laki dan 5.352 perempuan. Jenis PPKS dengan jumlah tertinggi masih didominasi oleh fakir miskin sebanyak 7.614 jiwa, yang terdiri dari 3.720 laki-laki dan 3.894 perempuan. Selain itu, penyandang disabilitas juga menjadi kelompok dengan jumlah cukup besar yaitu sebanyak 1.602 jiwa, dengan jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

Kelompok PPKS lainnya yang cukup menonjol yaitu anak terlantar sebanyak 579 jiwa, perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 308 jiwa, serta lanjut usia

terlantar sebanyak 248 jiwa. Sementara itu, anak dengan kedisabilitasan tercatat sebanyak 140 jiwa.

6.13 Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi pencari kerja, karena tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara lebih baik. Pengelompokan pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan dapat memberikan gambaran mengenai dominasi tingkat pendidikan tertentu serta membantu mengidentifikasi keterbatasan dalam ketersediaan lapangan kerja. Berikut disajikan tabel mengenai jumlah pencari kerja yang telah ditempatkan berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Kota Denpasar tahun 2025.

Tabel 6. 28 Jumlah Pencari Kerja Yang Telah Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sekolah Dasar ke Bawah	3	1	4
Sekolah Menengah Pertama	13	9	22
Sekolah Menengah Atas	249	153	402
Diploma I/II/III/Akademi	85	37	122
SI	119	103	222
S2	5	2	7

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar, BPS Kota Denpasar,2025

Berdasarkan data pada Tabel 6.28 di atas, jumlah pencari kerja yang telah ditempatkan di Kota Denpasar

tahun 2025 didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 402 orang, terdiri dari 249 laki-laki dan 153 perempuan. Selanjutnya diikuti oleh lulusan Strata 1 (S1) sebanyak 222 orang yang terdiri dari 119 laki-laki dan 103 perempuan, serta lulusan Diploma I/II/III/Akademi sebanyak 122 orang yang terdiri dari 85 laki-laki dan 37 perempuan. Sementara itu, jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 22 orang, Sekolah Dasar ke bawah sebanyak 4 orang, dan S2 sebanyak 7 orang.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah pencari kerja laki-laki yang telah ditempatkan lebih banyak dibandingkan perempuan pada seluruh tingkat pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki masih lebih dominan dalam memasuki dunia kerja, meskipun perempuan juga memiliki keterlibatan yang cukup pada tingkat pendidikan menengah hingga tinggi.

Tabel 6. 29 Pemenuhan Lowongan Permintaan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025

No	Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian	0	0	0
2	Pertambangan	0	0	0
3	Listrik	15	2	17
4	Industri	0	2	0
5	Bangunan	1	0	1
6	Perdagangan	317	391	708
7	Angkutan	39	3	42
8	Keuangan	3	1	4
9	Jasa	5	0	5

Sumber: Buku Saku Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan tabel 6.29, menunjukkan bahwa lapangan usaha yang dominan di Kota Denpasar berada pada sektor perdagangan. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor ini sebanyak 708 orang, dengan jumlah perempuan sebanyak 391 orang dan laki-laki sebanyak 317 orang. Sektor ini menjadi yang paling banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Sektor perdagangan membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar karena Kota Denpasar merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata, sehingga terjadi peningkatan permintaan terhadap kegiatan perdagangan serta jasa pendukung lainnya.

6.14 UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan secara mandiri oleh individu maupun badan usaha dengan batasan tertentu dalam hal modal dan omzet. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari skala kecil hingga sektor jasa dan perdagangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian.

Di Kota Denpasar tahun 2025, Kecamatan Denpasar Barat tercatat memiliki jumlah UMKM terbanyak, yaitu sebanyak 10.544 unit usaha, diikuti oleh Denpasar Utara sebanyak 9.748 unit, Denpasar Selatan sebanyak 7.983 unit, dan Denpasar Timur sebanyak 4.761 unit. Selain itu, pengelola UMKM juga didominasi oleh perempuan di setiap kecamatan, seperti di Denpasar Barat sebanyak 7.380 perempuan dibandingkan 3.164 laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki

peran yang cukup besar dalam kegiatan kewirausahaan di Kota Denpasar.

UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Berikut merupakan tabel mengenai jumalah UMKM-UMKM menurut jenis kelamin dan kecamatan di Kota Denpasar tahun 2025.

Tabel 6.30 Jumlah UMKM - UMKM Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Pengelola UMKM		Jumlah UMKM yang pernah dikelola
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Denpasar Utara	2.925	6.823	9.748
2	Denpasar Selatan	2.395	5.588	7.983
3	Denpasar Barat	3.164	7.380	10.544
4	Denpasar Timur	1.429	3.332	4.761

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 6.30, jumlah UMKM menurut jenis kelamin dan kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2025 menunjukkan variasi jumlah pengelola UMKM di setiap wilayah. Data ini memberikan gambaran mengenai sebaran pelaku UMKM serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah. Informasi ini menjadi penting dalam perumusan kebijakan pemberdayaan UMKM serta penguatan ekonomi lokal di masing-masing kecamatan.

Berdasarkan jenis kelamin, pada seluruh kecamatan di Kota Denpasar, jumlah pengelola UMKM

perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Di Kecamatan Denpasar Barat tercatat jumlah tertinggi dengan 3.164 laki-laki dan 7.380 perempuan (total 10.544). Disusul oleh Denpasar Utara dengan 2.925 laki-laki dan 6.823 perempuan (total 9.748), serta Denpasar Selatan dengan 2.395 laki-laki dan 5.588 perempuan (total 7.983). Sementara itu, jumlah terendah terdapat di Denpasar Timur dengan 1.429 laki-laki dan 3.332 perempuan (total 4.761). Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang lebih dominan dalam pengelolaan UMKM di Kota Denpasar, yang dapat menjadi potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keluarga dan komunitas.

UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta menciptakan lapangan kerja di lingkungan sekitarnya. Keberadaan UMKM tidak hanya memberikan peluang usaha bagi pemiliknya, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja lainnya. Berikut disajikan tabel mengenai jenis usaha serta jumlah tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin pada UMKM di Kota Denpasar tahun 2025.

Tabel 6.31 Jenis Usaha dan Data Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Pada UMKM Kota Denpasar 2025

No	Kecamatan	Jenis Usaha	Jenis Kelamin		
			L	P	Jumlah
1	Denpasar Utara	a. Kuliner	1.755	4.093	5.848
		b. Industri Makanan	585	1.364	1.949

		Ringan			
		c. Industri Kerajinan Tangan	585	1.365	1.950
		d. Dagang	1.170	2.729	3.899
		e. Jasa	293	681	974
		f. Pertanian	294	683	977
		g. Peternakan	294	686	980
		h. PKL	876	2.043	2.919
2	Denpasar Selatan	a. Kuliner	1.437	3.352	4.789
		b. Industri Makanan Ringan	479	1.117	1.596
		c. Industri Kerajinan Tangan	480	1.119	1.599
		d. Dagang	958	2.235	3.193
		e. Jasa	240	558	798
		f. Pertanian	240	560	800
		g. Peternakan	241	561	802
		h. PKL	717	1.672	2.389
3	Denpasar Barat	a. Kuliner	1.898	4.428	6.326
		b. Industri Makanan Ringan	633	1.475	2.108

		c. Industri Kerajinan Tangan	633	1.477	2.110
		d. Dagang	1.266	2.951	4.217
		e. Jasa	317	737	1.054
		f. Pertanian	317	739	1.056
		g. Peternakan	318	741	1.059
		h. PKL	948	2.210	3.158
4	Denpasar Timur	a. Kuliner	855	1.995	2.850
		b. Industri Makanan Ringan	285	665	950
		c. Industri Kerajinan Tangan	287	668	955
		d. Dagang	570	1.330	1.900
		e. Jasa	143	332	475
		f. Pertanian	144	334	478
		g. Peternakan	144	336	480
		h. PKL	425	989	1.414

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 6.31, Berdasarkan data tersebut, jumlah UMKM terbanyak berada di wilayah Denpasar Barat. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah tenaga kerja pada berbagai jenis usaha, seperti kuliner sebanyak 6.326 orang, perdagangan sebanyak 4.217

orang, serta PKL sebanyak 3.158 orang. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya, yang menunjukkan bahwa aktivitas UMKM di Denpasar Barat berkembang cukup pesat.

Dilihat dari jenis usahanya, UMKM di Kota Denpasar mencakup berbagai bidang seperti kuliner, industri makanan ringan, industri kerajinan tangan, perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, dan pedagang kaki lima (PKL). Pada hampir seluruh jenis usaha tersebut, jumlah tenaga kerja perempuan cenderung lebih banyak dibandingkan laki-laki, seperti pada usaha kuliner di Denpasar Utara sebanyak 4.093 perempuan dan 1.755 laki-laki, serta di Denpasar Selatan sebanyak 3.352 perempuan dan 1.437 laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang cukup besar dalam kegiatan UMKM dan turut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tabel 6.32 Upah Minimum Tenaga Kerja di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025

Upah Minimum Kota Denpasar (Rp)	
2024	**2025**
3.096.823	3.499.878

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, 2025

Berdasarkan Tabel 6.24, Upah Minimum Kota Denpasar pada tahun 2024 sebesar Rp 3.096.823 dan mengalami kenaikan menjadi Rp 3.499.878 pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah

daerah. Upah minimum merupakan batas terendah yang harus diterima tenaga kerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Penetapan upah minimum di Kota Denpasar tidak membedakan jenis kelamin, sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh upah sesuai ketentuan yang berlaku.

Peningkatan upah minimum dari tahun 2024 ke tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta kesejahteraan tenaga kerja. Selain itu, kenaikan ini juga mencerminkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan hidup layak dan kondisi ekonomi di daerah. Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian daerah, terutama dalam menyerap tenaga kerja. Meskipun memiliki skala usaha yang relatif kecil, IKM berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya melalui usaha seperti pengolahan makanan, kerajinan, dan sektor lainnya. Oleh karena itu, keberadaan IKM juga berkaitan dengan penerapan upah tenaga kerja di tingkat lokal.

BAB VII
SEKTOR PUBLIK

Sektor publik merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian suatu negara. Sektor ini bertugas menyediakan berbagai layanan dan barang publik bagi masyarakat. Umumnya dikelola oleh lembaga-lembaga negara, sektor publik didanai melalui pajak dan pendapatan negara lainnya. Oleh karena itu, tujuan utamanya bukanlah mencari keuntungan, melainkan fokus pada penyediaan pelayanan yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Bidang layanan yang disediakan mencakup berbagai sektor vital, seperti pertahanan dan kemiliteran, kepolisian, transportasi umum, pendidikan, serta kesehatan. Pada bab ini akan dibahas mengenai klasifikasi dan distribusi peran berdasarkan jenis kelamin dalam ketiga cabang kekuasaan pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembahasan ini penting dilakukan karena ketimpangan gender masih menjadi permasalahan yang cukup serius di lingkungan pemerintahan.

Ketimpangan gender tidak hanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga masih kerap ditemukan di lingkungan pemerintahan. Meskipun kontribusi perempuan dalam sektor publik semakin meningkat, berbagai bentuk ketimpangan masih terus berlangsung, seperti diskriminasi jabatan, pelecehan di tempat kerja, serta perlakuan yang tidak setara. Ketimpangan gender tidak hanya dilihat dari kuantitas jumlah perempuan yang

bekerja, tetapi juga dari posisi dan perlakuan mereka dalam struktur organisasi pemerintahan.

Perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam struktur organisasi sektor publik. Kehadiran perempuan dapat meningkatkan kualitas pemerintahan, mendukung pembangunan yang lebih adil, serta mendorong kesetaraan gender. Partisipasi perempuan turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja sektor publik. Selain itu, perempuan sering dianggap lebih teliti dan cermat dalam proses pengambilan keputusan dibandingkan laki-laki. Peran perempuan juga penting dalam penyusunan regulasi, karena selama ini banyak regulasi yang masih kurang memperhatikan perspektif dan hak-hak perempuan.

Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas dari pemerintah untuk mengatasi ketimpangan gender di sektor publik. Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi mengenai anti-diskriminasi dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan jumlah perempuan pada posisi-posisi kepemimpinan di sektor publik. Kepemimpinan perempuan diyakini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif serta mengurangi pelanggaran hak asasi manusia. Sejalan dengan itu, pemerintah menetapkan target minimal keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam pemilu legislatif dan jabatan-jabatan publik, sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam proses pengambilan keputusan yang lebih adil.

7.1 Eksekutif

Lembaga eksekutif merupakan institusi yang memiliki kewenangan utama dalam menjalankan undang-undang serta melaksanakan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lembaga ini mencakup presiden dan wakil presiden, para menteri, institusi militer, hingga ASN yang berperan langsung dalam operasional pemerintahan. Kinerja lembaga eksekutif relatif mudah diamati karena aktivitas dan kebijakannya berada di garis depan pelayanan publik dan mendapat perhatian luas dari masyarakat.

Keberhasilan kinerja lembaga eksekutif dapat tercermin dari berbagai indikator, seperti peningkatan kondisi ekonomi, kemajuan sosial dan budaya, serta perkembangan di bidang pendidikan. Selain itu, efektivitas pelaksanaan program, kualitas pelayanan publik, dan kemampuan merespons kebutuhan masyarakat juga menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana lembaga eksekutif mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

7.1.1 ASN Menurut Golongan Kepangkatan

Aparatur Sipil Negara merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di instansi pemerintahan dan berperan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam pelaksanaannya, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik dan penyedia layanan kepada masyarakat. Pengaturan terkait ASN mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

yang masih berlaku hingga saat ini. Berikut disajikan tabel komposisi ASN menurut golongan pangkat dan jenis kelamin di Kota Denpasar tahun 2024 dan 2025.

Tabel 7. 1 Komposisi ASN Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025

Gol	ASN					
	Tahun 2024			Tahun 2025		
	L	P	L+P (Orang)	L	P	L+P (Orang)
I	19	24	43	35	32	67
II	289	200	489	193	133	326
III	1.049	1.744	2.793	1.127	1.757	2.884
IV	276	547	823	243	454	697
PPPK	655	1.782	2.437	3.163	3.679	6.842
IX	548	1.426	1.974	1.794	2.605	4.399
VII	0	0	0	0	0	0
X	45	116	161	57	124	181
XI	9	7	16	10	8	18
Jumlah	**2.288**	**4.297**	**6.585**	**4.666**	**5.999**	**10.665**

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 7.1, komposisi ASN di Kota Denpasar menurut golongan kepangkatan dan jenis kelamin pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya peningkatan jumlah secara keseluruhan di hampir semua golongan. Total ASN meningkat dari 6.585 orang pada tahun 2024 menjadi 10.665 orang pada tahun 2025. Pada kedua tahun tersebut, golongan III menjadi yang paling dominan, yaitu sebanyak 2.793 orang pada tahun 2024 (1.049 laki-laki dan 1.744 perempuan) dan meningkat menjadi 2.884 orang pada tahun 2025 (1.127 laki-laki dan 1.757 perempuan). Selain itu, kategori PPPK juga

mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 2.437 orang menjadi 6.842 orang, yang turut berkontribusi besar terhadap kenaikan total ASN.

Sementara itu, beberapa golongan lain menunjukkan dinamika yang beragam. Golongan I meningkat dari 43 menjadi 67 orang, sedangkan golongan II menurun dari 489 menjadi 326 orang. Golongan IV juga mengalami penurunan dari 823 menjadi 697 orang. Di sisi lain, golongan IX dan X mengalami peningkatan yang cukup besar, masing-masing dari 1.974 menjadi 4.399 orang dan dari 161 menjadi 181 orang. Secara umum, jumlah ASN perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki pada hampir seluruh golongan, yang menunjukkan dominasi perempuan dalam struktur kepegawaian di Kota Denpasar.

7.1.2 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. PPPK memiliki hak dan kewajiban yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk memperoleh gaji dan tunjangan yang bersumber dari APBN atau APBD. Berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK tidak memiliki status kepegawaian tetap maupun hak pensiun, namun tetap memiliki kedudukan sebagai ASN. PPPK umumnya diangkat untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional di instansi pemerintah, seperti guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan jabatan fungsional lainnya. Berikut disajikan tabel

komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menurut jenjang serta jenis kelamin di Kota Denpasar tahun 2024 dan 2025.

Tabel 7. 2 Komposisi PPPK Menurut Jenjang (Honorer dan THL) dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025

Tahun	PPPK		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2024	655	1.782	2.437
2025	3.163	3.679	6.842

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 7.2, jumlah Pegawai PPPK di Kota Denpasar mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2024 ke 2025. Pada tahun 2024, total Pegawai Non ASN tercatat sebanyak 2.437 orang, terdiri dari 655 laki-laki dan 1.782 perempuan. Jumlah ini kemudian meningkat tajam pada tahun 2025 menjadi 6.842 orang, dengan komposisi 3.163 laki-laki dan 3.679 perempuan.

Secara umum, baik jumlah laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami peningkatan, namun Pegawai Non ASN perempuan tetap mendominasi pada kedua tahun tersebut. Kenaikan yang cukup besar ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan tenaga kerja Non ASN di Kota Denpasar, sekaligus mencerminkan peran perempuan yang cukup signifikan dalam sektor tersebut.

7.1.3 Pegawai yang Mengikuti Diklat

Aparatur Sipil Negara merupakan sumber daya manusia utama dalam lembaga pemerintahan yang memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Pemberdayaan SDM dilakukan untuk mengembangkan potensi ASN agar dapat bekerja secara optimal dan efisien. Salah satu bentuk pemberdayaan tersebut adalah melalui program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ASN. Kegiatan diklat dapat berupa pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis, maupun workshop. Berikut disajikan data jumlah pejabat yang telah mengikuti diklat menurut jenis kelamin di Kota Denpasar tahun 2024 dan 2025.

Tabel 7. 3 Jumlah Pejabat yang Sudah Mengikuti Diklat Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025

No	Nama Diklat Pejabat	Tahun					
		2024			2025		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PIM. TK. I	0	0	0	0	0	0
2	PIM. TK. II	21	4	25	18	4	22
3	PIM. TK. III	52	38	90	57	53	110
4	PIM. TK. IV	60	73	133	70	73	143
Jumlah		**133**	**115**	**248**	**145**	**130**	**275**

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, pelatihan yang diikuti pejabat di Kota Denpasar merupakan Diklat Kepemimpinan atau Pelatihan Kepemimpinan Nasional yang terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga, dan tingkat empat. Secara umum, jumlah pejabat yang telah mengikuti diklat mengalami peningkatan dari 248 orang pada tahun 2024 menjadi 275 orang pada tahun 2025. Peningkatan ini terlihat pada hampir semua tingkatan, seperti tingkat tiga yang naik dari 90 menjadi 110 orang dan tingkat empat dari 133 menjadi 143 orang, sementara tingkat satu tidak mengalami perubahan karena tidak terdapat peserta pada kedua tahun tersebut. Namun, pada tingkat dua justru terjadi sedikit penurunan dari 25 menjadi 22 orang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan kompetensi kepemimpinan aparatur masih terus dilakukan, meskipun terdapat perbedaan dinamika pada tiap tingkatan pelatihan. Peningkatan jumlah peserta pada beberapa tingkatan mencerminkan adanya perhatian terhadap peningkatan kualitas kepemimpinan guna mendukung kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Sementara itu, penurunan pada tingkat tertentu dapat dipengaruhi oleh penyesuaian kebutuhan organisasi, prioritas program, maupun kebijakan pelatihan yang berlaku. Secara keseluruhan, pelaksanaan diklat ini tetap menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas pejabat di lingkungan pemerintahan.

Tabel 7. 4 Proporsi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang Pernah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 dan 2025

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2024	907	1.379	2.286
2025	1.556	1.990	3.546

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data di atas, jumlah ASN di Kota Denpasar yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) pada tahun 2024 hingga 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 2.286 orang menjadi 3.546 orang. Peningkatan ini terjadi pada kedua jenis kelamin, di mana jumlah laki-laki naik dari 907 menjadi 1.556 orang, sedangkan perempuan meningkat dari 1.379 menjadi 1.990 orang. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi ASN dalam kegiatan pengembangan kompetensi.

Secara keseluruhan, kondisi tersebut mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan. Partisipasi perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki juga menunjukkan peran aktif perempuan dalam pengembangan kapasitas ASN. Dengan meningkatnya jumlah ASN yang mengikuti diklat, diharapkan kinerja pelayanan publik di Kota Denpasar dapat semakin optimal dan profesional.

7.1.4 ASN Berdasarkan Unit Kerja

Aparatur Sipil Negara berdasarkan unit kerja dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Denpasar, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Satuan Kerja Perangkat Daerah berperan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Denpasar sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pertanian, dan berbagai dinas lainnya. Sementara itu, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama merupakan satuan pendidikan yang berada dalam jenjang pendidikan formal di Indonesia. Berikut disajikan tabel mengenai jumlah ASN berdasarkan jenis kelamin dan unit kerja di Kota Denpasar tahun 2024 dan 2025.

Tabel 7. 5 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Unit Kerja di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025

No	Unit Kerja	2024			2025		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	SKPD Kota Denpasar	1.455	2.063	3.518	3.644	3.441	7.085
2	Taman Kanak-kanak	0	22	22	1	26	27
3	Sekolah Dasar	610	1.732	2.342	740	1.982	2.722
4	Sekolah Menengah Pertama	223	480	703	281	550	831
Jumlah		2.288	4.297	6.585	4.666	5.999	10.665

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 7.5, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Denpasar menurut unit kerja dan jenis kelamin mengalami peningkatan dari tahun 2024 ke 2025. Secara keseluruhan, total ASN meningkat dari 6.585 orang pada tahun 2024 menjadi 10.665 orang pada tahun 2025. Unit kerja SKPD Kota Denpasar mencatat jumlah ASN terbesar, yaitu dari 3.518 orang (1.455 laki-laki dan 2.063 perempuan) pada tahun 2024 menjadi 7.085 orang (3.644 laki-laki dan 3.441 perempuan) pada tahun 2025. Pada Taman Kanak-kanak, jumlah ASN meningkat dari 22 orang pada tahun 2024 (seluruhnya perempuan) menjadi 73 orang pada tahun 2025 (21 laki-laki dan 52 perempuan).

Sementara itu, pada Sekolah Dasar jumlah ASN meningkat dari 2.342 orang (610 laki-laki dan 1.732 perempuan) pada tahun 2024 menjadi 2.722 orang (740 laki-laki dan 1.982 perempuan) pada tahun 2025. Pada Sekolah Menengah Pertama, jumlah ASN juga meningkat dari 703 orang (223 laki-laki dan 480 perempuan) menjadi 831 orang (281 laki-laki dan 550 perempuan). Secara umum, peningkatan terjadi di seluruh unit kerja dengan dominasi ASN perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, terutama pada sektor pendidikan.

7.1.5 ASN Menurut Eselon

ASN memiliki tingkatan jabatan struktural yang dikenal sebagai eselon, yang menunjukkan tingkat tanggung jawab dan kewenangan dalam pemerintahan. Eselon terdiri atas beberapa tingkat, yaitu eselon II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, IV.b, serta non-eselon. Pembagian ini mencerminkan hierarki jabatan dalam organisasi pemerintahan. Berikut disajikan data jumlah pejabat

berdasarkan eselon dan jenis kelamin di Kota Denpasar tahun 2024 dan 2025.

Tabel 7. 6 Jumlah Pejabat Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025

No	Eselon	Tahun					
		2024			2025		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	II.a	1	0	1	0	0	0
2	II.b	29	8	37	27	9	36
3	III.a	27	22	49	25	21	46
4	III.b	57	51	108	56	57	113
5	IV.a	71	64	135	75	62	137
6	IV.b	40	56	96	38	58	96
7	Non Eselon	2.063	4.096	6.159	4.445	5.792	10.237
Jumlah		**2.288**	**4.297**	**6.585**	**4.666**	**5.999**	**10.665**

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah pejabat di Kota Denpasar menunjukkan kecenderungan yang berbeda antara jabatan eselon dan non eselon pada periode 2024-2025. Pada jabatan eselon, sebagian besar tingkatan mengalami penurunan jumlah, seperti pada eselon II.b, III.a, dan IV.b. Sebaliknya, jabatan non eselon mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari 6.159 orang pada tahun 2024 menjadi 10.237 orang pada tahun 2025. Peningkatan ini terjadi pada laki-laki maupun perempuan, dengan jumlah perempuan tetap lebih dominan. Jabatan non eselon umumnya mencakup profesi fungsional seperti guru, tenaga kesehatan, peneliti, dan tenaga teknis lainnya yang tidak memiliki struktur eselon.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran perempuan dalam jabatan fungsional di lingkungan pemerintahan semakin kuat. Namun, pada jenjang jabatan yang lebih tinggi, partisipasi perempuan masih relatif terbatas. Hal ini terlihat dari masih rendahnya jumlah perempuan pada posisi dengan pangkat tertinggi, seperti pembina utama, yang bahkan mengalami penurunan. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketimpangan gender dalam jenjang karier birokrasi, yang dapat dipengaruhi oleh faktor budaya organisasi, pola karier, serta hambatan struktural. Dengan demikian, meskipun keterlibatan perempuan dalam sektor pemerintahan semakin meningkat, upaya untuk mendorong kesetaraan pada posisi strategis masih perlu diperkuat.

7.2 Legislatif

Lembaga legislatif merupakan institusi yang bertugas menyusun undang-undang serta melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga eksekutif. Lembaga ini meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggota DPR, DPD, dan DPRD dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan anggota DPR dan DPRD dilakukan secara langsung oleh masyarakat, sementara anggota DPD dipilih dengan jumlah perwakilan yang sama dari setiap provinsi.

7.2.1 Keanggotaan DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga yang mewakili masyarakat di tingkat daerah

serta berperan sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan proporsi keanggotaan DPRD Kota Denpasar berdasarkan partai politik dan jenis kelamin untuk periode 2024–2029.

Tabel 7. 7 Proporsi Keanggotaan DPRD Menurut Partai Periode 2024-2029 dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar

No	Partai	2024-2029		
		L	P	Jumlah
1	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	8	1	9
2	Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan	19	3	22
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	7	-	7
4	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1	-	1
5	Partai Gelora	1	-	1
6	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3	-	3
7	Partai Demokrat	2	-	2
Jumlah		41	4	45

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Denpasar, 2025

Tabel 7.7 menunjukkan bahwa komposisi keanggotaan DPRD Kota Denpasar periode 2024–2029 didominasi oleh laki-laki, dengan total 41 orang dibandingkan hanya 4 perempuan dari keseluruhan 45 anggota. Hal ini mencerminkan masih rendahnya keterwakilan perempuan, yaitu sekitar 8,9%, dibandingkan laki-laki yang mencapai lebih dari 90%. Dari sisi perolehan

kursi partai, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menjadi partai dengan jumlah kursi terbanyak, yaitu 22 kursi yang terdiri dari 19 laki-laki dan 3 perempuan. Posisi berikutnya ditempati oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 9 kursi (8 laki-laki dan 1 perempuan), serta Partai Golongan Karya (Golkar) dengan 7 kursi yang seluruhnya diisi oleh laki-laki.

Sementara itu, partai-partai lain memiliki jumlah kursi yang relatif kecil, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan 3 kursi, Partai Demokrat dengan 2 kursi, serta Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Gelora yang masing-masing memperoleh 1 kursi. Dari segi distribusi gender, hanya dua partai yang memiliki perwakilan perempuan, yaitu PDI Perjuangan dan Gerindra, sedangkan partai lainnya tidak memiliki anggota perempuan sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Denpasar masih belum merata antar partai politik, sehingga partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif daerah masih perlu ditingkatkan.

Tabel 7.8 Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen di Kota Denpasar dan Provinsi Bali (Persen)

Denpasar – Bali	2025
Kota Denpasar	8,89
Provinsi Bali	18,52

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Berdasarkan Tabel 7.8, persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen di Kota Denpasar tahun 2025 sebesar 8,89%, lebih rendah dibandingkan Provinsi Bali

yang mencapai 18,52%. Data tersebut menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam lembaga legislatif di Kota Denpasar masih tergolong rendah. Rendahnya keterlibatan perempuan dalam parlemen dapat menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik masih belum optimal.

Selain itu, perbedaan persentase antara Kota Denpasar dan Provinsi Bali menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di tingkat daerah masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya partisipasi politik perempuan, keterbatasan peluang dalam dunia politik, maupun masih adanya pandangan sosial yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam jabatan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan dalam bidang politik guna mendukung terciptanya kesetaraan gender dan pembangunan yang lebih inklusif.

7.2.2 Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi yang dibentuk secara sukarela dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh masing-masing partai. Pembentukan partai politik pada dasarnya bertujuan untuk memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggotanya maupun masyarakat, sekaligus menjaga dan mempertahankan keutuhan negara. Berikut disajikan tabel mengenai jumlah pimpinan partai politik (parpol) menurut nama partai dan jenis kelamin di Kota Denpasar tahun 2024-2025

Tabel 7. 9 Jumlah Pimpinan Partai Politik (Parpol) Menurut Nama Partai dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-2025

No	Partai	2024 - 2025		
		L	P	Jumlah
1	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3	0	(Ketua L, Sekretaris L, Bendahara L)
2	Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan	3	0	(Ketua L, Sekretaris L, Bendahara L)
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	3	0	(Ketua L, Sekretaris L, Bendahara L)
4	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	2	1	(Ketua L, Sekretaris L, Bendahara P)
5	Partai Gelora	3	0	(Ketua L, Sekretaris L, Bendahara L)
6	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2	1	(Ketua L, Sekretaris L, Bendahara P)
7	Partai Demokrat	3	0	(Ketua L, Sekretaris L, Bendahara L)
Jumlah		**19**	**2**	**21**

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Berdasarkan Tabel 7.9, jumlah pimpinan partai politik di Kota Denpasar tahun 2024–2025 mencapai 21 orang, yang terdiri dari 19 laki-laki dan 2 perempuan. Secara umum, kepemimpinan partai politik masih didominasi oleh laki-laki. Sebagian besar partai seperti Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gelora, dan Partai Demokrat seluruh posisi pimpinan (ketua, sekretaris, dan bendahara) diisi oleh laki-laki. Sementara itu, keterwakilan

perempuan hanya terlihat pada Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), masing-masing dengan satu perempuan yang menjabat sebagai bendahara. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam struktur pimpinan partai politik di Kota Denpasar masih sangat terbatas dibandingkan laki-laki.

Tabel 7. 10 Jumlah Pengurus Partai Politik (Parpol) Menurut Nama Partai dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-2025

No	Partai	2024 - 2025		
		L	P	Jumlah
1	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	19	8	27
2	Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan	11	8	19
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	36	19	55
4	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	24	12	36
5	Partai Gelora	2	1	3
6	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3	3	6
7	Partai Demokrat	60	30	90
Jumlah		**155**	**81**	**236**

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Tabel 7.10 menunjukkan bahwa jumlah pengurus partai politik di Kota Denpasar tahun 2024–2025 mencapai total 236 orang, yang terdiri dari 155 laki-laki dan 81 perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi kepengurusan partai politik, namun keterlibatan perempuan sudah relatif lebih baik dibandingkan dengan komposisi anggota DPRD. Partai

Demokrat memiliki jumlah pengurus terbanyak, yaitu 90 orang (60 laki-laki dan 30 perempuan), diikuti oleh Partai Golkar dengan 55 orang (36 laki-laki dan 19 perempuan), serta Partai Nasdem dengan 36 orang (24 laki-laki dan 12 perempuan).

Di sisi lain, partai dengan jumlah pengurus paling sedikit adalah Partai Gelora dengan 3 orang, disusul oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebanyak 6 orang. Menariknya, PSI menunjukkan keseimbangan gender yang sama antara laki-laki dan perempuan (masing-masing 3 orang), sementara partai lain masih didominasi oleh laki-laki meskipun tetap melibatkan perempuan dalam struktur kepengurusan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kepengurusan partai politik di Kota Denpasar sudah mulai meningkat, meskipun belum sepenuhnya seimbang dengan laki-laki.

7.2.3 Komisi Pemilihan Umum

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan serentak di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang memiliki tugas utama untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi seluruh tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU bertanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pelaksanaannya, KPU didukung oleh struktur kelembagaan yang bersifat hierarkis, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Sebagai lembaga yang bersifat mandiri, KPU bertanggung jawab atas seluruh tahapan pemilu, mulai

dari perencanaan hingga penetapan hasil. Dalam pelaksanaan tugasnya di tingkat daerah, khususnya di Kota Denpasar, keanggotaan KPU terdiri dari individu-individu yang dipilih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan prinsip profesionalitas dan keterwakilan gender. Komposisi anggota KPU juga diharapkan mencerminkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang inklusif.

Tabel 7. 11 Jumlah Anggota KPU Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-2025

No	Desa/Kelurahan	Jumlah		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kota Denpasar	3	2	5
Jumlah		**3**	**2**	**5**

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2025

Tabel 7.11 menunjukkan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kota Denpasar Tahun 2024-2025 sebanyak 5 orang, yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa keanggotaan KPU masih didominasi oleh laki-laki, meskipun keterwakilan perempuan sudah mulai terlihat dengan proporsi yang cukup signifikan. Hal ini mencerminkan adanya upaya untuk memenuhi prinsip keterwakilan gender dalam struktur kelembagaan KPU, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meskipun demikian, peran perempuan dalam keanggotaan KPU masih perlu terus ditingkatkan agar tercapai keseimbangan yang lebih ideal,

sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif dan representatif.

7.2.4 Panitia Pemilihan Kecamatan

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) didukung oleh struktur kelembagaan yang bersifat hierarkis, yaitu KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota. Untuk menunjang pelaksanaan tugas hingga tingkat yang lebih kecil, seperti kecamatan, kelurahan/desa, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU Kabupaten/Kota memiliki kewenangan membentuk badan ad hoc yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Masing-masing badan tersebut memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau sebutan lain. PPK dibentuk paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara. Keanggotaan PPK berjumlah lima orang yang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam komposisinya, PPK juga memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. PPK memiliki tugas melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan sesuai dengan ketetapan KPU Kabupaten/Kota serta

menjalankan tugas lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Berikut disajikan data mengenai jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menurut jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025.

Tabel 7. 12 Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-2025

No	Kecamatan	Jumlah PPK (orang)		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Denpasar Barat	4	1	5
2	Denpasar Utara	4	1	5
3	Denpasar Timur	4	1	5
4	Denpasar Selatan	5	0	5
Jumlah		**17**	**3**	**20**

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Denpasar Tahun 2025 sebanyak 20 orang, yang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa keanggotaan PPK masih didominasi oleh laki-laki di seluruh kecamatan. Anggota perempuan hanya terdapat di Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Utara, dan Denpasar Timur dengan masing-masing sebanyak 1 orang, sedangkan di Kecamatan Denpasar Selatan tidak terdapat anggota perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam PPK masih tergolong rendah, meskipun proses rekrutmen telah dilaksanakan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku. Rendahnya partisipasi perempuan ini dapat dipengaruhi

oleh beberapa faktor, seperti minat yang masih terbatas serta kendala dalam proses pendaftaran. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan keterlibatan perempuan agar tercapai keseimbangan gender dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan.

7.2.4 Panitia Pemungutan Suara

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain. Panitia Pemungutan Suara berkedudukan di kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain. Berikut merupakan data mengenai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 – 2025.

Tabel 7. 13 Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 – 2025

No	Kecamatan	Jumlah PPS (orang)		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Denpasar Barat	25	8	33
2	Denpasar Utara	27	6	33
3	Denpasar Timur	27	6	33
4	Denpasar Selatan	24	6	30
Jumlah		**103**	**26**	**129**

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah anggota Panitia Pemungutan Suara di Kota Denpasar Tahun 2024–2025 sebanyak 129 orang, yang terdiri dari 103 orang laki-laki dan 26 orang perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa keanggotaan PPS masih didominasi oleh laki-laki di seluruh kecamatan. Kecamatan Denpasar Barat memiliki 25 anggota laki-laki dan 8 perempuan, Denpasar Utara sebanyak 27 laki-laki dan 6 perempuan, Denpasar Timur sebanyak 27 laki-laki dan 6 perempuan, serta Denpasar Selatan sebanyak 24 laki-laki dan 6 perempuan.

Meskipun keterwakilan perempuan sudah terdapat di setiap kecamatan, jumlahnya masih relatif lebih kecil dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan/desa masih perlu ditingkatkan. Upaya peningkatan tersebut penting dilakukan guna menciptakan keseimbangan gender serta mendukung penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif dan representatif, sejalan dengan prinsip yang diamanatkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Tabel 7. 14 Jumlah KPPS dan PK TPS Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-2025

No	Kecamatan	Jumlah PPS (orang)		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Denpasar Barat	2.555	1.302	3.857
2	Denpasar Utara	2.187	1.179	3.366
3	Denpasar Timur	1.636	828	2.464
4	Denpasar Selatan	2.434	1.087	3.521
Jumlah		**8.812**	**4.396**	**13.208**

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban (PK) TPS di Kota Denpasar Tahun 2024–2025 sebanyak 13.208 orang, yang terdiri dari 8.812 laki-laki dan 4.396 perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa keanggotaan KPPS dan PK TPS masih didominasi oleh laki-laki di seluruh kecamatan. Kecamatan Denpasar Barat memiliki jumlah terbesar yaitu 3.857 orang (2.555 laki-laki dan 1.302 perempuan), diikuti Denpasar Selatan sebanyak 3.521 orang (2.434 laki-laki dan 1.087 perempuan), Denpasar Utara sebanyak 3.366 orang (2.187 laki-laki dan 1.179 perempuan), serta Denpasar Timur sebanyak 2.464 orang (1.636 laki-laki dan 828 perempuan).

Meskipun jumlah perempuan sudah cukup banyak dan tersebar di seluruh kecamatan, proporsinya masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) masih perlu ditingkatkan. Dengan jumlah petugas yang besar dan peran yang sangat strategis, peningkatan keterwakilan perempuan diharapkan dapat mendorong terciptanya penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif, adil, dan representatif sesuai dengan prinsip yang diusung oleh Komisi Pemilihan Umum.

7.2.5 Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PANTARLIH)

Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PANTARLIH) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih bertugas melakukan pendataan, verifikasi, dan

pembaruan data pemilih agar daftar pemilih tetap akurat dan lengkap. Petugas ini bersifat sementara, dibentuk khusus untuk periode tertentu, dan berperan langsung dalam memastikan setiap warga yang berhak memberikan suara tercatat dengan benar.

Dalam pelaksanaannya, PANTARLIH bekerja di bawah koordinasi KPU dan pengawasannya didukung oleh struktur kelembagaan yang ada di tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan. Penetapan petugas ini memperhatikan prinsip profesionalitas dan keterwakilan gender, sehingga partisipasi laki-laki dan perempuan dapat seimbang. Dengan demikian, PANTARLIH berkontribusi pada penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan inklusif di Kota Denpasar. Berikut merupakan data mengenai jumlah PANTARLIH menurut jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-2025.

Tabel 7. 15 Jumlah Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PANTARLIH) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-2025

No	Kecamatan	Jumlah PANTARLIH (orang)		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Denpasar Barat	345	206	551
2	Denpasar Utara	294	187	481
3	Denpasar Timur	208	134	342
4	Denpasar Selatan	336	167	503
Jumlah		**1.183**	**694**	**1.877**

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 7.15, jumlah PANTARLIH di Kota Denpasar pada tahun 2024-2025 mencapai 1.877 orang, terdiri dari 1.183 laki-laki dan 694 perempuan. Kecamatan Denpasar Barat memiliki jumlah petugas terbanyak yaitu 551 orang, sedangkan Denpasar Timur memiliki jumlah terendah yaitu 342 orang.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa keterlibatan laki-laki masih lebih banyak dibanding perempuan di setiap kecamatan. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih memiliki peran penting dalam melakukan pendataan, verifikasi, dan pembaruan data pemilih agar daftar pemilih tetap akurat dan dapat menjamin hak pilih warga. Dengan distribusi petugas di seluruh kecamatan, proses pemutakhiran data pemilih dapat berlangsung merata dan mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

7.2.6 Petugas Ketertiban (GASTIB) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-2025

Petugas Ketertiban (GASTIB) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Denpasar. Petugas Ketertiban bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran seluruh tahapan pemilu, mulai dari persiapan hingga proses pemungutan suara. Petugas ini bekerja secara sementara dan ditempatkan di berbagai lokasi strategis seperti TPS, kantor penyelenggara, dan titik pengawasan lainnya untuk memastikan pemilu berlangsung aman dan tertib.

Dalam pelaksanaannya, GASTIB terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kehadiran petugas di seluruh wilayah Kota Denpasar menunjukkan upaya penyelenggara pemilu dalam mendukung kelancaran proses pemilu

secara menyeluruh. Peran GASTIB sangat penting untuk menciptakan suasana pemilu yang kondusif bagi pemilih, petugas, dan seluruh pihak yang terlibat. Dengan distribusi petugas yang merata, proses pemilu dapat berjalan lancar, tertib, dan aman, serta memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Berikut merupakan data mengenai jumlah GASTIB menurut jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-2025

Tabel 7. 16 Jumlah Petugas Ketertiban (GASTIB) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-2025

No	Kecamatan	Jumlah GASTIB (orang)		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Denpasar Barat	1.098	4	1.102
2	Denpasar Utara	957	5	962
3	Denpasar Timur	688	4	692
4	Denpasar Selatan	1.003	3	1.006
Jumlah		**3.746**	**16**	**3.762**

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 7.16, jumlah GASTIB di Kota Denpasar pada tahun 2024-2025 mencapai 3.762 orang. Dari jumlah tersebut, 3.746 orang adalah laki-laki dan 16 orang perempuan. Kecamatan Denpasar Barat menjadi wilayah dengan jumlah petugas terbanyak, yaitu 1.102 orang, diikuti Denpasar Selatan sebanyak 1.006 orang,

Denpasar Utara 962 orang, dan Denpasar Timur menjadi kecamatan dengan jumlah petugas paling sedikit, yaitu 692 orang.

Petugas Ketertiban ditempatkan di seluruh kecamatan untuk mendukung kelancaran dan ketertiban selama tahapan pemilu berlangsung. Peran mereka mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu di berbagai lokasi strategis, termasuk tempat pemungutan suara, kantor penyelenggara, dan area publik lainnya. Meskipun jumlah petugas laki-laki jauh lebih banyak dibanding perempuan, keseluruhan petugas bekerja sama untuk menjaga keamanan dan keteraturan. Distribusi petugas yang merata di setiap kecamatan diharapkan dapat memastikan bahwa pemilu berlangsung tertib, aman, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya.

7.2.7 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga negara yang bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu serta menerima, menangani, dan menyelesaikan laporan pelanggaran pemilu. Anggota Bawaslu dipilih melalui proses seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi. Seseorang dinyatakan resmi menjadi anggota Bawaslu setelah dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan dalam tahapan seleksi tersebut. Berikut disajikan data mengenai jumlah anggota Bawaslu, Pileg, Pilpres, dan Pilkada menurut jenis kelamin di Kota Denpasar tahun 2025

Tabel 7.17 Jumlah Anggota Bawaslu Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024-2025

No	Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Denpasar	3	2	5
Jumlah		3	2	5

Sumber : Bawaslu Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 7.17 di atas, jumlah anggota Bawaslu Kota Denpasar tahun 2024-2025 adalah 5 orang, terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa anggota Bawaslu di tingkat kabupaten atau kota berjumlah 3-5 orang, dengan laki-laki lebih dominan dibanding perempuan. Bawaslu bersifat tetap dan bertugas menyusun kebijakan serta mengoordinasikan pengawasan pemilu secara keseluruhan. Sementara itu, Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan (Panwascam) dan Desa atau Kelurahan bersifat sementara dan fokus mengawasi tahapan pemilu di wilayah masing-masing.

Tabel 7.18 Jumlah Anggota Bawaslu dan Pengawas Pemilu Lapangan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025

No	Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Denpasar Utara PPL	3	0	3
2	Denpasar Timur PPL	3	0	3
3	Denpasar Selatan PPL	1	2	3
4	Denpasar Barat PPL	1	2	3
Jumlah		**8**	**4**	**12**

Sumber : Bawaslu Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 7.18, jumlah anggota Bawaslu dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di Kota Denpasar tahun 2024 tercatat sebanyak 12 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 orang berjenis kelamin laki-laki dan 4 orang perempuan. Data ini menunjukkan bahwa keterlibatan laki-laki masih lebih dominan dibandingkan perempuan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu di tingkat lapangan.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, di Denpasar Utara dan Denpasar Timur masing-masing terdapat 3 orang PPL yang seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Sementara itu, di Denpasar Selatan dan Denpasar Barat masing-masing memiliki 3 orang PPL dengan komposisi 1 laki-laki dan 2 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengawasan pemilu mulai terlihat di beberapa wilayah, meskipun secara keseluruhan jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan laki-laki.

7.3 Yudikatif

Lembaga yudikatif merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi utama dalam menegakkan hukum serta memastikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia berjalan dengan baik. Peran lembaga ini mencakup proses peradilan perkara, penegakan keadilan, serta pemberian kepastian hukum bagi masyarakat. Lembaga yudikatif menjadi bagian dari konsep trias politika yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Struktur lembaga ini meliputi Mahkamah Agung (MA), pengadilan tinggi, pengadilan negeri, serta berbagai pengadilan khusus. Keberadaan lembaga yudikatif diharapkan dapat menjaga supremasi hukum, menegakkan keadilan, serta menciptakan

keseimbangan kekuasaan dalam negara. Berikut disajikan data jumlah penegak hukum menurut jenis kelamin di Kota Denpasar tahun 2025.

Tabel 7. 19 Jumlah Penegak Hukum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025

No	Profesi	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-Laki	(%)	Perempuan	(%)	
1	Hakim	12	85,7	2	14,3	14
2	Jaksa	13	38,2	21	61,8	34
3	Polisi	1.090	93,97	70	6,03	1.160
4	Advokat	966	72,25	371	27,75	1.337
5	Notaris	119	48,77	125	51,23	244
Jumlah		2.200	78,88	589	21,12	2.789

Sumber : Kantor Kehakiman, Kejaksaan, Polresta, Peradi Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 7.19, jumlah penegak hukum di Kota Denpasar pada tahun 2025 mencapai 2.789 orang, yang terdiri atas 2.200 laki-laki (78,88%) dan 589 perempuan (21,12%). Secara rinci, profesi advokat merupakan yang paling banyak dengan total 1.337 orang, yang didominasi oleh laki-laki sebanyak 966 orang (72,25%) dan perempuan 371 orang (27,75%).

Sementara itu, profesi polisi berjumlah 1.160 orang dengan dominasi laki-laki yang sangat tinggi, yaitu sebanyak 1.090 orang (93,97%), sedangkan perempuan berjumlah 70 orang (6,03%). Pada profesi jaksa, jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu 21 orang (61,8%) berbanding 13 orang (38,2%). Hal serupa juga terlihat pada profesi notaris, di mana perempuan berjumlah 125 orang (51,23%), sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki sebanyak 119 orang (48,77%).

Adapun pada profesi hakim, didominasi oleh laki-laki sebanyak 12 orang (85,7%) dan perempuan sebanyak 2 orang (14,3%).

Secara keseluruhan, komposisi penegak hukum di Kota Denpasar masih didominasi oleh laki-laki, meskipun pada profesi notaris keterwakilan perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selain itu, pada profesi advokat juga terlihat bahwa perempuan mulai menunjukkan proporsi yang cukup signifikan, meskipun belum melampaui jumlah laki-laki.

Tabel 7. 20 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025

No	Pangkat	Tahun			
		2024		2025	
		Perempuan	(%)	Perempuan	(%)
1	Juru	11	0,4%	9	0,4%
2	Juru Tk.I	13	0,5%	8	0,3%
3	Pembina	162	6,4%	148	6,4%
4	Pembina Tk.I	219	8,7%	155	6,7%
5	Pembina Utama	2	0,1%	2	0,1%
6	Pembina Utama Madya	9	0,4%	8	0,3%
7	Pembina Utama Muda	155	6,2%	139	6,0%
8	Penata	350	13,9%	298	12,8%
9	Penata Muda	210	8,3%	241	10,4%
10	Penata Muda Tk.I	574	22,8%	531	22,9%
11	Penata Tk.I	610	24,3%	649	28,0%
12	Pengatur	44	1,7%	37	1,6%
13	Pengatur Muda	15	0,6%	18	0,8%
14	Pengatur Muda Tk.I	16	0,6%	3	0,1%
15	Pengatur Tk.I	125	5,0%	74	3,2%
Jumlah		2.515	100,0%	2.320	100%

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2026

Berdasarkan Tabel 7.20, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kota Denpasar menurut pangkat pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan distribusi yang bervariasi pada setiap jenjang. Pada tahun 2024, jumlah perempuan terbanyak berada pada pangkat Penata Tk.I sebesar 610 orang (24,3%), diikuti Penata Muda Tk.I sebanyak 574 orang (22,8%), serta Penata sebanyak 350 orang (13,9%). Sementara itu, jumlah paling sedikit terdapat pada pangkat Pembina Utama dengan 2 orang (0,1%). Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan cukup banyak berperan pada jenjang jabatan menengah.

Pada tahun 2025, jumlah perempuan secara total sedikit menurun menjadi 2.320 orang, namun terjadi pergeseran pada beberapa pangkat. Pangkat Penata Tk.I menjadi yang paling dominan dengan 649 orang (28,0%), diikuti Penata Muda Tk.I sebanyak 531 orang (22,9%) dan Penata Muda sebanyak 241 orang (10,4%) yang mengalami peningkatan persentase. Di sisi lain, beberapa pangkat mengalami penurunan baik secara jumlah maupun persentase, seperti Pembina Tk.I dan Pengatur Tk.I. Secara umum, partisipasi perempuan tetap terkonsentrasi pada jenjang jabatan menengah, dengan perubahan distribusi yang mencerminkan dinamika struktur kepegawaian di lingkungan pemerintah Kota Denpasar.

Tabel 7.21 Jumlah Perempuan yang Bekerja di Lembaga Pemerintahan di Kota Denpasar Tahun 2025

No	Perempuan yang bekerja di Lembaga Pemerintah	Tahun 2025
1	ASN	5.999
2	Polisi	70
3	Anggota BPK	1
4	Anggota DPR RI	0
5	Hakim	2
6	Jaksa	21
Jumlah		**6.093**

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, Polresta Denpasar, Disdukcapil, Kejari Denpasar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, 2025

Data menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah berprofesi sebagai ASN, yaitu sebanyak 5.999 orang atau sekitar 98,5% dari total perempuan yang bekerja di sektor pemerintahan. Sementara itu, jumlah perempuan pada profesi lain relatif lebih sedikit, yaitu 70 orang sebagai polisi, 21 orang sebagai jaksa, 2 orang sebagai hakim, dan 1 orang sebagai anggota BPK. Tidak terdapat perempuan yang menjabat sebagai anggota DPR RI pada tahun 2025.

Secara umum, keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan cukup tinggi yang ditunjukkan oleh jumlah ASN perempuan yang sangat dominan. Namun, representasi perempuan pada jabatan strategis dan lembaga tertentu seperti anggota DPR RI, BPK, hakim, dan jaksa masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan telah berpartisipasi aktif dalam birokrasi pemerintahan, peluang peningkatan

keterwakilan perempuan pada posisi pengambilan keputusan dan jabatan strategis masih perlu terus didorong.

Tabel 7. 22 Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD Kota Denpasar Tahun 2025

Tahun	Pegawai Non ASN		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2025	40	4	44

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2025 (Publikasi Kota Denpasar Dalam Angka Tahun 2026 dengan nara sumber data Sekretariat DPRD Kota Denpasar)

Tabel 7.22 menunjukkan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Kota Denpasar pada tahun 2025 masih tergolong rendah dibandingkan laki-laki. Dari total 44 kursi yang tersedia, sebanyak 40 kursi diduduki oleh laki-laki dan hanya 4 kursi yang diduduki oleh perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif daerah masih belum seimbang.

Jika dilihat dari proporsinya, perempuan hanya menempati sekitar 9,09% dari total kursi, sedangkan laki-laki mendominasi dengan sekitar 90,91%. Kondisi ini mencerminkan bahwa partisipasi perempuan dalam ranah politik, khususnya di tingkat legislatif daerah, masih perlu ditingkatkan. Rendahnya keterwakilan perempuan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan peluang, budaya politik, serta masih kurangnya dukungan terhadap perempuan dalam proses politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan guna mewujudkan kesetaraan gender dalam pengambilan kebijakan publik.

BAB VIII
LAIN-LAIN

8.1. Kekerasan

Kekerasan berbasis gender merupakan salah satu bentuk ketimpangan sosial yang paling nyata sekaligus kompleks, karena berakar pada relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam banyak kasus, kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, ekonomi, hingga kekerasan berbasis digital. Kekerasan ini sering kali terjadi dalam ruang privat (seperti rumah tangga) maupun ruang publik, namun memiliki pola yang berulang: korban didominasi oleh perempuan dan anak perempuan, sementara pelaku umumnya adalah laki-laki yang memiliki relasi dekat dengan korban, seperti pasangan, anggota keluarga, atau pihak yang memiliki otoritas.

Secara statistik, kekerasan berbasis gender kerap sulit teridentifikasi secara utuh karena adanya fenomena *underreporting*atau pelaporan yang rendah. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti stigma sosial, normalisasi kekerasan dalam budaya tertentu, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, serta lemahnya akses terhadap mekanisme perlindungan dan keadilan. Akibatnya, angka resmi yang tercatat sering kali hanya merepresentasikan “puncak gunung es” dari realitas kekerasan yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Dalam konteks ini, data kekerasan tidak hanya menunjukkan jumlah kasus, tetapi juga mencerminkan

tingkat keberanian korban untuk melapor serta sejauh mana sistem perlindungan berjalan efektif.

Dilihat dari bentuknya, kekerasan berbasis gender dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan seksual, misalnya, menjadi salah satu bentuk yang paling sering dilaporkan, mencakup pelecehan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, hingga kekerasan berbasis teknologi seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Sementara itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetap menjadi bentuk kekerasan yang dominan, di mana relasi intim sering kali menjadi ruang reproduksi kekuasaan yang tidak setara dan sulit diintervensi oleh pihak luar.

Dalam perspektif gender, kekerasan tidak dapat dipahami semata sebagai tindakan individual, melainkan sebagai hasil dari konstruksi sosial yang melegitimasi dominasi dan subordinasi berdasarkan jenis kelamin. Norma-norma patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dan perempuan sebagai pihak yang subordinat turut berkontribusi dalam melanggengkan kekerasan. Selain itu, interseksionalitas juga penting untuk diperhatikan, karena perempuan tidak homogen—faktor seperti status ekonomi, usia, disabilitas, orientasi seksual, dan identitas sosial lainnya dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap kekerasan.

Bertolak dari hal di atas, dalam penyusunan profil statistik gender, data kekerasan perlu dianalisis secara komprehensif tidak hanya berdasarkan jumlah kasus, tetapi juga distribusi menurut jenis kekerasan, karakteristik korban dan pelaku, lokasi kejadian, serta pola pelaporan dan penanganan kasus. Analisis ini penting untuk

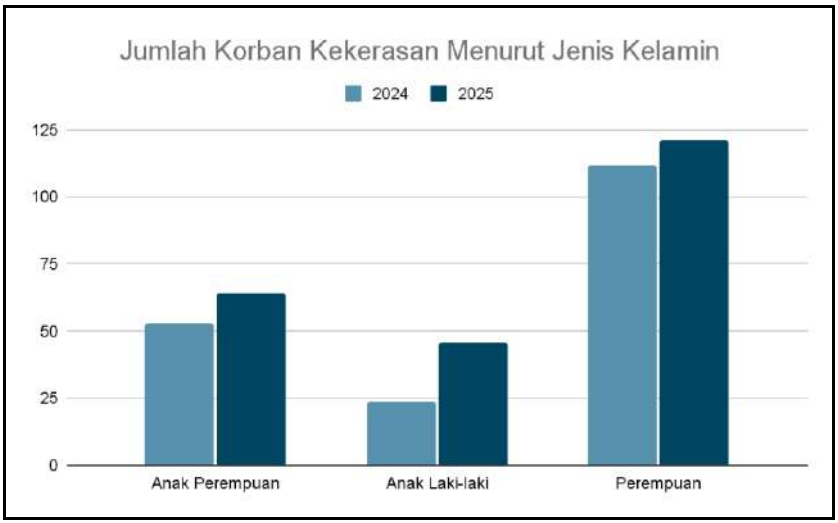
mengidentifikasi kelompok yang paling rentan, mengevaluasi efektivitas kebijakan, serta merumuskan intervensi yang lebih responsif gender. Pada akhirnya, statistik kekerasan bukan sekadar angka, melainkan representasi dari ketidakadilan struktural yang membutuhkan perhatian serius dan pendekatan kebijakan yang berkeadilan gender.

Tabel 8.1 Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025

Korban Kekerasan	Anak Perempuan	Anak Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2024	53	24	112	189
2025	64	46	121	231

Sumber : UPTD PPA Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah kekerasan mengalami peningkatan sejumlah 42 kasus. Pada tahun 2024 terdapat 189 kasus dan menjadi 231 kasus pada tahun 2025. Apabila dilihat dari kategori, maka peningkatan paling signifikan terjadi pada kasus anak laki-laki. Pada kategori anak laki-laki terjadi peningkatan sejumlah 22 kasus. Sedangkan pada anak perempuan terjadi peningkatan sebanyak 11 kasus dan peningkatan 9 kasus pada kategori perempuan.



Gambar 8.1 Jumlah Korban Kekerasan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar (2024-2025)

Dari perspektif probabilitas, peningkatan kasus pada masing-masing kategori dapat diartikan sebagai meningkatnya peluang terjadinya kekerasan dalam kelompok tersebut selama periode waktu tertentu. Kenaikan terbesar pada anak laki-laki menunjukkan probabilitas relatif yang lebih tinggi dibanding kelompok lain, yang bisa mencerminkan perubahan pola paparan risiko atau peningkatan pelaporan. Sementara itu, tetap adanya peningkatan pada anak perempuan dan perempuan dewasa menegaskan bahwa ketimpangan gender masih berperan dalam kerentanan terhadap kekerasan, sehingga analisis statistik perlu tetap menempatkan kekerasan sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh struktur sosial dan relasi gender yang tidak setara.

Tabel 8.2 Ciri-ciri Korban Kekerasan Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2025

Umur	Ciri-ciri Korban		
	Jenis Kelamin		
	L	P	L+P
0-17 th	47	47	94
18-24 th	1	15	16
25-59 th	6	97	103
60 th +	0	3	3
Jumlah	54	162	216

Sumber : UPTD PPA Kota Denpasar, 2025

Tabel 8. 3 Bentuk-bentuk Kekerasan di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin Tahun 2024 dan 2025

Bentuk Kekerasan	2024			2025		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Fisik	1	30	31	7	37	44
Fisik Lainnya	13	9	22	12	20	32
Psikis	6	60	66	15	51	66
Psikis Lainnya	6	27	33	7	36	43
Seksual	0	11	11	0	12	12
Seksual Lainnya	2	24	26	5	29	34
Penelantaran	6	9	15	11	18	29
TTPO	0	0	0	0	0	0
ABH	13	3	16	8	3	11
Perkawinan Anak	1	2	3	0	0	0
Perebutan Kuasa Asuh Anak	8	10	18	12	14	26
Kasus Lainnya	31	64	95	30	42	72
Total	87	249	336	107	262	369

Sumber : UPTD PPA Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan Tabel 8.3. mengenai bentuk-bentuk kekerasan di Kota Denpasar menurut jenis kelamin pada

tahun 2024 dan 2025 terdapat 12 jenis kekerasan. Pada kurun satu tahun terakhir terjadi peningkatan kasus sejumlah 33 kasus dengan komposisi perempuan masih menjadi korban dominan. Pada tahun 2024, korban perempuan berjumlah 249 orang dan meningkat menjadi 262 orang pada tahun 2025. Sedangkan, pada tahun 2024 korban laki-laki berjumlah 87 orang, dan meningkat pada tahun 2025 menjadi 107 orang. Jika dilihat berdasarkan kategori, maka kekerasan psikis memiliki kasus tertinggi sejumlah 66 kasus baik pada tahun 2024 dan 2025. Sedangkan untuk kategori dengan kasus kekerasan terendah adalah TPPO yakni 0 kasus pada tahun 2024 dan 2025.

Secara gender, kekerasan tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan individual, tetapi sebagai manifestasi dari relasi kuasa yang timpang dalam struktur sosial. Perempuan yang secara historis berada dalam posisi subordinat lebih rentan menjadi korban karena adanya normalisasi kontrol, dominasi, dan objektifikasi terhadap tubuh serta peran perempuan. Sementara itu, laki-laki juga dapat menjadi korban, namun sering kali tidak terlaporkan secara optimal akibat konstruksi maskulinitas yang menuntut laki-laki untuk tampil kuat, tidak menunjukkan kelemahan, dan menghindari pengakuan sebagai korban, sehingga memperkuat fenomena *underreporting* pada kelompok ini.

Jika dilihat dari bentuk kekerasan, dominasi kekerasan psikis menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender tidak selalu hadir dalam bentuk fisik, melainkan juga bekerja melalui mekanisme kontrol emosional, intimidasi, dan kekuasaan simbolik yang halus namun berdampak jangka panjang. Hal ini memperlihatkan

bahwa kekerasan beroperasi dalam spektrum yang luas dan sering kali tersembunyi dalam relasi sehari-hari. Sementara bentuk kekerasan tertentu yang sangat rendah atau tidak muncul dalam data dapat mencerminkan rendahnya prevalensi, tetapi juga berpotensi menunjukkan keterbatasan pelaporan atau sensitivitas sistem dalam mengidentifikasi bentuk kekerasan yang lebih kompleks dan terstruktur.

Tabel 8. 4 Persentase Korban Kekerasan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025

Tahun	Laki-laki	Perempuan
2024	0,07%	0,49%
2025	0,12%	0,50%

Sumber : UPTD PPA Kota Denpasar, 2025

Peningkatan persentase korban kekerasan baik pada laki-laki maupun perempuan menunjukkan adanya kenaikan risiko kekerasan secara relatif dalam populasi, meskipun besaran kenaikannya berbeda. Kenaikan pada laki-laki dari 0,07% menjadi 0,12% mengindikasikan peningkatan yang lebih signifikan secara proporsional, yang dapat mencerminkan meningkatnya paparan risiko atau perbaikan dalam pelaporan kasus pada kelompok tersebut. Sementara itu, kenaikan pada perempuan dari 0,49% menjadi 0,50% menunjukkan bahwa perempuan tetap berada pada posisi yang lebih rentan, dengan tingkat prevalensi yang konsisten lebih tinggi dibanding laki-laki. Secara gender, pola ini menegaskan bahwa meskipun kerentanan terhadap kekerasan dialami oleh

semua gender, perempuan masih menjadi kelompok yang secara struktural paling terdampak, sementara dinamika pada laki-laki menunjukkan adanya perubahan dalam pola kerentanan atau pelaporan yang perlu dicermati lebih lanjut.

Tabel 8.5 Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani oleh Dinas P3A menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025

Tahun	Laki-laki	Perempuan
2024	0,07%	0,15%
2025	0,12%	0,17%

Sumber : UPTD PPA Kota Denpasar, 2025

Peningkatan persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh DP3AP2KB Kota Denpasar pada kedua kategori gender menunjukkan adanya kenaikan kerentanan anak terhadap kekerasan sekaligus meningkatnya akses atau pelaporan ke layanan perlindungan. Kenaikan pada anak laki-laki dari 0,07% menjadi 0,12% mengindikasikan peningkatan yang cukup signifikan secara relatif, yang dapat mencerminkan perubahan pola paparan risiko atau meningkatnya kesadaran untuk melaporkan kekerasan terhadap anak laki-laki. Sementara itu, kenaikan pada anak perempuan dari 0,15% menjadi 0,17% menegaskan bahwa anak perempuan tetap memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi, sejalan dengan kerangka gender yang

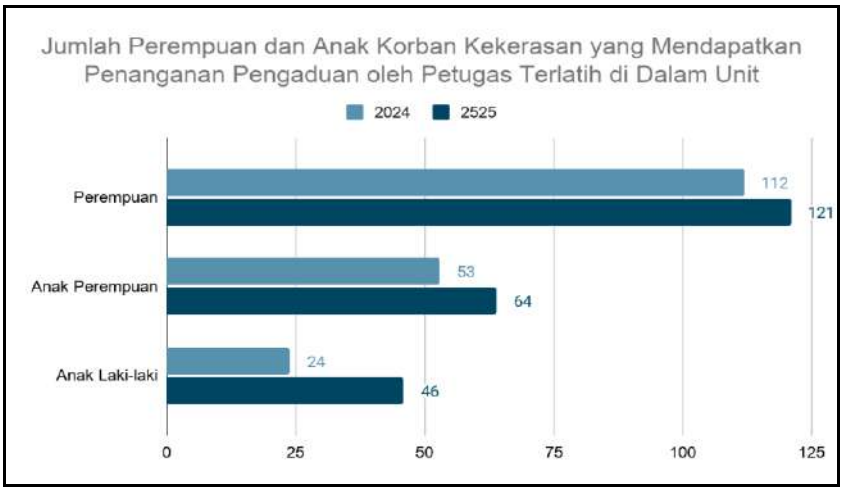
menunjukkan bahwa perempuan, termasuk anak perempuan, lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, khususnya yang berbasis relasi kuasa. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan isu yang terus berkembang dan memerlukan pendekatan responsif gender dalam upaya pencegahan dan penanganannya.

Jika dilihat pada Tabel di bawah, maka dapat dilihat data mengenai jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih. Data menunjukkan peningkatan pada tahun 2025 dari tahun sebelumnya 2024. Pada tahun 2024 total kasus yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih sejumlah 189 orang dan meningkat pada tahun 2025 menjadi 231 orang. Adapun kategori dengan penanganan terbesar diperoleh oleh korban kekerasan perempuan yakni sebesar 121 kasus pada tahun 2025. Kemudian kategori dengan penanganan terendah diperoleh oleh kategori anak laki-laki yakni 46 kasus pada tahun 2025.

Tabel 8. 6 Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Tahun 2024 dan 2025

Korban Kekerasan	Tahun	
	2024	2025
Perempuan	112	121
Anak Perempuan	53	64
Anak Laki-laki	24	46
Jumlah	189	231

Sumber : UPTD PPA Kota Denpasar, 2025



Gambar 8.2 Jumlah perempuan dan Anak Korban kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Tahun 2024 dan 2025

Peningkatan jumlah kasus yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih menunjukkan adanya penguatan akses terhadap layanan perlindungan bagi korban kekerasan. Dalam perspektif gender, hal ini penting karena penanganan yang responsif gender tidak hanya berfokus pada jumlah layanan, tetapi juga pada kualitas intervensi yang mampu memahami kebutuhan spesifik korban berdasarkan pengalaman dan posisi sosialnya. Dominasi penanganan pada korban perempuan mengindikasikan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan, sehingga membutuhkan dukungan yang lebih intensif dan berkelanjutan dalam kerangka perlindungan berbasis gender.

Sementara itu, rendahnya jumlah penanganan pada anak laki-laki tidak dapat langsung diartikan sebagai rendahnya tingkat kekerasan, melainkan juga dapat mencerminkan adanya hambatan struktural dan kultural dalam pelaporan. Konstruksi maskulinitas yang menuntut anak laki-laki untuk tidak menunjukkan kerentanan dapat mengurangi kemungkinan mereka untuk mengakses layanan pengaduan. Oleh karena itu, data ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif gender, yang tidak hanya melindungi perempuan sebagai kelompok rentan utama, tetapi juga memastikan bahwa laki-laki dan anak laki-laki mendapatkan akses yang setara terhadap perlindungan dan penanganan kekerasan.

Adapun data berikutnya mengenai kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling erat kaitannya dengan relasi gender, karena umumnya berakar pada ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam ruang domestik. Dalam banyak kasus, KDRT mencerminkan bagaimana norma sosial, budaya patriarki, dan konstruksi peran gender berkontribusi pada legitimasi dominasi serta kontrol terhadap pasangan, khususnya perempuan. Oleh karena itu, data KDRT menjadi sangat penting tidak hanya untuk melihat jumlah kasus, tetapi juga untuk memahami bagaimana relasi kuasa bekerja dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana ketimpangan gender termanifestasi dalam bentuk kekerasan.

Pengumpulan dan analisis data KDRT juga berperan strategis dalam perumusan kebijakan berbasis gender, karena dapat mengidentifikasi pola, kelompok

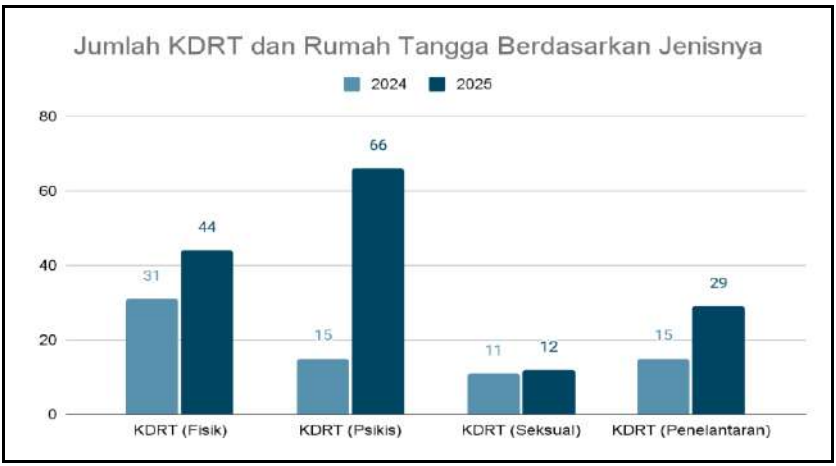
rentan, serta efektivitas mekanisme perlindungan yang ada. Tanpa data yang memadai, kekerasan dalam rumah tangga berisiko terus tersembunyi karena sifatnya yang privat dan sering kali dinormalisasi. Dengan demikian, data KDRT tidak hanya berfungsi sebagai indikator masalah sosial, tetapi juga sebagai dasar penting untuk intervensi yang lebih adil, responsif gender, dan berorientasi pada perlindungan korban.

Peningkatan kasus KDRT dari 72 kasus pada tahun 2024 menjadi 151 kasus pada tahun 2025 menunjukkan adanya eskalasi signifikan dalam kerentanan relasi domestik, yang dapat merefleksikan baik meningkatnya kejadian kekerasan maupun meningkatnya keberanian korban dalam melaporkan kasus. Dalam perspektif gender, fenomena ini mengindikasikan bahwa relasi kuasa dalam rumah tangga masih didominasi oleh struktur yang tidak setara, di mana kontrol, dominasi, dan subordinasi sering kali termanifestasi dalam bentuk kekerasan. Kenaikan yang tajam ini juga menegaskan bahwa KDRT tetap menjadi salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang paling laten namun berdampak luas.

Tabel 8.7 Jumlah KDRT dan Rumah Tangga di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025

Jenis KDRT	2024	2025
KDRT (Fisik)	31	44
KDRT (Psikis)	15	66
KDRT (Seksual)	11	12
KDRT (Penelantaran)	15	29
Jumlah	72	151

Sumber : UPTD PPA Kota Denpasar, 2025



Gambar 8.3 Perbandingan Jumlah KDRT dan Rumah Tangga berdasarkan Jenis KDRT di Kota Denpasar (2024-2025)

Dilihat dari jenisnya, dominasi KDRT psikis dengan 66 kasus menunjukkan bahwa kekerasan tidak selalu berbentuk fisik, melainkan juga hadir dalam bentuk tekanan emosional, intimidasi, dan kontrol psikologis yang sering kali sulit dikenali namun memiliki dampak jangka panjang terhadap korban. Sementara itu, rendahnya kasus KDRT seksual (12 kasus) tidak serta-merta menunjukkan bahwa kekerasan tersebut jarang terjadi, tetapi dapat mencerminkan adanya hambatan dalam pelaporan akibat stigma, rasa takut, dan normalisasi kekerasan dalam relasi intim. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis gender dalam memahami KDRT sebagai fenomena struktural yang membutuhkan intervensi komprehensif, baik dalam pencegahan maupun penanganan.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kekerasan paling serius

yang berkaitan erat dengan relasi kuasa, ketimpangan gender, dan kerentanan sosial-ekonomi. TPPO tidak hanya melibatkan eksploitasi fisik, tetapi juga eksploitasi seksual, tenaga kerja paksa, perbudakan modern, hingga pemanfaatan korban untuk kepentingan ilegal lainnya. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap TPPO, terutama dalam bentuk eksploitasi seksual, karena adanya konstruksi gender yang menempatkan mereka dalam posisi subordinat serta keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan perlindungan sosial.

Dari perspektif gender, TPPO mencerminkan bagaimana ketidaksetaraan struktural dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengeksploitasi kerentanan korban. Faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, migrasi, serta minimnya akses informasi sering kali meningkatkan risiko seseorang menjadi korban perdagangan orang. Selain itu, norma sosial yang diskriminatif juga dapat memperburuk situasi, misalnya dengan menyalahkan korban atau menormalisasi eksploitasi tertentu. Oleh karena itu, TPPO tidak dapat dilihat hanya sebagai kejahatan individual, tetapi sebagai fenomena struktural yang membutuhkan pendekatan multidimensional, termasuk pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan penguatan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan intervensi.

Tabel 8. 8 Jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025

Tahun	Anak Perempuan	Anak Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0

Sumber : UPTD PPA Kota Denpasar, 2025

Pada tabel di atas menunjukkan data jumlah TPPO menurut jenis kelamin di Kota Denpasar pada tahun 2024 dan 2025. Data menunjukkan bahwa kasus TPPO nihil. Tidak ditemukannya kasus TPPO dalam data tidak serta-merta menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak terjadi, melainkan dapat mengindikasikan kemungkinan rendahnya pelaporan, keterbatasan deteksi, atau masih lemahnya identifikasi terhadap kasus-kasus yang bersifat terselubung. Dalam perspektif gender, hal ini penting karena TPPO sering kali berkaitan dengan eksploitasi yang menargetkan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak, yang dalam banyak kasus sulit untuk mengakses mekanisme pelaporan akibat tekanan, ancaman, maupun ketergantungan ekonomi pada pelaku.

Ketiadaan data juga dapat mencerminkan adanya *underreporting* yang dipengaruhi oleh stigma sosial, ketakutan, serta kurangnya literasi masyarakat terhadap bentuk-bentuk TPPO. Oleh karena itu, angka nol tidak dapat diinterpretasikan sebagai tidak adanya masalah, tetapi justru perlu dibaca secara kritis sebagai indikasi perlunya penguatan sistem pendataan, peningkatan kapasitas deteksi, serta pendekatan berbasis

gender yang lebih sensitif dalam mengidentifikasi dan menangani potensi kasus TPPO di masyarakat.

Tabel 8. 9 Pasangan Usia Subur menurut Kepesertaan KB Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah PUS Peserta KB modern	Metode Kontrasepsi Modern							
			MOW	MOP	IUD	IMPLAN	Suntik	PIL	Kondom	MAL
1.	Denpasar Selatan	7.859	865	10	3.188	183	1.990	763	840	20
2.	Denpasar Timur	5.917	815	9	2.631	196	1.124	313	804	25
3.	Denpasar Barat	8.476	953	11	3.321	242	2.286	547	1.097	19
4.	Denpasar Utara	7.557	894	21	3.030	165	2.152	427	807	16
JUMLAH TOTAL		29.809	3.527	51	12.170	786	7.552	2.095	3.548	80

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran, 2025

Berdasarkan tabel 8.9 menunjukkan bahwa pada tahun 2025, sebanyak 29.809 pasangan usia subur (PUS) di Kota Denpasar aktif menggunakan alat kontrasepsi modern. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, Denpasar Barat menjadi wilayah dengan peserta KB terbanyak, yakni sebesar 28,4% atau sebanyak 8.476 pasangan. Denpasar Selatan berada di posisi kedua, yakni sebesar 26,4% atau sebanyak 7.859 pasangan, disusul oleh Denpasar Utara sebesar 25,4% atau sebanyak 7.557 pasangan. Denpasar Timur menempati posisi paling akhir yakni sebesar 19,8% atau sebanyak 5.917 pasangan. Secara keseluruhan, proporsi antar kecamatan terbilang

cukup merata, meskipun kecamatan Denpasar Timur sedikit tertinggal dibandingkan tiga kecamatan lainnya.

Jika dilihat berdasarkan metode kontrasepsi yang digunakan, maka IUD mendominasi dengan 12.170 pengguna atau sebesar 40,8%. Metode terbanyak kedua adalah suntik KB dengan 7.552 pengguna atau sebesar 25,3%, disusul oleh kondom sebanyak 3.548 pengguna atau sebesar 11,9%, dan MOW sebanyak 3.527 pengguna atau sebesar 11,8%. Sementara itu, pil KB digunakan oleh 2.095 orang atau sebesar 7%, implan sebanyak 786 orang atau sebesar 2,6%, dan MAL hanya digunakan oleh 80 orang atau sebanyak 0,3% menjadikannya metode kontrasepsi kedua yang digunakan paling sedikit setelah MOP yang hanya digunakan oleh 51 orang atau sebesar 9,2% dari total 29.809 peserta.

8.2. Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan dan pengemis (gepeng) merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan struktural, termasuk dalam aspek gender. Dalam banyak kasus, perempuan, anak-anak, dan lansia menjadi kelompok yang lebih rentan terjerumus dalam kondisi ini karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, serta perlindungan sosial. Dari perspektif gender, ketimpangan ini tidak hanya terkait dengan faktor ekonomi, tetapi juga dengan konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih bergantung secara ekonomi dan sosial, sehingga meningkatkan risiko mereka mengalami marginalisasi dan masuk ke dalam lingkaran kemiskinan ekstrem yang berujung pada kehidupan sebagai gepeng.

Selain itu, relasi gender juga berpengaruh pada bentuk dan strategi bertahan hidup yang digunakan oleh gepeng. Perempuan, misalnya, lebih sering menghadapi risiko eksploitasi, kekerasan, dan stigma sosial, termasuk dalam bentuk seksualisasi atau pemanfaatan tubuh sebagai alat bertahan hidup. Sementara itu, laki-laki dalam kondisi serupa sering kali menghadapi tekanan sosial untuk tetap “kuat” dan tidak bergantung, yang dapat membatasi akses mereka terhadap bantuan atau intervensi sosial. Oleh karena itu, penanganan masalah gepeng tidak cukup hanya melalui pendekatan ekonomi atau ketertiban sosial, tetapi juga harus mempertimbangkan perspektif gender untuk memahami kerentanan yang berbeda dan merancang kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan sensitif terhadap kebutuhan masing-masing kelompok. Pada tabel di bawah merupakan data mengenai jumlah gepeng menurut jenis kelamin yang terjaring dan telah dibina dipulangkan ke daerah asal pada tahun 2024 dan 2025.

Tabel 8. 10 Jumlah Gepeng menurut Jenis Kelamin yang Terjaring dan Telah Dibina Dipulangkan ke Daerah Asal menurut Jenis Kelamin Tahun 2024 dan 2025

Kelompok Umur	2024			2025		
	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh
0-4 Tahun	1	9	10	2	0	2
5-9 Tahun	2	2	4	4	3	7
10-14 Tahun	5	4	9	10	4	14
15-18 Tahun	19	7	26	21	7	28
19 Tahun Keatas	187	52	240	173	65	238
Jumlah	214	74	288	210	79	289

Sumber : Dinas Sosial Kota Denpasar, 2025

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah gepeng mengalami peningkatan yang dipulangkan ke daerah asal. Pada tahun 2024 jumlah total ialah 288 orang dengan komposisi 214 berjenis kelamin laki-laki dan 74 berjenis kelamin perempuan. Sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 289, dengan komposisi 210 berjenis kelamin laki-laki dan 79 berjenis kelamin perempuan. Menariknya, jika dilihat dari usia, jumlah tertinggi berada pada usia 19 tahun ke atas yakni 240 orang pada tahun 2024 dan 238 pada tahun 2025. Sedangkan, jumlah terendah berada pada kategori usia 5-9 tahun pada tahun 2024 yakni 4 orang dan 0-4 tahun pada tahun 2025 yakni 2 orang.

Peningkatan jumlah gepeng yang dipulangkan ke daerah asal menunjukkan bahwa persoalan gelandangan dan pengemis masih menjadi isu sosial yang persisten, dengan dinamika yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Dalam perspektif gender, dominasi laki-laki dalam jumlah gepeng mengindikasikan bahwa laki-laki lebih banyak terpapar pada mobilitas ekonomi informal dan kondisi kerja yang tidak stabil, yang dapat mendorong mereka masuk dalam situasi kerentanan sosial. Namun, keberadaan perempuan dalam jumlah yang juga signifikan menunjukkan bahwa mereka menghadapi kerentanan ganda, baik akibat keterbatasan akses ekonomi maupun risiko eksploitasi dan kekerasan dalam ruang publik.

Dilihat dari aspek usia, dominasi kelompok usia dewasa menunjukkan bahwa gepeng lebih banyak berasal dari individu yang seharusnya berada dalam usia produktif, yang mengindikasikan adanya kegagalan sistem ekonomi dan perlindungan sosial dalam menyediakan pekerjaan yang layak. Sementara itu, keberadaan anak-

anak dalam kategori usia tertentu, meskipun dalam jumlah kecil, tetap menjadi perhatian serius karena menunjukkan potensi eksploitasi anak dalam praktik pengemisan. Dalam konteks gender dan usia, hal ini menegaskan bahwa kebijakan penanganan gepeng perlu bersifat komprehensif, tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga pada penguatan perlindungan sosial yang responsif gender dan usia, serta upaya pencegahan agar kelompok rentan tidak terus berada dalam siklus kerentanan struktural.

8.3. Lansia Terlantar PPKS

Lanjut Usia (lansia) terlantar dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan kelompok yang mengalami kerentanan tinggi akibat keterbatasan fisik, ekonomi, serta minimnya dukungan keluarga maupun sosial. Dalam konteks ini, lansia tidak hanya menghadapi penurunan kapasitas individu, tetapi juga sering kali terdampak oleh sistem sosial yang belum sepenuhnya inklusif terhadap kebutuhan usia lanjut. Kondisi keterlantaran ini dapat muncul karena faktor kemiskinan, migrasi keluarga, perubahan struktur keluarga, hingga lemahnya sistem perlindungan sosial yang menjamin kesejahteraan lansia.

Dalam perspektif gender, keterlantaran lansia menunjukkan adanya perbedaan pengalaman antara laki-laki dan perempuan. Lansia perempuan cenderung lebih rentan karena memiliki harapan hidup lebih panjang, tetapi sering kali memiliki akses ekonomi yang lebih terbatas akibat riwayat pekerjaan informal atau tidak berbayar, seperti pekerjaan domestik. Selain itu, perempuan juga lebih mungkin mengalami kemiskinan di usia tua karena

ketergantungan ekonomi pada pasangan selama masa produktif. Sementara itu, lansia laki-laki dapat menghadapi kerentanan dalam aspek sosial-emosional, terutama ketika mereka kehilangan peran sebagai pencari nafkah yang selama ini menjadi identitas maskulinitasnya. Oleh karena itu, penanganan lansia terlantar perlu menggunakan pendekatan responsif gender, yang mempertimbangkan perbedaan pengalaman, kebutuhan, dan bentuk kerentanan antara lansia laki-laki dan perempuan, sehingga intervensi yang diberikan dapat lebih tepat dan berkeadilan.

Pada tabel di bawah dapat dilihat data mengenai jumlah lansia terlantar PPKS di Kota Denpasar pada tahun 2025. Apabila dilihat secara keseluruhan maka terjadi penurunan jumlah lansia terlantar PPKS dari tahun 2024 sejumlah 278 lansia menjadi 248 lansia di tahun 2025. Adapun lansia laki-laki selalu berjumlah lebih rendah dibandingkan perempuan. Pada tahun 2024 jumlah lansia laki-laki ialah 101 lansia dan menurun menjadi 98 lansia pada tahun 2025. Sedangkan, jumlah lansia perempuan pada tahun 177 lansia menurun menjadi 150 lansia pada tahun 2025.

Tabel 8. 11 Jumlah Lansia Terlantar PPKS di Kota Denpasar Tahun 2024 dan 2025

NO	Kecamatan	Usia 60 Tahun		Total
		L	P	
1	2024	101	177	278
2	2025	98	150	248

Sumber: Dinas Sosial Kota Denpasar, 2025

Penurunan jumlah lansia terlantar PPKS dari tahun 2024 ke 2025 menunjukkan adanya indikasi perbaikan dalam sistem perlindungan sosial atau peningkatan intervensi terhadap kelompok lansia, baik melalui layanan pemerintah maupun dukungan keluarga dan komunitas. Namun, dominasi lansia perempuan dalam jumlah keseluruhan menegaskan bahwa kerentanan lansia memiliki dimensi gender yang kuat. Lansia perempuan cenderung lebih rentan terhadap kondisi keterlantaran karena faktor historis seperti keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal, rendahnya kepemilikan aset, serta ketergantungan ekonomi pada pasangan selama masa produktif.

Sementara itu, meskipun jumlah lansia laki-laki lebih rendah, penurunan yang terjadi pada kedua kelompok tetap perlu dilihat secara kritis dalam kerangka gender. Lansia perempuan yang tetap mendominasi menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang berlanjut hingga usia lanjut, di mana perempuan lebih sering berada dalam kondisi kemiskinan dan keterbatasan dukungan sosial. Oleh karena itu, data ini menegaskan pentingnya kebijakan perlindungan lansia yang sensitif gender, yang tidak hanya berfokus pada penurunan jumlah kasus, tetapi juga pada penghapusan ketimpangan struktural yang menyebabkan perempuan lebih rentan mengalami keterlantaran di usia tua.

BAB IX
KESIMPULAN

Profil Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2026 merupakan instrumen strategis yang menyajikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk menggambarkan kondisi perempuan dan laki-laki secara komprehensif di berbagai sektor pembangunan. Keberadaan profil ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia data, tetapi juga sebagai alat analisis dalam mengidentifikasi kesenjangan gender serta mendukung perumusan kebijakan yang berbasis bukti dan responsif gender.

Secara umum, pembangunan di Kota Denpasar menunjukkan kecenderungan yang positif dalam mendorong kesetaraan gender. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk dalam kegiatan ekonomi, UMKM, serta sektor pemerintahan. Perempuan bahkan mendominasi pada sektor-sektor tertentu seperti usaha salon kecantikan dan beberapa jenis usaha mikro, yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam menopang perekonomian lokal. Namun demikian, analisis data juga menunjukkan bahwa kesetaraan gender belum sepenuhnya tercapai. Masih terdapat kesenjangan yang cukup nyata di beberapa sektor strategis. Dalam sektor ketenagakerjaan, misalnya, laki-laki masih mendominasi pada sektor pariwisata, baik dari sisi jumlah tenaga kerja maupun posisi tanggung jawab, yang mengindikasikan adanya perbedaan akses dan peluang kerja antara perempuan dan laki-laki.

Selain itu, meskipun jumlah perempuan yang terlibat dalam berbagai aktivitas pembangunan meningkat,

keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan dan jabatan strategis masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pemberdayaan perempuan belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal kontrol dan pengaruh terhadap kebijakan dan arah pembangunan.Di sisi lain, peningkatan jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) menunjukkan adanya upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun demikian, distribusi partisipasi tersebut masih menunjukkan adanya perbedaan pada beberapa jenjang pelatihan, yang perlu menjadi perhatian dalam upaya menciptakan kesetaraan kesempatan pengembangan karier.

Secara keseluruhan, profil ini menegaskan bahwa pembangunan di Kota Denpasar telah mengarah pada prinsip keadilan dan kesetaraan gender, namun masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang memengaruhi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterima oleh perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, pemanfaatan data statistik gender secara optimal menjadi sangat penting dalam mengidentifikasi permasalahan secara tepat, sekaligus sebagai dasar dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keberadaan Profil Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi landasan utama dalam memperkuat implementasi pengarusutamaan gender, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta mendorong terwujudnya pembangunan yang benar-benar setara dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS). (2016). Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016 dan Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender 2018 (Kajian Lanjutan 2)

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Pendidikan dan Anak Tidak Bersekolah di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Kesehatan Indonesia.

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025). Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen. Diakses dari https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2546/ekonomi-indonesia-tahun-2025-tumbuh-5-11-persen.html

Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. (2025). Kota Denpasar Dalam Angka 2025. Diakses dari: https://denpasarkota.bps.go.id/publication.html

Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. (2025). Statistik Daerah Kota Denpasar 2025. Diakses dari: https://denpasarkota.bps.go.id/id/publication/2025/09/25/eef7f905ca2faa21f69fff7d/statistik-daerah-kota-denpasar-2025.html

Bredekamp, S., & Copple, C. (1993). *Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Programs Serving Children from Birth Through Age 8 (2nd ed.)*. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children (NAEYC).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. (2025). Data Kependudukan Kota Denpasar Tahun 2025. Diakses dari: https://www.kependudukan.denpasarkota.go.id/page/data-tahun-2025

Dinas Pertanian Kota Denpasar. (2025). Data Kelompok Wanita Tani dan Penyuluh Pertanian Kota Denpasar.

Dinas Pariwisata Kota Denpasar. (2025). Statistik Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2025. Diakses dari: https://www.pariwisata.denpasarkota.go.id/download

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. (2025). Data Tenaga Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar.

Dinas Sosial Kota Denpasar. (2025). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Denpasar.

Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar. (2025). Buku Saku Ketenagakerjaan Kota Denpasar.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar. (2025). Data UMKM Kota Denpasar Tahun 2025.

Handayani, W. (2023). Gendered Communication: Gender Mainstreaming and Gender Differences in the Age of Gender Equality. Jurnal Informasi.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Laporan analisis penyebab putus sekolah dan ketimpangan akses pendidikan*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). Pengarusutamaan Gender (PUG).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2021. Pembangunan Gender di Indonesia. Jakarta: KPPPA.

Pemerintah Kota Denpasar. (2020). Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender.

Mingkase, N., & Rohmaniyah, I. (2022). Konstruksi gender dalam problematika childfree di sosial media Twitter. Jurnal Studi Islam Gender dan Anak.

Musyarofah, L., & Istiandari, D. N. 2025. “Pengaruh Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.” Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Nusantara, 4(3), 55–70.

Nurdin. (2024). Analisis Pengarusutamaan Gender di Indonesia, 2000–2023: Pendekatan Institusionalisasi. Jurnal Ilmiah Global Education, 5(2), 948–958.

Peraturan Pemerintah. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Slameto. (2015). *Belajar dan faktor-faktor yang memengaruhinya (edisi keenam)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugihartono., Fathiyah, K. N., Harahap, F., Setiawati, F. A., Nurhayati, S. R. (2013). *Psikologi Pendidikan (edisi kedua)*. Yogyakarta: UNY Press.

Susilowati, E., Chairunisa, F., & Ahmad, M. S. (2021). Kebijakan program Pojok ASI untuk tercapainya ASI eksklusif. Jurnal Administrasi Negara, 27(2), 161–181.

The World Bank. (2022). *Education sector analysis / World Development Report 2022: Learning Poverty and Education Financing in Indonesia.*

United Nations Children's Fund (UNICEF). (2020). The state of the world's children 2020: On my mind promoting, protecting and caring for children's mental health. New York: UNICEF.

United Nations Children's Fund (UNICEF). (2023). Reports on School Dropouts and Learning Losses in Indonesia and Globally.

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women). (2020). World's Women 2020: Double burden for women – Caregivers and greater risk of Alzheimer's.

United Nations Development Programme (UNDP). (2022). Human Development Report.

United Nations Development Programme (UNDP). 2023. Human Development Report 2023/2024. New York: UNDP.

World Health Organization & United Nations Children's Fund. (2018). Breastfeeding and family-friendly policies. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization & United Nations Children's Fund. (2018). Global monitoring report on the Baby-Friendly Hospital Initiative and implementation of the Ten Steps to Successful Breastfeeding. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization (WHO). (2019). Immunization: Missed Opportunities and Barriers to Vaccination.

World Health Organization (WHO). (2020). Constitution of the World Health Organization.

World Health Organization (WHO). (2020). Guideline: Assessment of Nutritional Status of Children.

World Health Organization (WHO). (2021). Global report on diabetes and related non-communicable diseases.

